



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN IMPLEMENTASINYA  
DI KABUPATEN PURWAKARTA**

**TESIS**

**NURSEHAN SUGIHARTO  
1006744212**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM MAGISTER ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
DEPOK  
JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN IMPLEMENTASINYA  
DI KABUPATEN PURWAKARTA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial (M.Kesos)**

**NURSEHAN SUGIHARTO  
1006744212**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM MAGISTER ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
PEMINATAN PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN  
DEPOK  
JULI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nursehan Sugiharto

NPM : 1006744212

Tanda tangan : 

Tanggal : 3 Juli 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Nursehan Sugiharto  
NPM : 1006744212  
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Judul Tesis : Kebijakan Pendidikan dan Implementasinya di  
Kabupaten Purwakarta

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial (M.Kesos) pada Program Studi Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bagus Aryo, Ph.D (.....)  
Penguji : Drs. Priadi Permadi, M.Si (.....)  
Penguji : Fentiny Nugroho, MA, Ph.D (.....)  
Penguji : Dra. Fitriyah, M.Si (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 3 Juli 2012

## KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillaahirrahmaanirrahiim.*

*Alhamdulillah* *rabbi'l'aalamiin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa hanya dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Program Pascasarjana Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dalam bentuk penulisan tesis yang berjudul **Kebijakan Pendidikan dan Implementasinya di Kabupaten Purwakarta**.

Penulis menyadari bahwa kedalaman isi dari tesis ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan dari ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi penyempurnaan pembuatan karya ilmiah selanjutnya.

Berbagai kesulitan telah penulis hadapi selama penulisan tesis ini, namun berkat bantuan, baik dalam bentuk bimbingan, dukungan dan dorongan semangat dari berbagai pihak, semuanya dapat teratasi. Untuk itu, dalam kesempatan ini tak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Keluarga tercinta, terutama istri dan anak saya Qoriah Nur dan Mazaya Raihanah, yang selalu memahami dan memberikan dukungan penuh kepada saya. *Love both of you my angels..* kemudian kedua orang tua dan ibu mertua yang selalu mendoakan kebaikan tak henti-hentinya untuk saya dan keluarga. *Rabbighfirlii wali walidayya warhamhuma kamaa rabbayaniishaghira*.
2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Pusdiklat Kessos) Kementerian Sosial RI selaku penanggung jawab pemberi beasiswa tugas belajar di lingkungan Kementerian Sosial RI serta segenap pimpinan dan pegawai di lingkungan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Jayapura atas pemberian kesempatan kepada saya untuk melanjutkan studi S2 di Universitas Indonesia.

3. Bapak Bagus Aryo, Ph.D selaku dosen pembimbing dalam penulisan tesis ini, terima kasih atas arahan dan bimbingannya. Bapak Drs. Priadi Permadi, M.Si selaku dosen penguji ahli saat sidang tesis, terima kasih atas saran dan masukannya. Ibu Fentiny Nugroho, MA, Ph.D dan Ibu Dra. Fitriyah, M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, serta kepada seluruh staf pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia untuk ilmu dan pengetahuannya yang bermanfaat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta baik lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif, serta tokoh masyarakat di Kelurahan Nagri Kaler dan Desa Rawasari atas kesediaan waktu yang diberikan sebagai nara sumber dari penelitian ini.
5. Seluruh teman-teman di Program Pascasarjana Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, terutama teman-teman seperjuangan tugas belajar Kementerian Sosial RI : Ka Mery, Mba Lusi, Mba Fitri, Mba Nita, Ayu, Alim dan Regina, terima kasih atas kebersamaan dan kekompakannya selama ini.
6. Seluruh orang-orang yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah berkontribusi dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini.

Atas bantuan dan jasa-jasa semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan, penulis ucapkan *jazakumullah khairan katsiran*. Semoga Allah SWT membalasnya dengan berlipat ganda serta menjadikannya sebagai pahala disisi-Nya. Aamiin. Akhir kata, penulis berharap bahwa penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca yang akan meneliti tema sejenis pada umumnya.

Jakarta, 20 Juni 2012

Nursehan Sugiharto

**HALAMAN PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nursehan Sugiharto

NPM : 1006744212

Program Studi : Pascasarjana Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial

Departemen : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Kebijakan Pendidikan dan Implementasinya di Kabupaten Purwakarta

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 3 Juli 2012

Yang Menyatakan



(Nursehan Sugiharto)

## ABSTRAK

Nama : Nursehan Sugiharto  
Program Studi : Pascasarjana Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Judul : Kebijakan Pendidikan dan Implementasinya di Kabupaten Purwakarta

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Tesis ini membahas mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian mendeskripsikan kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah berjalan cukup baik, di mana pemerintah daerah sudah sangat perhatian terhadap pendidikan. Meski demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan masih menemui kendala, salah satunya masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, terutama di daerah pedesaan.

Kata kunci : Pendidikan, Kualitas Hidup, Kebijakan

## ABSTRACT

Name : Nursehan Sugiharto  
Study Program : Master's Degree of Social Welfare Science  
Title : Education Policy and Implementation in Purwakarta Regency

Education be possessed of important role to increase human quality of life. This thesis discussed about policy did by Purwakarta Regency Government to increase education in Purwakarta Regency. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of deep interview. Research results describe education policy did by Purwakarta Regency Government has been running well-to-do, whereabouts local government has been concern with education. Such was the case, implementation at field still get obstacle, like low of people comprehension about how important of education, especially in rural area.

Key words : Education, Quality of Life, Policy

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABTRAK/ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Permasalahan.....	14
1.3. Tujuan Penelitian.....	15
1.4. Manfaat Penelitian.....	15
1.4.1. Manfaat Akademis.....	15
1.4.2. Manfaat Praktis.....	15
1.5. Metodologi Penelitian.....	16
1.5.1. Pendekatan Penelitian.....	16
1.5.2. Jenis Penelitian.....	16
1.5.3. Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	17
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
1.5.5. Teknik Pemilihan Informan.....	20
1.5.6. Teknik Analisa Data.....	24
1.6. Sistematika Penulisan.....	26
<b>2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>27</b>
2.1. Pembangunan Sosial.....	27
2.2. Kualitas Hidup.....	30
2.3. Pendidikan.....	33
2.3.1. Pengertian Pendidikan.....	33
2.3.2. Tujuan Pendidikan.....	37
2.4. Kebijakan dan Perencanaan Sosial.....	39
2.4.1. Kebijakan Sosial.....	39
2.4.2. Tahapan Kebijakan Sosial.....	45
2.4.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Kebijakan.....	47
2.4.4. Perencanaan Sosial.....	51
2.5. Kerangka Pemikiran.....	57
<b>3. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>59</b>
3.1. Kondisi Geografis.....	59
3.2. Jumlah Penduduk.....	61

3.3. Kondisi Ekonomi Daerah.....	63
3.4. Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta.....	67
3.5. Desa Rawasari Kecamatan Plered.....	69
<b>4. HASIL TEMUAN LAPANGAN.....</b>	<b>73</b>
4.1. Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta.....	73
4.1.1. Pendidikan dan Permasalahannya di Kabupaten Purwakarta.....	73
4.1.1.1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) baru mencapai 7,55 tahun.....	73
4.1.1.2. Angka Melek Huruf (AMH) belum mencapai 100 persen.....	74
4.1.1.3. <i>Drop Out</i> / Putus Sekolah masih cukup tinggi untuk SLTP dan SLTA.....	76
4.1.2. Kebijakan Pendidikan Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.....	77
4.1.2.1. Kebijakan Umum Dalam Bidang Pendidikan.....	77
4.1.2.2. Kebijakan Lokal Dalam Bidang Pendidikan.....	82
4.2. Implementasi Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta..	86
4.2.1. Kebijakan Umum Dalam Bidang Pendidikan.....	86
4.2.2. Kebijakan Lokal Dalam Bidang Pendidikan.....	89
4.2.3. Penilaian Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta.....	91
4.2.4. Keterlibatan DPRD Dalam Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta.....	93
4.2.4.1. Hak Budget DPRD.....	93
4.2.4.2. Hak Pengawasan DPRD.....	95
4.2.5. Keterlibatan Masyarakat Dalam Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta.....	97
4.2.5.1. Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan.....	97
4.2.5.2. Keterlibatan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial Bagi Penyelenggara Pendidikan.....	98
4.2.5.3. Keberhasilan Masyarakat Dalam Mengusung Kebutuhan Terhadap Sarana Pendidikan di Daerahnya.....	99
4.2.5.4. Keterlibatan Masyarakat Dalam Komite Sekolah	101
4.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta.....	102
4.3.1. Faktor Pendukung.....	103
4.3.2. Faktor Penghambat.....	107
<b>5. ANALISA.....</b>	<b>112</b>
5.1. Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta.....	112
5.1.1. Pendidikan dan Permasalahannya di Kabupaten Purwakarta.....	112
5.1.2. Kebijakan Pendidikan Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.....	115

5.2. Implementasi Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta..	116
5.2.1. Penilaian Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta.....	121
5.2.2. Keterlibatan DPRD Dalam Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta.....	124
5.2.3. Keterlibatan Masyarakat Dalam Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta.....	126
5.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta.....	128
5.3.1. Faktor Pendukung.....	128
5.3.2. Faktor Penghambat.....	131
<b>6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>	<b>139</b>
6.1. Kesimpulan.....	139
6.2. Rekomendasi.....	144
<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>146</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indikator Pendidikan DKI Jakarta Tahun 2007-2009.....	8
Tabel 1.2	Jumlah Siswa Putus Sekolah di DKI Jakarta Tahun 2009/2010.....	9
Tabel 1.3	Indikator Makro Bidang Pendidikan Kota Bandung Tahun 2010.....	10
Tabel 1.4	Kerangka Sampling.....	22
Tabel 2.1	Definisi Perencanaan Sosial Menurut Beberapa Ahli.....	51
Tabel 3.1	Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2011.....	61
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan Tahun 2010-2011.....	63
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011.....	67
Tabel 4.1	Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Menurut Tingkat Pendidikan dan Status Sekolah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2009.....	81
Tabel 4.2	Kebijakan Pendidikan Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.....	85
Tabel 4.3	Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009-2010.....	95
Tabel 4.4	Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Pendidikan..	111
Tabel 5.1	Prosentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pada Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta.....	122
Tabel 5.2	Matriks Perbandingan Antara Temuan Lapangan Dengan Ideal.....	135

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Analisis Data Interaktif.....	24
Gambar 2.1	Tahapan Proses Kebijakan Sosial.....	47
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta.....	57
Gambar 3.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Purwakarta.....	60
Gambar 3.2	Kantor Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta.....	67
Gambar 3.3	Suasana Pertokoan Pasar Jumat di Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta.....	68
Gambar 3.4	Salah Satu Fasilitas Gedung SD di Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta.....	68
Gambar 3.5	Kantor Desa Rawasari Kecamatan Plered.....	69
Gambar 3.6	Jalan Utama di Desa Rawasari Kecamatan Plered.....	70
Gambar 3.7	Jalan Setapak di Desa Rawasari Kecamatan Plered.....	70
Gambar 3.8	Fasilitas Gedung SMPN Rawasari.....	71
Gambar 3.9	SMKN1 Plered Yang Terletak di Desa Rawasari Kecamatan Plered.....	72
Gambar 4.1	Spanduk Pendidikan Gratis Bagi Seluruh Siswa di SDN 12, 13, 14 Nagri Kaler.....	89
Gambar 4.2	Bukti Peresmian SMPN Rawasari Dibangun Dengan Partisipasi Masyarakat.....	100
Gambar 4.3	Musholla Sekolah Sebagai Penunjang Kegiatan Pendidikan di Sekolah.....	102
Gambar 4.4	Media Komunikasi Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Melalui Spanduk di Sekolah.....	104

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan, DKI Jakarta, Tahun 2009.....	9
Grafik 1.2	Perkembangan Komposisi Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Periode 2009-2010.....	11
Grafik 3.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta tahun 2006-2011.	62
Grafik 3.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purwakarta tahun 2004-2011.....	64
Grafik 3.3	Indeks Daya Beli Masyarakat Kabupaten Purwakarta tahun 2004-2011.....	65
Grafik 3.4	Tingkat Kesempatan Kerja dan Pencari Kerja di Kabupaten Purwakarta tahun 2006-2011.....	66

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman In-Depth Interview

Lampiran 2 Transkrip Wawancara Informan Penelitian

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari kampus UI

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan sebagai upaya mengejar ketertinggalan dan menciptakan kehidupan yang sejahtera sesuai dengan martabat kemanusiaan telah dijalankan oleh negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Pembangunan sosial merupakan paradigma dari pembangunan nasional. Menurut Midgley (2005), definisi pembangunan sosial adalah suatu proses perubahan sosial yang terencana yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh, dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. (h. 37). Mengapa direncanakan? Hal ini karena diinginkan adanya perubahan manusia dan kesejahteraan.

Titik penting pembangunan sosial adalah mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti masalah kemiskinan dan keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu dan berkesinambungan. (Prayitno, 2009, h. 15). Upaya pemenuhan kesejahteraan sosial menyeruak menjadi isu nasional. Asumsinya, kemajuan bangsa ataupun keberhasilan suatu pemerintahan, tidak lagi dilihat dari sekedar meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi. Kemampuan penanganan terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial pun menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Kemajuan pembangunan ekonomi tidak akan ada artinya jika kelompok rentan penyandang masalah sosial di atas, tidak dapat terlayani dengan baik. (Chamsyah, 2007, h. 1).

Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam luar biasa dan keunggulan komparatif lainnya yang begitu potensial, ketertinggalan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN seharusnya menyadarkan kita bahwa pastilah ada sesuatu yang salah dalam pendekatan pembangunan dan pengelolaan negara ini. Stiglitz (2003) dan Perkins (2004) sebagaimana yang dikutip oleh Husodo (2006) sangat jelas memberi bukti tentang

gagalnya pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, utang luar negeri dan ideologi neoliberalisme. Setelah dipraktekkan selama 30 tahun lebih di tanah air, pendekatan ini tidak mampu mengatasi kemiskinan. Cara ini ternyata hanya efektif menggelembungkan “ekonomi balon permen karet” (*bubble gum economic*) sambil menyuburkan konglomerasi rapuh, Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), ketimpangan dan ketidakadilan sosial maha hebat yang menghasilkan sekitar 25 persen orang kaya Indonesia yang melebihi rata-rata orang kaya Malaysia, bahkan diantaranya melahirkan orang-orang kaya kaliber jetset dunia dengan kekayaan trilyunan rupiah (Suharto, 2008, h. 86). Sebuah pembangunan yang terdistorsi, di mana pembangunan ekonomi tidak sejalan dengan pembangunan sosial (Midgley, 2005, h. 5).

Pembangunan sosial di Indonesia, hakekatnya merupakan upaya untuk merealisasikan cita-cita luhur kemerdekaan, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasca kemerdekaan, kegiatan pembangunan telah dilakukan oleh beberapa pemerintahan di Indonesia. Mulai dari Soekarno sampai presiden di era ini yakni Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. (Chamsyah, 2007, h. 1).

Namun demikian, harus diakui setelah beberapa kali pemerintahan berganti, taraf kesejahteraan rakyat Indonesia masih belum maksimal. Pemenuhan taraf kesejahteraan sosial perlu terus diupayakan mengingat sebagian besar rakyat Indonesia masih belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diinginkannya. (Chamsyah, 2007, h. 1).

Untuk itu pembangunan sosial terus dikembangkan bersama dengan pembangunan ekonomi. Pendekatan sosial harus diterapkan bersamaan dengan pendekatan ekonomi dalam strategi pembangunan yang merupakan dua sisi mata uang yang sama. Keduanya harus dirancang dan dilaksanakan secara seimbang, saling mengisi, saling melengkapi dan saling memperkuat. Sehingga upaya peningkatan kesejahteraan sosial di masyarakat bisa terwujud. Tidak ada dikotomi di antara keduanya. Tidak ada yang utama di antara keduanya. Pembangunan ekonomi jelas sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara, namun pembangunan ekonomi yang sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, tetap tidak akan mampu menjamin kesejahteraan sosial pada setiap masyarakat. Bahkan

pengalaman negara maju dan berkembang seringkali memperlihatkan jika prioritas hanya difokuskan pada kemajuan ekonomi memang dapat memperlihatkan angka pertumbuhan ekonomi. Namun sering pula gagal menciptakan pemerataan dan menimbulkan kesenjangan sosial. Akhirnya dapat menimbulkan masalah kemiskinan yang baru. Oleh karenanya penanganan masalah kemiskinan harus didekati dari berbagai sisi baik pembangunan ekonomi maupun kesejahteraan sosial (Chamsyah, 2007, h. 1).

Dalam pembangunan sosial, Indonesia jelas tidak sepenuhnya menganut negara kesejahteraan. Meskipun Indonesia menganut prinsip keadilan sosial (sila kelima Pancasila) dan secara eksplisit konstitusinya (pasal 27 dan 34 UUD 1945) mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan sosial, namun letak tanggung jawab pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial adalah tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Prinsip keadilan sosial di Indonesia terletak pada usaha secara bersama seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Sehingga tidak ada yang paling utama dalam pembangunan sosial. Pembangunan sosial adalah tanggung jawab pemerintah, juga masyarakat, dunia usaha dan komponen lainnya. Konsekuensinya harus terjadi saling sinergi dalam penanganan masalah sosial antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha bahkan khususnya perguruan tinggi sebagai pencetak kader bangsa (Chamsyah, 2007, h. 3).

Artinya, ketika pemerintah melakukan pembangunan sosial, maka peran-peran dari swasta dan sektor ketiga (masyarakat madani) terus ditumbuhkan. Sehingga, tidak terjadi dominasi pemerintah dalam penanganan pembangunan sosial. Masing-masing pihak terus menunjukkan kiprahnya. Bahkan, bisa melakukan sinergi untuk mempercepat proses pembangunan sosial. Jika swasta dan sektor lain mampu memberikan kontribusi pada negara, maka diharapkan akan dapat mengurangi beban pemerintah. Sehingga, pemerintah bisa mengalokasikannya untuk program strategis lainnya (Prayitno, 2009, h. 15).

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Indonesia, dengan adanya Undang-undang yang baru nomor 11 tahun 2009, pendekatannya bukan hanya pendekatan panti, tetapi pendekatan yang lebih luas lagi yaitu pendekatan melalui masyarakat. Undang-undang ini antara lain diperuntukkan untuk mendorong

masyarakat untuk bekerja keras, dan memperkenalkan konsep baru yaitu *workfare society* bukan sekedar *social society*. Semua orang didorong untuk bekerja keras untuk mencapai kesejahteraannya. Konsep ini merupakan gerakan dunia yang baru, dari *welfare society* menjadi *workfare society*. Dengan adanya program pemberdayaan yang telah tertuang dalam undang-undang yang baru tersebut, mereka atau saudara-saudara kita yang tertinggal diberi kesempatan untuk melakukan berbagai aktivitas yang tentunya dibantu oleh masyarakat sekitar dengan cara gotong royong, mereka didorong untuk bekerja keras dan meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Tingkat kepedulian sesama anak bangsa harus dibangun dan ditumbuhkan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang peduli sesamanya. Yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin (Prawiro, 2009, h. 65).

Konsepsi pembangunan paling tidak akan terkait dengan tiga hal, yaitu : *Pertama*, tujuan dari pembangunan, yang secara umum diarahkan sebagai pola gerak yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). *Kedua*, sasaran dari pembangunan, yaitu manusia beserta aktivitas-aktivitasnya. *Ketiga*, substansi/aspek dari pembangunan, yaitu meliputi pembangunan infrastruktur dan prasarana dasar, ekonomi, serta *socio-cultural*. Manusia sebagai sasaran dan pelaku pembangunan merupakan fokus dan lokus dari pembangunan. Manusia sebagai sasaran diartikan bahwa tujuan pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), sedangkan sebagai pelaku pembangunan adalah menempatkan faktor manusia sebagai elemen yang melaksanakan aktivitas demokratis-partisipatif dalam pembangunan, mulai dari identifikasi kebutuhan (*need assesment*), perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi/pengendalian (Mulyadi, 2010, para. 3).

Dalam upaya pemecahan masalah-masalah pembangunan, selain upaya pertumbuhan ekonomi maka diperlukan juga pembangunan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi mutlak diperlukan, tetapi hal ini harus dilakukan secara serasi dengan pembangunan sosial yang fokusnya kepada manusia dan peningkatan kualitas kehidupannya. Lebih lanjut Prayitno (2009) mengatakan upaya mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang

ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM Bangsa Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. (h. 15-16).

Pembangunan manusia telah menjadi tema utama dunia seiring dengan diterbitkannya Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*) pertama kali oleh PBB pada tahun 1990. Orientasi pembangunan bergeser dari pembangunan ekonomi yang fokus pada pertumbuhan pendapatan semata menjadi pembangunan berorientasi manusia. Manusia atau penduduk harus menikmati hasil-hasil pembangunan secara nyata. Pertanyaannya, apa itu pembangunan manusia? Menurut *United Nations Development Programme (UNDP)*, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan bagi penduduk, kebebasan untuk hidup lebih sehat, lebih berpendidikan, dan dapat menikmati standar hidup yang layak (Harmadi, 2011, para. 1).

Terkait dengan luas lingkup dari kesejahteraan masyarakat ataupun kesejahteraan sosial, Spicker (1995) menggambarkan sekurang-kurangnya ada lima aspek utama yang harus diperhatikan. Kelima aspek ini dikenal dengan istilah “*big five*” yaitu : kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial dan pekerjaan sosial. (Adi, 2008, h. 3-4). Berdasarkan hal ini maka penulis tertarik untuk mengambil salah satunya yaitu pendidikan sebagai bahan kajian karena aspek pendidikan terkait langsung dengan sumber daya manusia di mana manusia merupakan agen perubah (*agent of change*) dalam pembangunan.

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan sosial. Pendidikan juga merupakan salah satu modal dasar sekaligus menjadi kunci keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Pendidikan juga memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi yang berkualitas untuk kepentingan masa depan, sehingga manakala tingkat pendidikan dikatakan tinggi setidaknya menggambarkan pola pikir dan peradaban masyarakat di suatu daerah tersebut juga tentunya sudah baik.

Tingkat pendidikan juga merupakan salah satu hal yang menjadi tolok ukur kinerja pembangunan manusia atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan dua hal lainnya adalah kualitas kesehatan dan kondisi ekonomi

(pendapatan). Dalam pengukuran pembangunan manusia dalam bidang pendidikan, indikator yang digunakan adalah angka rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf.

Isu tentang perbaikan pendidikan di Indonesia telah mencuat ke permukaan sejak awal memasuki abad ke-21, tidak hanya dalam jalur pendidikan umum, tetapi semua jalur dan jenjang pendidikan, karena semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan merupakan unsur-unsur yang memberikan kontribusi terhadap rata-rata hasil pendidikan secara nasional. Dengan demikian, kelemahan proses dan hasil pendidikan akan mempengaruhi indeks keberhasilan pendidikan secara keseluruhan. (Rosada, 2004, h. 2).

Jika dibandingkan, saat ini, pendidikan di Indonesia tertinggal jauh di bawah negara-negara Asia lainnya, seperti Jepang, Singapura dan Malaysia. Bahkan jika dilihat dari indeks pembangunan sumber daya manusia, posisi Indonesia dari tahun ke tahun terus menurun. Padahal Indonesia kini sudah menjadi bagian dari masyarakat dunia yang sudah tidak bisa dihindari. Indonesia menjadi bagian dari kompetisi masyarakat dunia. Oleh sebab itu, penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif serta memiliki berbagai keunggulan komparatif lainnya menjadi sebuah keharusan yang mesti menjadi perhatian dalam pembangunan manusia di Indonesia (Rosada, 2004, h. 2).

Titik terlemah pembangunan manusia Indonesia ternyata berada di sektor pendidikan. Kinerja tertinggi bidang pendidikan di ASEAN diraih Malaysia, yang rata-rata penduduknya mampu menempuh pendidikan hingga SMP ke atas. Rata-rata lamanya bersekolah penduduk Indonesia di tahun 2010 hanya sekitar 5,7 tahun. Artinya, penduduk Indonesia secara rata-rata hanya 'hampir' lulus sekolah dasar (SD). Padahal, kita belum berbicara tentang kualitas pendidikan, baru sebatas kuantitas pendidikan. Tentunya, kualitas lulusan SD di kota mungkin jauh lebih baik ketimbang lulusan SD di daerah terpencil. Dengan anggaran pendidikan yang sudah mencapai 20% dari APBN 2011, seharusnya Indonesia dapat segera memperbaiki tingkat pendidikan penduduknya. Jika titik terlemah pencapaian pembangunan manusia ini bisa segera diperbaiki, seharusnya Indonesia mampu 'mendongkrak' capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)-nya serta mengalami

peningkatan peringkat secara signifikan setidaknya dalam 10 tahun mendatang (Harmadi, 2011, para. 9).

Lemahnya SDM hasil pendidikan juga mengakibatkan lambannya Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan sektor ekonomi yang merosot secara signifikan di tahun 1998. Di saat negara-negara ASEAN lainnya sudah pulih, Indonesia masih belum mampu melakukan *recovery* dengan baik. Priatmoko (2003), dengan mengutip pernyataan Schuta dan Solom (n.d.), menegaskan bahwa pendidikan merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM. Hal ini dapat dilihat pada negara Jepang, di mana kemajuan ekonomi yang didapatnya sekarang tak lepas dari peranan pendidikan. Sistem pendidikan Jepang yang baik telah menghasilkan manusia-manusia berkualitas sehingga walaupun hancur setelah mengalami kekalahan pada Perang Dunia II, mereka dapat cepat bangkit maju dan bahkan bersaing dengan negara yang mengalahkannya dalam perang, Negara Asia lainnya, seperti Korea Selatan, China, Hongkong, Taiwan dan Singapura juga memperlihatkan fenomena yang tidak jauh berbeda dari apa yang telah dilakukan oleh negeri matahari terbit ini, di mana kemajuan ekonomi yang mereka dapatkan adalah karena tingginya kualitas SDM-nya. Dengan kekayaan sumber daya alam yang relatif banyak, negara kita ternyata jauh tertinggal (Rosada, 2004, h. 2-3).

Pendidikan bagi kehidupan umat manusia menjadi suatu hal mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat, tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat berkembang sejalan dengan aspirasi/cita-cita untuk maju, sejahtera dan bahagia. Sejalan dengan dinamika tuntutan reformasi, pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan peluang bagi daerah (kabupaten dan kota) untuk menciptakan kemandirian dalam rangka membangun daerahnya dengan berpijak pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi dan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.

Titik sentral proses pembangunan pada saat ini terletak pada upaya, bagaimana suatu daerah mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul,

membangun sektor ekonomi masyarakat lokal yang kokoh (rentan terhadap krisis moneter dan ekonomi), serta bagaimana suatu daerah mampu menjaga keseimbangan alam dalam melaksanakan proses pembangunannya (Mulyadi, 2010, para. 6).

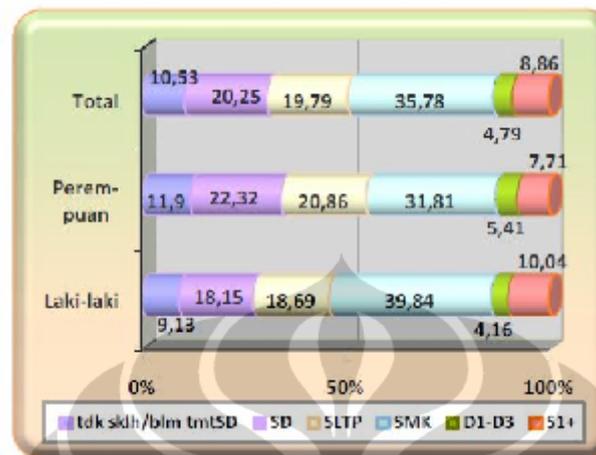
Di DKI Jakarta, Penduduk usia 10 tahun ke atas yang buta huruf pada Tahun 2009 sebanyak 1,00 persen. Artinya, 99 persen penduduk usia 10 tahun ke atas di DKI Jakarta sudah melek huruf. Angka ini lebih rendah dibandingkan kondisi Tahun 2007 dan 2008, dimana masing-masing sebesar 1,17 persen dan 1,20 persen. Jika dibandingkan dengan angka buta huruf secara nasional, DKI Jakarta menempati urutan kedua setelah Sulawesi Utara (0,85 persen), sementara angka nasional sebesar 6,62 persen. Capaian pembangunan di bidang pendidikan selama tahun 2007-2009 cukup menggembirakan. Hal ini ditunjukkan oleh Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang pendidikan SD (usia 7-12 tahun) sebesar 99,06 persen, di tingkat SLTP (usia 13–15 tahun) sebesar 90,75 persen, dan di tingkat SLTA (usia 16–18 tahun) sebesar 61,34. Sebagian besar penduduk DKI Jakarta tamat SMA (35,78 persen) sementara penduduk yang tamat perguruan tinggi (S1 keatas) sebesar 8,86 persen dengan total jumlah penduduk sebanyak 9.588,20 ribu jiwa. (BPS Provinsi DKI Jakarta, Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2010, h. 14-15). Hal ini terlihat sebagaimana pada tabel 1.1 dan grafik 1.1 berikut :

Tabel 1.1  
Indikator Pendidikan DKI Jakarta Tahun 2007-2009

Uraian	2007	2008	2009
<b>Angka Buta Huruf</b>			
Laki-laki	0,21	0,46	0,44
Perempuan	2,11	1,91	1,53
Total	1,17	1,20	1,00
<b>Rata-rata Lama Sekolah (tahun) usia 15+</b>			
Total	11,60	11,56	11,60
<b>Angka Partisipasi Sekolah (APS)</b>			
7-12	98,73	98,99	99,06
13-15	90,36	90,38	90,75
16-18	61,05	61,33	61,34

Sumber : Susenas 2007-2009, BPS Provinsi DKI Jakarta, Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010, h. 14-15

Grafik 1.1  
 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan, DKI Jakarta, Tahun 2009



Sumber : Susenas 2007-2009, BPS Provinsi DKI Jakarta, Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010, h. 15

Meskipun bidang pendidikan DKI Jakarta terlihat cukup menggembirakan, masih terdapat permasalahan yaitu untuk angka putus sekolah (*drop out*) di DKI Jakarta ternyata masih cukup tinggi. Pada tahun 2009/2010 jumlah siswa putus sekolah pada SD sebesar 507 orang, SLTP sebesar 1.592 orang, SMU sebesar 618 orang dan SMK sebesar 2.355 orang. (BPS Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Dalam Angka 2010, h. 122-125). Hal ini sebagaimana terlihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2  
 Jumlah Siswa Putus Sekolah DKI Jakarta Tahun 2009/2010

Tingkat Pendidikan	Jumlah Siswa Putus Sekolah
SD	507 orang
SMP	1.592 orang
SMU	618 orang
SMK	2.355 orang

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Dalam Angka 2010, h. 122-125.

Di Kota Bandung, Angka Melek Huruf pada tahun 2009 dan 2010 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 99,54 persen. Untuk angka Rata-rata Lama

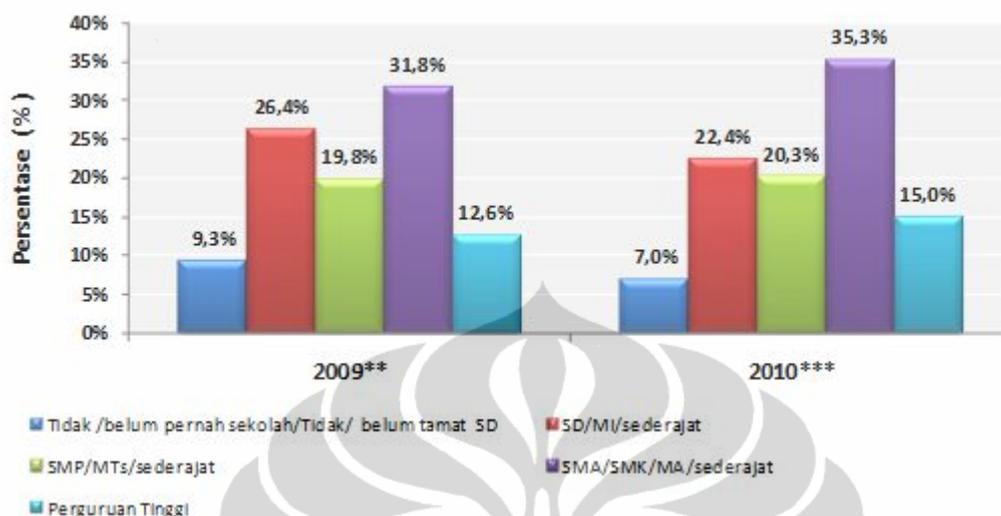
Sekolah pada tahun 2010 yaitu 10,68 tahun. Angka ini mengalami kenaikan 0,12 poin dari tahun sebelumnya 2009 yaitu 10,56 tahun. Selain itu, penduduk usia di atas 10 tahun yang memiliki ijazah tertinggi SMP/MTs/ sederajat, SMA/SMK/MA/ sederajat, dan Perguruan Tinggi mengalami kenaikan. Penduduk usia di atas 10 tahun yang memiliki ijazah tertinggi SMA/SMK/MA/ sederajat mengalami kenaikan dari 31,8% di tahun 2009 menjadi 35,3% pada tahun 2010. Kenaikan tingkat pendidikan yang cukup tinggi juga berada di tingkat perguruan tinggi. Dari komposisi sebesar 12,6% di tahun 2009, meningkat menjadi sebesar 15% pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam mengenyam pendidikan telah mengalami perkembangan, selain karena kebijakan pemerintah yang terus menggalakkan urusan wajib di bidang pendidikan. Pada tahun 2010, Indeks Pendidikan di Kota Bandung sebesar 90,09 poin menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan Indeks Pendidikan tahun 2009 sebesar 89,93 poin, yang berarti terdapat peningkatan kualitas pendidikan masyarakat sebesar 0,26 poin (0,29%). (LKPJ Walikota Bandung, 2010, h. 1-9, 1-15, 1-19). Hal ini sebagaimana terlihat pada tabel 1.3 dan grafik 1.2 berikut :

Tabel 1.3  
Indikator Bidang Pendidikan Kota Bandung Tahun 2010

Indikator	Satuan	2009**	2010***	Peningkatan/ Penurunan
Indeks Pendidikan	-	89,93	90,09	0,29%
Angka Melek Huruf (AMH)	Persen	99,54	99,54	0,00%
Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,56	10,68	1,14%

Sumber : BPS Kota Bandung tahun 2010, dalam LKPJ Walikota Bandung tahun 2010, h.1-9  
\*\*) Angka Sementara

Grafik 1.2  
Perkembangan Komposisi Penduduk Kota Bandung  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Periode 2009-2010



Sumber : LKPJ Walikota Bandung tahun 2010, h. 1-9

Telah banyak penelitian yang dilakukan sebelumnya atas kajian kebijakan pendidikan di beberapa lokasi yang berbeda. Diantaranya adalah sebagai berikut : Natakusumah (2006), melakukan penelitian dengan judul ‘Kebijakan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Pandeglang’ Studi Kasus Bebas Biaya Sekolah (BBS) Tahun 2005 dengan latar belakang Ilmu Politik. Dalam pembentukan kebijakan tersebut muncul konflik antara pihak yang pro dan kontra yang pada akhirnya terjadi konsensus politik berupa sebuah kompromi secara musyawarah melalui jalan dialogis secara intens antar pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian Nuruddin (2007) meneliti tentang ‘Efektivitas Kebijakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Banyuwangi’ dengan fokus pencapaian sasaran kebijakan yang akan dicapai dan telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya Aini (2010) melakukan penelitian tentang ‘Peran Dinas Pendidikan Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Metro’ dengan latar belakang Ilmu Administrasi yang mengupas tentang tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh dinas pendidikan dan peran utamanya dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini, kebijakan pendidikan dipandang sebagai kebijakan sosial sehingga hal ini menjadi alasan untuk menelitinya lebih jauh.

Kemudian, alasan mengapa penelitian ini dilakukan di Kabupaten Purwakarta adalah karena Kabupaten Purwakarta merupakan daerah *peripheri* atau daerah penunjang dari dua kota, yaitu Jakarta dan Bandung, karena secara geografis letaknya tidak terlalu berjauhan. Purwakarta diharapkan dapat tumbuh menjadi kabupaten yang maju serta dapat mengimbangi pembangunan yang pesat di dua kota tersebut, diantaranya dapat diwujudkan dengan pelayanan publik yang memadai (pelayanan dasar masyarakat), salah satunya dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan data dari Bappeda Kabupaten Purwakarta, diperoleh informasi mengenai beberapa isu dan masalah sosial yang berkembang di Kabupaten Purwakarta saat ini. Namun karena adanya berbagai keterbatasan maka dari sejumlah isu dan masalah sosial yang ada, dipilih salah satu isu dan masalah sosial untuk dijadikan bahan kajian. Adapun isu dan masalah sosial tersebut adalah Rendahnya Tingkat Pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2008 sebesar 8,2, Angka Melek Huruf tahun 2008 sebesar 96 serta angka *drop out* (putus sekolah) tahun 2008 SD ke SMP sebesar 580 dan SMP ke SLTA 2190 (BPS Kabupaten Purwakarta, 2008). Berikut ini akan dipaparkan sesuai data yang penulis kutip dari Data Makro Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Purwakarta tahun 2009, yaitu :

- Rata-rata Lama Sekolah  
Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2008 hanya 8,2 tahun atau setingkat dengan kelas 2 SLTP. Sedangkan realisasi Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2009 adalah 7,08. Ada penurunan sebesar 1,12 poin dari tahun 2008 yang sebelumnya 8,20, serta tidak tercapainya angka rata-rata lama sekolah tersebut dengan proyeksi target yang diharapkan pada tahun 2009 yang seharusnya 8,45.
- Tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi/*drop out* (putus sekolah)  
Tidak semua peserta didik di Kabupaten Purwakarta dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Baik dari SD ke SMP ataupun dari SMP ke SMA/SMK. Pada tahun 2008 dapat dilihat jumlah peserta didik dari SD tidak melanjutkan ke SMP sebanyak 580 orang, hal ini mengalami

kenaikan dari tahun sebelumnya 2007 sebanyak 299 orang dan peserta didik dari SMP tidak melanjutkan ke SMA/SMK sebanyak 2.190 orang.

Pada tahun 2010, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, Asep (14), salah seorang remaja putus sekolah di Desa Rawasari Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, harus berhenti sekolahnya hanya sampai kelas 4 SD dan terpaksa bekerja di Lio (pabrik genteng) di desanya dengan upah Rp 12.000,-/hari. Sedangkan yang tidak melanjutkan pendidikannya serta tidak terserap sebagai tenaga kerja di pabrik-pabrik genteng (Lio) karena terbatasnya jumlah pekerjaan yang tersedia di Desa Rawasari Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta akhirnya menjadi pengangguran yang kerjanya hanya 'nongkrong' dan akibatnya bisa menimbulkan permasalahan sosial yang baru.

- Masyarakat melek huruf

Perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Purwakarta belum sepenuhnya optimal, hal ini dapat dilihat angka melek huruf di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2008 hanya sebesar 96. Sedangkan realisasi angka melek huruf pada tahun 2009 sebesar 96,34. Angka ini memang mengalami kenaikan pada tahun 2008 yang sebesar 96 tetapi angka tersebut kurang sesuai dengan proyeksi target 2009 yang diharapkan akan mencapai angka 96,40.

Hasil dari kajian terhadap isu dan masalah sosial tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang termuat dalam RPJP Daerah Tahun 2005 – 2025 dan RPJM Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 – 2013. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta dalam RPJP Daerah Tahun 2005 – 2025 adalah **“Purwakarta Cerdas, Sehat, Produktif dan Berakhlakul Karimah”**, dengan Misi :

- 1) Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat Purwakarta pada aspek pendidikan, kesehatan, agama, daya beli, ketersediaan infrastruktur, lingkungan hidup, ketertiban dan keamanan.

- 2) Meningkatkan kemandirian Purwakarta pada aspek prioritas pemanfaatan sumber daya lokal, peningkatan peran masyarakat dan tanggungjawab serta kepedulian sosial.
- 3) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Purwakarta pada aspek profesionalitas, akuntabilitas dan demokrasi.

Sedangkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam RPJM Daerah Tahun 2008 – 2013 adalah “**Purwakarta Berkarakter**“, dengan Misi :

- 1) Mengembangkan pembangunan berbasis religi dan kearifan lokal, yang berorientasi pada keunggulan pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, perdagangan dan jasa.
- 2) Mengembangkan infrastruktur wilayah yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal dan berorientasi pada semangat perubahan kompetisi global.
- 3) Meningkatkan keutuhan lingkungan baik *hulu* maupun *hilir*, fisik maupun sosial.
- 4) Mengembangkan struktur pemerintahan yang efektif, yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik, mengembangkan potensi kewirausahaan birokrasi yang berorientasi kemakmuran rakyat.

## 1.2. Rumusan Permasalahan

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu energi pembangunan dengan mengandalkan kekuatan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan manusia sudah merupakan isu utama saat ini yang menjadi perhatian di dunia. Terkait dengan isu serta masalah sosial yang terdapat di Kabupaten Purwakarta, terutama terkait dengan pembangunan manusia dalam bidang pendidikan, berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penelitian ini ingin mengetahui sebagai berikut :

- 1) Bagaimana kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan pendidikan di Kabupaten Purwakarta?
- 2) Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta?

- 3) Faktor-faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi pada kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan pendidikan di Kabupaten Purwakarta?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah yang dikemukakan tersebut di atas maka penulisan ini bertujuan untuk :

- 1) Memberikan gambaran atau mendeskripsikan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan pendidikan di Kabupaten Purwakarta.
- 2) Memberikan gambaran atau mendeskripsikan implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta.
- 3) Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pada kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan pendidikan di Kabupaten Purwakarta.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Akademis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bermanfaat bagi penelitian sejenis, serta diharapkan hasil penelitian ini bisa mengembangkan khasanah pengetahuan dan teori-teori yang ada pada bidang kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial.
- 2) Bagi peneliti, penelitian ini merupakan bagian dari implementasi teori-teori yang telah didapat selama kuliah di Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan rekomendasi dan rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta maupun pihak terkait lainnya dalam kegiatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

## 1.5. Metodologi Penelitian

### 1.5.1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui secara lebih detail dan mendalam mengenai kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan pendidikan di Kabupaten Purwakarta serta faktor-faktor pendukung dan penghambat di dalamnya, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipandang paling sesuai dengan tujuan penelitian ini. Dengan pendekatan kualitatif maka informasi yang diperoleh bisa lebih lengkap, mendalam dan dapat dipercaya.

Moleong (2006) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (h. 6).

Sementara Minichiello, dkk (1996) menyebutkan *qualitative research attempts to capture people's meanings, definitions and descriptions of events*. (penelitian kualitatif berusaha menangkap maksud, definisi dan deskripsi dari kejadian-kejadian yang di alami oleh orang-orang). (h. 9).

### 1.5.2. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Hal ini ditujukan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang dengan menyelidiki berbagai fenomena dengan memanfaatkan berbagai sumber penelitian. Hal ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif melalui serangkaian langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi data, pengolahan serta analisis data.

Lebih lanjut, Alston & Bowles (1998) mengatakan bahwa tujuan penelitian deskriptif adalah “...to find out more precise detail than exploratory research, the ‘what’ in social phenomena”. (“...untuk mengetahui lebih rinci dan

detail daripada penelitian eksplorasi mengenai ‘apa’ dalam fenomena sosial”). (h. 35).

Senada dengan hal tersebut, Neuman (2006) yang menjelaskan bahwa “*Descriptive research presents a picture of the specific details of a situation, social setting or relationship*”. (penelitian deskriptif menyajikan suatu gambaran secara spesifik terperinci dari sebuah situasi, keadaan sosial, ataupun hubungan-hubungan yang terdapat dalam penelitian). (h. 35)

### **1.5.3. Lokasi dan Jadwal Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kabupaten Purwakarta dipilih karena kabupaten ini merupakan daerah *peripheri* atau daerah penunjang dari dua ibukota provinsi - secara geografis letaknya tidak terlalu berjauhan dengan Kabupaten Purwakarta - Jawa Barat di Bandung dan DKI Jakarta di Jakarta, bahkan Jakarta merupakan ibukota negara Indonesia.

Karena alasan keterbatasan, maka tidak seluruh Kabupaten Purwakarta dijadikan lokasi penelitian. Untuk lokasi penelitian yang membutuhkan informasi dari masyarakat, dipilih dua tempat, Desa Rawasari di Kecamatan Plered dan Kelurahan Nagri Kaler di Kecamatan Purwakarta. Kedua tempat tersebut berbeda karakter wilayahnya, yang pertama merupakan wilayah pedesaan sedangkan yang kedua merupakan wilayah perkotaan. Diharapkan, dari pemilihan dua lokasi yang berbeda karakteristik wilayahnya, informasi yang didapat bisa memperkaya hasil penelitian ini. Kedua tempat tersebut dipilih berdasarkan informasi wawancara dari pihak Bappeda Kabupaten Purwakarta karena dianggap wilayah tersebut masuk dalam kategori miskin/banyak penduduk miskinnya.

Penelitian ini dilakukan pada kebijakan-kebijakan terkait peningkatan pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Untuk jadwal penelitian terkait wawancara mendalam dan pengamatan langsung dilakukan saat kegiatan turun lapangan pada Maret - Juni 2012. Sebelumnya telah dilakukan pengumpulan data-data dalam kegiatan pra-penelitian.

#### 1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Data kualitatif berbentuk deskriptif, yaitu berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati (Taylor & Bogdan, 1984, h. 5). Lebih lanjut Patton (2002) mengungkapkan data kualitatif dapat dipilah menjadi tiga jenis, yaitu :

- a) Hasil pembicaraan : kutipan langsung dari pernyataan orang-orang (verbal) tentang pengalaman, persepsi, opini, sikap, keyakinan dan pemikiran mereka dalam kesempatan wawancara mendalam.
- b) Hasil pengamatan : uraian rinci tentang situasi, kejadian, interaksi dan tingkah laku yang diamati di lapangan. Data berbentuk catatan lapangan.
- c) Bahan tertulis : petikan atau keseluruhan dokumen, surat-menyurat, rekaman dan kasus sejarah. (h. 4).

Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya yaitu :

##### a. Studi Pustaka/Literatur dan Dokumentasi

Kegiatan ini ditujukan untuk memperoleh kerangka pemikiran dan untuk menganalisis data dengan cara membaca dan mempelajari literatur berupa buku, majalah, surat kabar, jurnal, artikel dan tulisan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang akan diteliti. Selain itu, dilakukan pula tinjauan terhadap dokumentasi terkait dengan topik penelitian yang akan diteliti yang diperoleh dari berbagai pihak terutama instansi pemerintah serta catatan kegiatan yang dilakukan oleh tim pelaksana yang berada pada wilayah lokasi penelitian.

##### b. Wawancara

Untuk memperoleh data-data primer, dalam kegiatan penelitian ini akan digunakan teknik wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dengan pedoman wawancara semi terstruktur. Taylor & Bogdan (1984) mengatakan wawancara mendalam adalah *repeated face-to-face encounters between the researcher and informants directed toward understanding informants' perspective on their lives, experiences or situations as expressed in their own words* (kegiatan temu muka berulang antara peneliti dan informan, dalam rangka memahami pandangan mereka mengenai hidupnya, pengalamannya, ataupun situasi sosial

sebagaimana diungkapkan dalam bahasanya sendiri). (h. 77). Wawancara mendalam dilakukan melalui percakapan dua arah dalam suasana kesetaraan, akrab dan informal untuk menggali berbagai informasi yang ingin diketahui oleh peneliti terkait dengan topik yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada para informan untuk mengetahui respon dan pendapatnya mengenai masalah yang diteliti. Lebih lanjut pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dikembangkan sesuai dengan respon dan jawaban yang diberikan oleh informan.

#### c. Observasi/Pengamatan Langsung

Selain dengan teknik wawancara, dalam pengumpulan data primer dilakukan pula teknik observasi atau pengamatan langsung. Hal ini menjadi penting karena terkadang dalam teknik wawancara menghasilkan data yang kurang akurat. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mencatat perilaku serta kejadian yang sebenarnya terkait dengan objek penelitian yang dimaksud. Ada kalanya teknik ini dilakukan seiringan dengan teknik wawancara ketika peneliti telah melakukan kegiatan penelitian di lapangan.

Selain itu, dilakukan pula pengambilan foto. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkaya data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, dengan adanya visualisasi melalui rekaman foto diharapkan dapat diperoleh informasi lebih banyak dan variatif terkait dengan penelitian ini.

Moleong (2006) mengungkapkan alasan penggunaan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, yaitu :

- a) Pengamatan memungkinkan peneliti melihat, merasakan dan memaknai dunia beserta ragam peristiwa dan gejala sosial di dalamnya, sebagaimana informan melihat, merasakan dan memaknainya.
- b) Pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan secara bersama-sama antara peneliti dengan informan penelitiannya. (h. 174)

Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan adalah mengamati kondisi masyarakat terkait dengan kegiatan pendidikan serta aktivitas lainnya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, dilakukan juga pengamatan tentang infrastruktur. Misalnya, akses jalan dari dan menuju lokasi penelitian, sarana dan prasarana penunjang pendidikan seperti gedung sekolah dan lainnya.

### 1.5.5. Teknik Pemilihan Informan

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian maka perlu ditentukan informan penelitian sebagai sumber data primer dalam penelitian kualitatif. Informan penelitian adalah orang-orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi informan kunci dan informan biasa. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki beberapa informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan informan biasa adalah informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan mengetahui dan berhubungan dengan permasalahan.

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling cenderung *purposive* atau *snowballing* sampai jenuh, kerepresentatifan sampel bukan merupakan perhatian utama dalam penelitian kualitatif. Sampel ini tidak mewakili populasi dengan dikaitkan pada generalisasi, tetapi lebih mewakili informasi untuk memperoleh kedalaman studi dalam konteksnya. Peneliti memilih informasi yang dipandang paling mengetahui masalah yang dikaji (Zuriah, 2006, h. 95).

Oleh karena itu, dalam menentukan informan penelitian ini, digunakan dua teknik yaitu dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan juga menggunakan teknik *snowball sampling*.

Neuman (2006) menjelaskan *purposive sampling* sebagai : *a non-random sample in which the researcher uses a wide range of methods to locate all possible cases of highly specific and difficult-to-reach population* (sampel bukan secara acak di mana peneliti menggunakan berbagai metode untuk mencari semua kemungkinan kasus yang sangat spesifik dan populasi yang sulit dijangkau) (h. 222). Informan dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, didasarkan dengan tujuan penelitian. Informan yang dipilih merupakan informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki beberapa informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini mereka yang terkait secara langsung dengan proses perumusan (pembuatan) dan atau pelaksanaan dari kebijakan bidang pendidikan di Kabupaten Purwakarta.

Sementara *snowball sampling* menurut Neuman (2006) adalah *a non-random sample in which the researcher begin with one case, and then based on information about interrelationship from that case, identifies other cases, and repeat the process again and again* (sampel bukan secara acak di mana peneliti mulai dengan satu kasus, dan kemudian berdasarkan informasi tentang keterkaitan dari kasus tersebut, mengidentifikasi kasus-kasus lain, dan prosesnya dilakukan secara berulang) (h. 223). Untuk informan yang dipilih adalah informan biasa di mana mereka dipilih berdasarkan informasi sebelumnya yang diperoleh dari informan kunci, karena informan tersebut dianggap berhubungan dengan permasalahan penelitian. Mereka merupakan informan pendukung sebagai bagian dari teknik triangulasi data untuk mengurangi *bias* data yang mungkin terjadi.

Adapun informan dari penelitian ini terdiri dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta selaku pembuat dan atau pelaksana kebijakan bidang pendidikan meliputi lembaga eksekutif (kepala daerah, Bappeda, Dinas Pendidikan) dan lembaga legislatif (komisi yang menangani bidang pendidikan di DPRD Kabupaten Purwakarta), untuk informan ini digunakan teknik *purposive sampling*; serta masyarakat yang terkait langsung dengan kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, untuk informan ini digunakan teknik *snowball sampling*. Terkait dengan informan dari masyarakat, pada awalnya informasi lokasi yang akan diteliti diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Bappeda Kabupaten Purwakarta karena dianggap wilayah tersebut masuk dalam kategori miskin. Adapun wilayahnya yaitu Desa Rawasari di Kecamatan Plered dan Kelurahan Nagri Kaler di Kecamatan Purwakarta. Kedua tempat tersebut berbeda karakter wilayahnya, yang pertama merupakan wilayah pedesaan sedangkan yang kedua merupakan wilayah perkotaan. Informan dari masyarakat yang akan diwawancarai pertama kali adalah tokoh masyarakat dari masing-masing wilayah tersebut, kemudian akan dilanjutkan berdasarkan informasi yang diperoleh dari mereka, dan seterusnya. Wawancara akan dihentikan ketika peneliti sudah merasakan cukup mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian ini.

Untuk lebih memudahkan dalam penelitian, maka kerangka sampling disusun sebagai berikut :

Tabel 1.4  
Kerangka Sampling

No	Informasi yang ingin diperoleh	Informan	Jumlah
1	Deskripsi Kebijakan Pendidikan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Pemerintah Kabupaten Purwakarta : - Bupati Purwakarta : 1 orang - Kepala Bappeda : 1 orang - Dinas Pendidikan : 2 orang	4 orang
	Kebijakan/program yang telah dibuat pemerintah daerah dalam bidang pendidikan		
	Informasi pelaksanaan kebijakan/program dalam bidang pendidikan		
	Informasi evaluasi kebijakan/program dalam bidang pendidikan, perbandingan antara hasil dengan apa yang diharapkan, rekomendasi lanjutan dari hasil evaluasi		
	Keterlibatan DPRD dalam setiap tahapan proses kebijakan pendidikan (perencanaan, perumusan, pelaksanaan dan evaluasi)		
	Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses kebijakan pendidikan (perencanaan, perumusan, pelaksanaan dan evaluasi)		
2	Identifikasi faktor pendukung dan penghambat Kebijakan Pendidikan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Faktor Pendukung Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta Faktor Penghambat Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta	

(Sambungan)

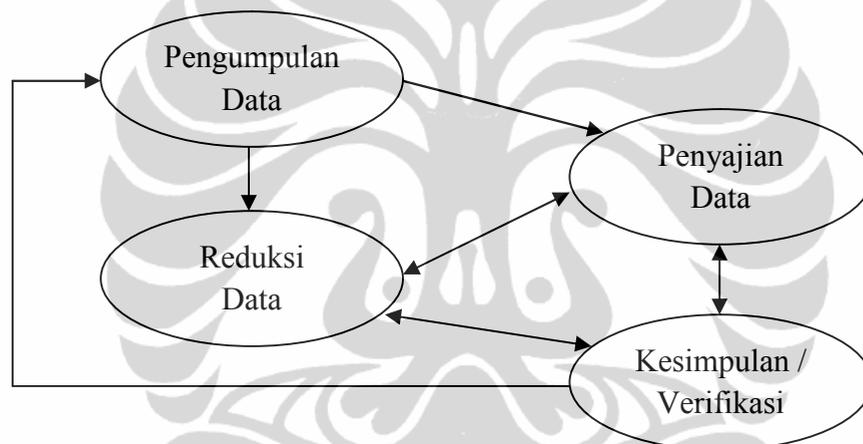
3	Deskripsi Fungsi dan Peran DPRD dalam Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta	Hubungan koordinasi antara lembaga eksekutif dan legislatif	DPRD Kabupaten Purwakarta Cq. Komisi 4 Bidang Pendidikan : 1 orang	1 orang
		Keterlibatan DPRD dalam setiap tahapan proses kebijakan pendidikan (perencanaan, perumusan, pelaksanaan dan evaluasi)		
		Cara penjangkaran aspirasi masyarakat terkait bidang pendidikan		
4	Identifikasi faktor pendukung dan penghambat Kebijakan Pendidikan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Faktor Pendukung Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta		
		Faktor Penghambat Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta		
5	Deskripsi pandangan masyarakat terhadap kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan pendidikan	Tokoh Masyarakat : - Desa Rawasari Kecamatan Plered : 4 orang - Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta : 4 orang	8 orang
		Respon masyarakat terhadap kebijakan pendidikan tersebut		
		Respon masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan di lapangan		
		Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses kebijakan pendidikan (perencanaan, perumusan, pelaksanaan dan evaluasi)		
		Bagaimana mekanisme masyarakat dalam menyampaikan aspirasi		
6	Identifikasi faktor pendukung dan penghambat Kebijakan Pendidikan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Faktor Pendukung Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta		
		Faktor Penghambat Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta		
Total Informan				13 orang

Sumber : telah diolah kembali

### 1.5.6. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maksud dan maknanya, lalu dihubungkan dengan masalah penelitian. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk narasi dan kutipan wawancara langsung (Moleong, 2006, h. 103).

Dalam penelitian ini analisa data yang digunakan adalah tahapan yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (1987) yang terdiri dari : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. (h. 21). Lebih jelasnya seperti yang terlihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1. Analisa Data Interaktif  
Sumber : Miles & Huberman (1987, h. 23)

#### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama proses penelitian, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dalam kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi dan pendekatan pengumpulan data yang peneliti pilih. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian serta untuk penarikan kesimpulan sementara. (Miles & Huberman, 1987, h. 21).

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif meliputi : teks naratif berupa catatan-catatan di lapangan; matriks, grafik, jaringan dan bagan. Bentuk ini menggabungkan informasi yang telah tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu dan mudah diakses, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali. Penyajian data dimaksudkan agar lebih mudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. (Miles & Huberman, 1987, h. 21-22).

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Pada penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian sedang berlangsung. Sejak mulai memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis serta mencari makna dari data yang dikumpulkan, lebih jauh lagi peneliti berusaha mencari pola tema, penjelasan, konfigurasi, hubungan persamaan dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. (Miles & Huberman, 1987, h. 22).

Untuk memperkecil *bias* atau kesalahan yang mungkin terjadi berkaitan dengan penentuan informan dan teknik wawancara, serta untuk meningkatkan kualitas data dalam penelitian, maka digunakan teknik triangulasi. Hal ini diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Oleh karenanya diperlukan kegiatan *check*, *re-check* dan *cross-check* terhadap data yang diperoleh. Triangulasi merupakan kombinasi dari beragam sumber data, peneliti, teori dan metodologi dalam suatu penelitian atas gejala sosial yang terjadi. Lebih lanjut, Mikkelsen (2003) mengatakan bahwa dimungkinkan untuk mencapai triangulasi dalam strategi penelitian kualitatif dengan mengkombinasikan berbagai jenis metode kualitatif, mengkombinasikan untuk tujuan tertentu dan memasukkan multi-perspektif. (h. 291).

## 1.6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini akan ditulis dalam beberapa bab, yang terdiri dari :

### BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi paparan latar belakang penelitian dengan memilih topik penelitian yang akan diteliti termasuk *research gap* di dalamnya, kemudian rumusan permasalahan yang dihadapi, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian yang berisi pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi dan jadwal penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pemilihan informan serta teknik analisa data.

### BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Berisi penyajian konsep-konsep yang terkait dengan topik penelitian yang akan diteliti, diantaranya yaitu : pembangunan sosial, kualitas hidup, pengertian dan tujuan pendidikan, kebijakan sosial dan perencanaan sosial.

### BAB 3 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Menggambarkan wilayah penelitian yaitu Kabupaten Purwakarta sebagai lokasi penelitian yang terdiri dari gambaran umum wilayah dan demografi serta gambaran Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta dan Desa Rawasari Kecamatan Plered yang ada di Kabupaten Purwakarta sebagai lokasi penelitian.

### BAB 4 HASIL TEMUAN LAPANGAN

Pada bab ini akan dipaparkan deskripsi tentang hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan.

### BAB 5 ANALISA

Bab ini berisi analisa hasil penelitian (Bab IV) kemudian dikaitkan dengan konsep-konsep teori pada Bab II.

### BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berisi jawaban dari pertanyaan penelitian, dan saran/rekomendasi yang coba dikemukakan oleh penulis sebagai alternatif pemecahan masalah terhadap berbagai aspek dan kendala yang ditemui di lapangan berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan pendidikan.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pembangunan Sosial

Definisi pembangunan sosial menurut Midgley (2005), adalah suatu proses perubahan sosial yang terencana yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh, dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. (h. 37). Mengapa direncanakan? Hal ini karena diinginkan adanya perubahan manusia dan kesejahteraan.

Lebih lanjut Midgley (2005) mengajukan ada delapan aspek yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu :

- 1) Proses pembangunan sosial sangat terkait dengan pembangunan ekonomi. Aspek ini yang membuat pembangunan sosial berbeda ketika dibandingkan dengan pendekatan lain dalam mengangkat kesejahteraan orang banyak. Pembangunan sosial mencoba untuk mengaplikasikan kebijakan-kebijakan dan program-program sosial untuk mengangkat kesejahteraan sosial, pembangunan sosial melakukannya dengan konteks proses pembangunan.
- 2) Pembangunan sosial mempunyai fokus berbagai macam disiplin ilmu (interdisipliner) berdasarkan berbagai ilmu sosial yang berbeda. Pembangunan sosial secara khusus terinspirasi dari politik dan ekonomi. Pembangunan sosial juga menyentuh nilai, kepercayaan dan ideologi secara eksplisit. Dengan isu-isu ideologis, pembangunan sosial diharapkan dapat lebih baik menciptakan intervensi dalam menganalisa dan menghadapi masalah sosial dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat.
- 3) Konsep pembangunan sosial lebih menekankan pada proses. Pembangunan sosial sebagai konsep dinamis memiliki ide-ide tentang pertumbuhan dan perubahan yang bersifat eksplisit dimana istilah pembangunan itu sendiri lebih berkonotasi pada semangat akan perubahan yang positif. Secara literal, pembangunan adalah satu proses pertumbuhan, perubahan, evolusi dan pergerakan. Pembangunan sosial memiliki tiga aspek, *pertama*, kondisi sosial awal yang akan diubah dengan pembangunan sosial, *kedua*, proses perubahan

itu sendiri, *ketiga*, keadaan akhir ketika tujuan-tujuan pembangunan sosial telah tercapai.

- 4) Proses perubahan yang progresif. Perubahan yang dilakukan berusaha untuk perbaikan bagi seluruh manusia. Ide-ide akan perbaikan dan peningkatan sosial sangat dibutuhkan dalam pembangunan sosial.
- 5) Proses pembangunan sosial bersifat intervensi. Proses pembangunan sosial lebih tertuju pada manusia yang dapat mengimplementasikan rencana dan strategi yang spesifik untuk mencapai tujuan pembangunan sosial.
- 6) Tujuan pembangunan sosial didukung dengan beberapa macam strategi, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan menghubungkan intervensi sosial dengan usaha pembangunan ekonomi. Pendekatan ideologi yang berbeda dapat diharmonisasikan.
- 7) Pembangunan sosial lebih terkait dengan rakyat secara menyeluruh serta ruang lingkungannya lebih bersifat inklusif atau universal. Pembangunan sosial fokus makronya menargetkan perhatian pada komunitas, daerah dan masyarakat. Pembangunan sosial lebih tertuju pada mereka yang terlantar karena pertumbuhan ekonomi atau tidak diikutsertakan dalam pembangunan (orang miskin dalam kota, penduduk desa yang miskin, etnis minoritas dan wanita). Pembangunan sosial fokusnya bersifat pembagian daerah (spasial) seperti dalam kota, masyarakat pedesaan, perkotaan, daerah-daerah atau negara.
- 8) Tujuan pembangunan sosial adalah mengangkat kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial di sini berkonotasi pada suatu kondisi sosial di mana masalah-masalah sosial diatur, kebutuhan sosial dipenuhi dan terciptanya kesempatan sosial. Bukan sekedar kegiatan amal ataupun bantuan publik yang diberikan oleh pemerintah. (h. 38-41).

Dari penjelasan tersebut di atas, terlihat bahwa pembangunan sosial menurut Midgley (2005) adalah pendekatan pembangunan yang secara eksplisit berusaha mengintegrasikan proses ekonomi dan sosial sebagai kesatuan dari proses pembangunan yang dinamis, membentuk dua sisi dari satu mata uang yang sama. Pembangunan sosial tidak akan terjadi tanpa adanya pembangunan ekonomi, begitu pula sebaliknya pembangunan ekonomi tidaklah berarti tanpa

diiringi dengan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh. (h. 34)

Orientasi pembangunan ekonomi perlu diikuti oleh pembangunan sosial, yang diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Paling tidak hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan sosial tersebut adalah (a) *social services*, (b) *social welfare services*, dan (c) *community development*. Meminjam asumsi Todaro (1989), ada tiga sasaran yang seyogyanya dicapai dalam pembangunan sosial, yaitu :

*Pertama*, meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan pokok.

*Kedua*, meningkatkan taraf hidup, yaitu selain meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan juga perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan, yang keseluruhannya akan memperbaiki bukan hanya kesejahteraan material tetapi juga menghasilkan rasa percaya diri sebagai individu ataupun sebagai suatu bangsa.

*Ketiga*, memperluas pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi setiap orang dan setiap bangsa dengan membebaskan mereka dari perbudakan dan ketergantungan bukan hanya dalam hubungan dengan orang dan negara lain tetapi juga terhadap kebodohan dan kesengsaraan manusia. Pembangunan, dengan demikian, harus dipahami sebagai suatu proses berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional. (Prayitno, 2009, h. 10-11).

Kemudian dalam kaitannya dengan strategi pembangunan sosial yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, Midgley (2005) mengemukakan ada tiga strategi besar, yaitu:

- 1) Pembangunan Sosial oleh Individu, di mana kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat diangkat ketika para individu berusaha untuk mengangkat kesejahteraan mereka masing-masing. Pendekatannya lebih mengarah pada pendekatan individualis dan pendekatan *enterprise* (usaha).
- 2) Pembangunan Sosial oleh Masyarakat, di mana masyarakat saling bekerja sama secara harmonis serta memiliki tujuan yang sama untuk memenuhi kebutuhan mereka, memecahkan permasalahan mereka dan berusaha

menciptakan kesempatan guna memperbaiki hidup. Pendekatannya lebih dikenal dengan nama pendekatan kemasyarakatan.

- 3) Pembangunan Sosial oleh Pemerintah, di mana pembangunan sosial dilakukan oleh pemerintah, dengan agen-agennya yang khusus, pembuatan kebijakan, para perencana dan administraturnya. Negara mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan memiliki tanggung jawab mengangkat kesejahteraan seluruh warganegaranya. Pendekatannya lebih dikenal dengan nama pendekatan *statist/negara*. (h. 149-201).

Berkaitan dengan kondisi Indonesia yang kompleks, ternyata tidak dapat dipilih satu dari tiga strategi tersebut, tetapi ketiga strategi tersebut perlu terus dilaksanakan. Artinya, ketika pemerintah melakukan pembangunan sosial, maka peran-peran dari swasta dan sektor ketiga (masyarakat madani) terus ditumbuhkan. Sehingga, tidak terjadi dominasi pemerintah dalam penanganan pembangunan sosial. Masing-masing pihak terus menunjukkan kiprahnya. Bahkan, bisa melakukan sinergi untuk mempercepat proses pembangunan sosial. Jika swasta dan sektor lain mampu memberikan kontribusi pada Negara, maka diharapkan akan dapat mengurangi beban pemerintah. Sehingga, pemerintah bisa mengalokasikannya untuk program strategis lainnya (Prayitno, 2009, h. 15).

## 2.2. Kualitas Hidup

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa pembangunan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (*people's well-being*). Midgley (2005) menyebutkan bahwa kondisi sejahtera (*well-being*) menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) yang berkonotasi pada suatu kondisi sosial di mana masalah-masalah sosial diatur, kebutuhan sosial dipenuhi dan terciptanya kesempatan sosial. (h. 21). Bukan sekedar kegiatan amal ataupun bantuan publik yang diberikan oleh pemerintah (h. 19).

Pakar ilmu sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai tinggi rendahnya tingkat hidup pada suatu masyarakat. Oleh karenanya kemudian diciptakan suatu metode untuk dapat mengetahui indikator kesejahteraan sosial, diantaranya adalah indeks kualitas hidup secara fisik atau *PQLI (Physical Quality of Life Index)* yang diperkenalkan oleh D.M. Morris (1979), kemudian indeks

kemajuan sosial (*The Index of Social Progress*) yang diciptakan oleh Richard Estes (1985) dan yang terbaru adalah indeks pembangunan manusia (*Human Development Index*) yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* pada tahun 1990 (Midgley, 2005, h. 20). Model terakhir inilah yang menjadi populer di berbagai negara termasuk di Indonesia sebagai suatu *tools* untuk mengukur pembangunan manusia.

Di sisi lain, tidak mudah untuk mendefinisikan kualitas hidup secara tepat. Pengertian mengenai kualitas hidup telah banyak dikemukakan oleh para ahli, namun semua pengertian tersebut tergantung dari siapa yang membuatnya.

Setiap individu memiliki kualitas hidup yang berbeda tergantung dari masing-masing individu dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dalam dirinya. Jika menghadapinya dengan positif maka akan baik pula kualitas hidupnya, tetapi lain halnya jika menghadapinya dengan negatif maka akan buruk pula kualitas hidupnya.

Stiglitz, Sen & Fitoussi (2011) menyebutkan bahwa kualitas hidup adalah konsep yang lebih luas daripada produksi ekonomi dan standar hidup. Kualitas hidup mencakup sekumpulan penuh faktor-faktor yang mempengaruhi apa yang kita hargai dalam hidup ini, melampaui sisi materialnya. (h. 68).

Kualitas hidup adalah penilaian individu terhadap posisi mereka di dalam kehidupan, dalam konteks budaya dan sistem nilai di mana mereka hidup dalam kaitannya dengan tujuan individu, harapan, standar serta apa yang menjadi perhatian individu. (Larasati, n.d.)

Stiglitz, Sen & Fitoussi (2011) mengajukan ada tiga pendekatan konseptual untuk mengukur kualitas hidup, yaitu :

- Pendekatan pertama, yang dikembangkan erat dengan riset psikologis, dipijakkan pada gagasan tentang *kesejahteraan subjektif*. Pendekatan ini terkait erat dengan tradisi utilitarian, yang menyatakan bahwa mengupayakan manusia untuk ‘bahagia’ dan ‘puas’ dengan hidup mereka merupakan tujuan universal eksistensi manusia.
- Pendekatan kedua berakar pada gagasan tentang *kapabilitas*. Pendekatan ini melihat hidup seseorang sebagai kombinasi antara berbagai ‘kegiatan dan kedirian’ (*functionings*) dan kebebasannya untuk memilih di antara fungsi-

fungsi tersebut (*capabilities*). Dasar pendekatan kapabilitas ini memiliki akar kuat pada ide filosofis mengenai keadilan sosial, mencerminkan fokus pada tujuan manusia dan menghargai kemampuan individu untuk mengejar dan merealisasikan tujuan yang dia yakini, serta memainkan peran prinsip-prinsip etis dalam merancang masyarakat yang ‘baik’.

- Pendekatan ketiga, yang dikembangkan dalam tradisi ilmu ekonomi, didasarkan pada gagasan tentang *alokasi yang adil*. Dasar pemikirannya, banyak ditemui dalam ilmu ekonomi kesejahteraan, adalah menimbang berbagai dimensi non-moneter kualitas hidup (melampaui barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar) dengan suatu cara yang menghargai preferensi seseorang. (h. 70-71).

Kemudian Stiglitz, Sen & Fitoussi (2011) menyebutkan ada beberapa bidang yang terkait dengan kualitas hidup, diantaranya yaitu : kesehatan, pendidikan, aktivitas personal, hak suara politik dan tata kelola pemerintahan, koneksi sosial, kondisi lingkungan, serta ketidakamanan pribadi. Karena penelitian ini terkait dengan pendidikan maka penulis hanya akan membahas pendidikan. (h. 77-98).

Lebih lanjut terkait pendidikan, Stiglitz, Sen & Fitoussi (2011) mengatakan bahwa pendidikan penting bagi kualitas hidup, terlepas dampaknya pada pendapatan dan produktivitas masyarakat, dimana masyarakat yang lebih terdidik pada umumnya memiliki status kesehatan yang lebih baik, pengangguran yang lebih sedikit, koneksi sosial yang lebih banyak, dan keterlibatan yang lebih besar dalam kehidupan sipil dan politik (h. 80-81).

Indikator pendidikan yang tersedia sekarang meliputi beragam bidang. Beberapa mengacu pada *input* (tingkat pendaftaran sekolah, anggaran pendidikan, dan sumber daya sekolah), sementara yang lain mengacu pada *throughput* dan *output* (tingkat kelulusan, lamanya tahun bersekolah, pengukuran berbasis tes standar atas tingkat melek huruf dan melek angka). Mana di antara indikator-indikator ini yang yang lebih relevan bergantung pada taraf pembangunan suatu negara dan pada tujuan proses evaluasi itu sendiri (h. 81).

Sebagian indikator yang paling relevan untuk mengkaji dampak pendidikan terhadap kualitas hidup adalah ukuran kompetensi seseorang, yang mengukur pendidikan dan *outcome* lain yang penting bagi kualitas hidup di tingkat individu (h. 82).

## **2.3. Pendidikan**

### **2.3.1. Pengertian Pendidikan**

Pembangunan sosial bertujuan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang fokusnya kepada manusia. Upaya untuk mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM. Seperti dikatakan sebelumnya bahwa pendidikan penting bagi kualitas hidup. Aspek pendidikan terkait langsung dengan sumber daya manusia di mana manusia merupakan agen perubah (*agent of change*) dalam pembangunan. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan sosial.

Setiap bangsa memiliki nilai-nilai yang sangat menjunjung tinggi pendidikan bagi rakyatnya. Karena sejatinya pendidikan adalah bagian dari sendi pembangunan dan kesejahteraan yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan dan pendidikan memiliki nilai yang sangat erat demi mempertahankan kekokohan serta kejayaan setiap bangsa, bahkan pendidikan sangat mempengaruhi peradaban serta pola pergaulan antar bangsa. Semakin maju pendidikan suatu bangsa, maka akan semakin maju pula peradaban pembangunan maupun kesejahteraan bangsa tersebut.

Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan. Terdapat suatu kesan bahwa persepsi masyarakat umum tentang arti pembangunan lazimnya bersifat menjurus. Pembangunan semata-mata hanya memiliki ruang lingkup pembangunan material atau pembangunan fisik semata berupa gedung, jembatan, pabrik, dan lain-lain. Padahal sukses tidaknya pembangunan fisik itu justru sangat ditentukan oleh keberhasilan di dalam

pembangunan rohaniah atau spiritual, yang secara bulat diartikan pembangunan manusia, dan yang terakhir ini menjadi tugas utama pendidikan (Tirtarahardja dan Lasulo, 2005, h. 200).

Jadi pendidikan mengarah ke dalam diri manusia, sedang pembangunan mengarah ke luar yaitu ke lingkungan manusia. Jika pendidikan dan pembangunan dilihat sebagai suatu garis proses, maka keduanya merupakan suatu garis yang terletak kontinyu yang saling mengisi. Proses pendidikan pada satu garis menempatkan manusia sebagai titik awal, karena pendidikan memiliki tugas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan, yaitu pembangunan yang dapat memenuhi hajat hidup masyarakat luas serta mengangkat martabat manusia sebagai makhluk hidup. Bahwa hasil pendidikan itu menunjang pembangunan juga dapat dilihat korelasinya dengan peningkatan kondisi sosial ekonomi peserta didik yang mengalami pendidikan (Tirtarahardja dan Lasulo, 2005, h. 304).

Dalam pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan (Abidin, 2011, para. 22).

Istilah pendidikan adalah terjemahan dari bahasa Yunani, yaitu *paedagogie*. *Paedagogie* asal katanya adalah *pais* yang artinya ‘anak’ dan *again* yang terjemahannya adalah ‘membimbing’. Dengan demikian maka *paedagogie* berarti ‘bimbingan yang diberikan kepada anak’. Dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan berarti usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental (Sudirman N, et.al, 1989, h. 4).

Pendidikan ialah suatu ikhtiar manusiawi yang mencakup segala usaha dan perbuatan dari generasi tua untuk mengalihkan pengalamannya, pengetahuan, kecakapan, serta keterampilannya kepada generasi muda untuk memungkinkannya melakukan fungsi hidupnya dalam pergaulan sehari-hari (Getteng, 1997, h. 67).

Selanjutnya Purwanto (1988) mengatakan bahwa pendidikan ialah segala usaha orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin

perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. Atau lebih jelasnya, pendidikan adalah pimpinan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak, dalam pertumbuhannya (jasmani dan rohani) agar berguna bagi diri sendiri dan bagi masyarakat. (h. 11).

Pada hakikatnya pendidikan adalah suatu proses yang berlangsung secara kontinyu dan berkesinambungan dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dari tahap ke tahap kehidupannya sampai akhir hayatnya (Nisal, 2002, h. 32).

Driyarkara (n.d.) sebagaimana dikutip Dirjen Dikti (1993/1994) mengatakan bahwa pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia ke taraf insani itulah disebut mendidik. Pendidikan adalah pemanusiaan manusia muda (Fuad, 1997, h. 8-9).

Lebih lanjut menurut Fraire (n.d.) pendidikan adalah salah satu upaya untuk mengembalikan fungsi manusia menjadi manusia agar terhindar dari berbagai bentuk penindasan, kebodohan sampai kepada ketertinggalan. Bagi Fraire pula, oleh karena manusialah yang menjadi pusat pendidikan, maka manusia harus menjadikan pendidikan sebagai alat pembebasan untuk mengantarkan manusia menjadi makhluk yang bermartabat. (Yunus, 2004, h. 1)

Sedangkan menurut pendapat Ki Hajar Dewantara (n.d.) mengartikan bahwa Pendidikan adalah sebagai daya upaya untuk memberikan tuntutan kepada segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka baik sebagai masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang setinggi-tingginya. (Yusuf, 1982, h. 24).

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab I Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan bukan semata-mata berarti mengajar atau melatih. Melainkan mengandung makna yang lebih luas, menyangkut seluruh aspek kepribadian

manusia yang mengarah kepada tingkatan yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan pendidikan, manusia berusaha meningkatkan, mengembangkan, serta memperbaiki nilai-nilai, hati nurani, pengetahuan dan keterampilannya. Proses ini biasanya dilakukan sejak usia dini oleh orang tua atau orang yang lebih dewasa (Aini, 2010, h. 21).

Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka pendidikan dapat diartikan sebagai :

- a) Suatu proses pertumbuhan yang menyesuaikan dengan lingkungan
- b) Suatu pengarahan dan bimbingan yang diberikan kepada anak dalam masa pertumbuhan oleh orang dewasa.
- c) Suatu pembentukan kepribadian dan kemampuan anak menuju kedewasaan.
- d) Suatu usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suatu keadaan atau situasi tertentu pada taraf yang lebih baik yang dikehendaki oleh masyarakat.

Secara umum pendidikan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bagian menurut Coombs & Manzoor (1974), yaitu :

- 1) Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat, berjenjang dimulai dengan sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya; termasuk ke dalamnya kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus.
- 2) Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan termasuk di dalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga. Hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar, perpustakaan dan media massa.
- 3) Pendidikan non-formal adalah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan kegiatan penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya. (Sudjana, 2004, h. 22).

Proses transformasi ilmu dan pengetahuan terjadi pada sebuah lembaga formal yang disebut sekolah. Hal yang membedakan pendidikan di sekolah dengan pendidikan di luar sekolah yakni proses pendidikan berlangsung secara terencana, terarah, terukur dan berjenjang. Substansi pendidikan diatur dan dipedomani sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di sekolah lah terjadi interaksi antara peserta didik dan pendidik secara formal sebagai bagian kecil dari proses pendidikan yang diperoleh seseorang (Aini, 2010, h. 26-27).

### 2.3.2. Tujuan Pendidikan

Pendidikan di abad ke-21 memiliki tanggung jawab moral bukan lagi hanya kepada individu yang bersangkutan melainkan kepada masyarakat. Dampak positif dari pendidikan harus dapat dirasakan masyarakat. Melalui ilmu pengetahuan yang diusung oleh pendidikan, diharapkan mampu menunjang perkembangan ekonomi sehingga dapat membantu masyarakat membangun kehidupan yang lebih baik menuju kemakmuran (Aini, 2010, h. 23).

Tujuan pendidikan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Bab II Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Lebih lanjut tujuan pendidikan menurut UNESCO harus mengandung nilai-nilai sebagai berikut :

- a) Otonomi, yang berarti memberikan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan kepada individu maupun kelompok untuk dapat hidup mandiri dan hidup bersama dalam kehidupan yang lebih baik;
- b) *Equity* (keadilan), pendidikan harus memberi kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya dan kehidupan ekonomi dengan memberinya pendidikan dasar yang sama;

- c) *Survival*, pendidikan menjamin pewarisan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. (Salam, 1996, h. 11).

Sagala (2007) mengatakan bahwa Pendidikan memiliki tujuan yang dinamis. Sebagai hasil dari proses yang dipengaruhi oleh berbagai unsur di luar sistem seperti kebijakan skala makro, meso, dan mikro yang diimplementasikan dalam bentuk interaksi belajar mengajar. Tujuan yang ingin dicapai melalui interaksi belajar mengajar menuntut pengembangan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik secara terpadu. Mengingat pendidikan merupakan suatu proses yang tidak bisa terlepas dari pengaruh sistem yang ada, maka dibutuhkan penyusunan tujuan pendidikan secara bertingkat yaitu :

- a) Tujuan pendidikan yang hendak dicapai dalam pendidikan yang berskala nasional;
- b) Tujuan institusional yang hendak dicapai oleh suatu lembaga pendidikan atau satuan pendidikan tertentu;
- c) Tujuan bidang studi, mata pelajaran, dan suatu ajaran yang disusun berdasarkan tujuan institusional;
- d) Tujuan instruksional atau tujuan pengajaran yang hendak dicapai setelah selesai diselenggarakan suatu proses pembelajaran. Tujuan ini disusun berdasarkan tujuan kurikulum sesuai pokok bahasan dan subpokok bahasan yang dituangkan dalam alokasi waktu tertentu. (h. 7).

Tujuan pendidikan nasional akan dicapai setahap demi setahap dimulai dari tujuan yang paling teknis. Dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, sistem pendidikan dipercaya untuk mengolah *input* menjadi *output*. *Input* pendidikan itu sendiri akan dipengaruhi oleh sistem sosial budaya, ekonomi, hukum, politik dan sebagainya. Sistem-sistem tersebut juga akan mempengaruhi hasil pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Suatu sistem pendidikan terikat pada suatu sistem lingkungan. Oleh Karena itu, sistem pendidikan harus mengandung nilai lingkungan sebagai karakteristik budaya bangsa di mana tujuan pendidikan secara nasional akan diwujudkan (Aini, 2010, h. 26).

## 2.4. Kebijakan dan Perencanaan Sosial

### 2.4.1. Kebijakan Sosial

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (1997) menyebutkan bahwa kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan. Kebijakan dapat dibedakan sebagai kebijakan internal dan eksternal. Kebijakan internal yaitu kebijakan yang hanya memiliki kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri. Kebijakan eksternal yaitu kebijakan yang mengikat masyarakat (kebijakan publik). (h. 2).

Karena sifat kebijakan sosial yang mengikat masyarakat banyak, untuk merespon isu-isu pemecahan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat, maka dapat dikatakan juga bahwa kebijakan sosial merupakan kebijakan publik.

*Public policy is whatever government choose to do or not to do* (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan). (Dye, 1981, h. 1). Definisi ini mengandung makna bahwa *pertama*, kebijakan publik dibuat oleh pemerintah bukan organisasi swasta; *kedua*, kebijakan publik menyangkut pilihan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah; *ketiga*, kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau *status quo* merupakan sebuah kebijakan publik.

Coffey (2004) mengemukakan setidaknya ada tiga cara berbeda dalam mendefinisikan kebijakan sosial, yaitu :

*First, social policy has conventionally been used as a term to denote a set of policies and practices concerned with promoting social welfare and wellbeing. This definition has most usually been associated with the provision of social welfare through institutions of the State.*

*Second definition of social policy builds directly upon this initial understanding, and recognizes social policy as a distinctive field of study. The conventional study of social policy has been concerned with the Welfare State and its main social services (health, housing, education, social security and personal social services).*

*Third definition of social policy is in part encapsulated within this, and is concerned with social policy as a distinctive academic discipline – not only with a (re)defined subject matter and empirical agenda, but also with its own theoretical and conceptual frameworks.*

(Pertama, kebijakan sosial secara konvensional digunakan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kumpulan kebijakan dan prakteknya yang terkait pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan kondisi sejahtera. Definisi ini biasanya banyak dihubungkan dengan ketetapan kesejahteraan sosial melalui institusi negara.

Kedua, kebijakan sosial secara langsung dibangun melalui pemahaman awal, dan kebijakan sosial diakui sebagai kajian bidang tersendiri. Kajian konvensional dari kebijakan sosial terkait dengan negara kesejahteraan dan pelayanan sosial (kesehatan, perumahan, pendidikan, jaminan sosial dan pelayanan sosial personal).

Ketiga, kebijakan sosial sebagai bagian tidak terpisahkan, dan terkait dengan kebijakan sosial sebagai disiplin akademik tersendiri – tidak hanya mendefinisikan (kembali) pokok persoalan dan agenda empiris, tetapi juga dengan kerangka teori dan konsep). (h. 2-3).

Marshall (1965) mengatakan tentang kebijakan sosial seperti berikut :

*“Social policy” is not a technical term with an exact meaning... it is taken to refer to the policy of governments with regard to action having a direct impact on the welfare of citizens, by providing them with services or income. The central core consists, therefore, of social insurance, public (or national) assistance, the health and welfare services and housing policy. Education obviously belongs.. [as does] the treatment of crime.*

(“Kebijakan sosial” bukan merupakan istilah teknis dengan makna yang tepat... istilah ini merujuk pada kebijakan pemerintah berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara, dengan menyediakan pelayanan atau pendapatan. Intinya terdiri dari asuransi sosial, bantuan publik, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan dan kebijakan perumahan. Pendidikan mestinya sungguh-

sungguh.. [seperti halnya] perlakuan tindak kejahatan.) (Kahn, 1969, h. 21).

Senada dengan hal tersebut, Titmuss (1950) mendefinisikan kebijakan sosial terdiri dari :

*acts of government, undertaken for a variety of political reasons, to provide for a range of needs, material and social, and predominantly dependent needs, what the market does not or cannot satisfy for certain designated sections of the population.*

(tindakan-tindakan pemerintah, yang dilakukan untuk berbagai alasan politik, untuk menyediakan berbagai kebutuhan, material dan sosial, dan sebagian besar merupakan ketergantungan akan kebutuhan, dimana pasar tidak dapat memenuhi atau tidak dapat memuaskan beberapa hal yang diinginkan oleh masyarakat). (Kahn, 1969, h. 21).

Jamrozik (2011) menyebutkan kebijakan sosial merupakan *a mechanism for the allocation of a society's resources for the purpose of achieving certain outcomes that bring to fruition the society's dominant values and corresponding objectives and goals* (sebuah mekanisme dalam pengalokasian sumber daya masyarakat untuk menyatakan tujuan dari hasil tertentu yang membawa kepada nilai-nilai dominan dalam masyarakat dan sasaran serta tujuan yang terlaksana dengan baik) (h. 37). *Social policy will lie in its political and economic elements* (Kebijakan sosial bersandar pada unsur-unsur politik dan ekonomi) (h. 38).

Senada dengan hal tersebut Mkandawire (2004) menyebutkan bahwa “.. *social policy is a highly political process, touching upon power relations, access to resources and ideological predilections about the role of state and markets*” (kebijakan sosial merupakan sebuah proses politik, menyentuh hubungan kekuasaan, akses kepada sumber daya dan kegemaran ideologi tentang peran negara serta pasar). (h. 11).

Kemudian lebih jauh Gil (1976) mengatakan bahwa :

*social policy is concerned with regulation of social relationships for the purpose of affirming certain values and interests through the implementation of appropriate means designed to achieve corresponding*

*ends. It has been defined as the 'regulation of intra-societal relations and the shaping of the quality of life'*

(kebijakan sosial terkait dengan aturan hubungan sosial untuk menyatakan tujuan dari nilai-nilai tertentu dan kepentingan melalui implementasi cara-cara yang dirancang secara tepat untuk pencapaian tujuan secara bersama-sama. Kebijakan sosial didefinisikan sebagai 'aturan dari hubungan antar-masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup'). (Jamrozik, 2001, h. 38).

Martin Rein (1976, 1983) berargumentasi bahwa *social policy is concerned with the integration of values, the principles by which these values are translated into policies and programs* (kebijakan sosial terkait dengan integrasi dari nilai-nilai, prinsip di mana nilai-nilai tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program). (Jamrozik, 2001, h. 45).

Sementara Peter Spicker (1995) mendefinisikan kebijakan sosial sebagai *the study of social services and the welfare state. The field of study has grown over time, and it stretches rather more widely than might at first appear, but social services are where the subject began, and they are still at the core of what the subject is about* (kajian dari pelayanan sosial dan negara kesejahteraan. Bidang kajiannya sendiri telah berkembang selama beberapa waktu, dengan rentang cukup lama dari yang pertama kali muncul, di mana pelayanan sosial merupakan awal dimulainya permasalahan kebijakan sosial, dan tetap menjadi inti dari permasalahan kebijakan sosial tersebut). (Jamrozik, 2001, h. 45).

Dalam garis besar, Midgley (2000) mengatakan kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori, yakni perundang-undangan, program pelayanan sosial dan sistem perpajakan. Berdasarkan kategori ini maka dapat dinyatakan bahwa setiap perundang-undangan, hukum atau peraturan yang menyangkut masalah dan kehidupan sosial adalah wujud dari kebijakan sosial. Namun, tidak semua kebijakan sosial berbentuk perundang-undangan (Suharto, 2008, h. 11).

Dari berbagai definisi yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu dalam mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Kebijakan sosial juga terkait dengan elemen politik dan ekonomi. Secara garis besar kebijakan sosial diwujudkan

dalam tiga kategori, yakni perundang-undangan, program pelayanan sosial dan sistem perpajakan. Setiap perundang-undangan, hukum atau peraturan yang menyangkut masalah dan kehidupan sosial adalah wujud dari kebijakan sosial. Namun tidak semua kebijakan sosial berbentuk perundang-undangan. Hukum bisa dijadikan sebagai landasan konstitusional bagi kebijakan sosial.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu bentuk kebijakan sosial adalah pelayanan sosial yang terdiri dari kesehatan, perumahan, pendidikan, jaminan sosial dan pelayanan sosial personal.

Terkait pendidikan, UNICEF (1999) menyebutkan bahwa '*... education is the single most vital element in combating poverty, empowering women, promoting human rights and democracy, protecting the environment and controlling population growth*' (pendidikan merupakan elemen yang sangat penting dalam melawan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, mempromosikan hak asasi manusia dan demokrasi, melindungi lingkungan dan mengontrol pertumbuhan penduduk). (Hall & Midgley, 2004, h. 153).

Negara memiliki tiga kewajiban penting dalam bidang pendidikan. *Pertama*, sebagai penyedia utama lembaga pendidikan, seperti sekolah, akademi dan universitas. *Kedua*, sebagai regulator pendidikan, baik pendidikan negeri, swasta maupun lembaga non-formal. *Ketiga*, fasilitator dalam penyediaan infrastruktur pendidikan, termasuk penyedia skema beasiswa dan tunjangan pendidikan bagi siswa yang berprestasi dan tidak mampu. Oleh karenanya, pendidikan harus bersifat wajib terutama kepada anak-anak usia sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama (Suharto, 2008, h. 18).

Lebih lanjut, terkait dengan pendidikan, Hall & Midgley (2004) mengemukakan bahwa pendidikan merupakan sebuah elemen kunci dari kebijakan sosial yang terdiri dari dua dimensi utama, yaitu :

*Firstly, investment in formal education is a major vehicle for human resource development. Modern industrial, agricultural and commercial activities all require adequate supplies of properly educated and trained labour. An education signifies completing primary and secondary school and graduating from university as a passport to a modern sector job.*

*A second area of growing concern to education specialists thus relates to the design and implementation of educational policies and strategies which, whether inside or outside of the formal school system, address the immediate livelihood needs of traditional and rural populations. In addition to basic literacy and numeracy, productive and organizational skills in key fields such as agriculture, forestry, health training and environmental management.*

(*Pertama*, investasi dalam pendidikan formal merupakan kendaraan utama bagi pengembangan sumber daya manusia. Industri modern, pertanian dan kegiatan komersil membutuhkan pasokan yang memadai akan tenaga kerja yang terdidik dan terlatih secara baik. Pendidikan yang telah menyelesaikan lengkap sekolah dasar, sekolah menengah dan lulus dari universitas menjadi paspor bagi pekerjaan sektor modern.

*Kedua*, perkembangan perhatian ahli pendidikan yang terkait kepada desain dan implementasi kebijakan dan strategi pendidikan, baik di dalam maupun di luar sistem sekolah formal, berbicara tentang kebutuhan mendesak akan mata pencaharian masyarakat tradisional dan pedesaan. Tambahan akan melek huruf dan melek angka, kemampuan produktif dan mengorganisir dalam bidang-bidang kunci seperti pertanian, kehutanan, pelatihan kesehatan dan manajemen lingkungan). (h. 135).

Kemudian Murray Thomas (1983) menyebutkan bahwa :

*schooling serves as a powerful tool for nation-building and the legitimization of political rulers. The imposition of a national curriculum and development ideology together with a lingua franca has allowed central governments and political parties to consolidate their power. Clear cases such as Indonesia, Malaysia, Zambia, South Africa and Zimbabwe exist where education has been used as a nation-building mechanism.*

(sekolah sangat kuat digunakan sebagai alat untuk pembangunan-bangsa dan legitimasi para penguasa politik. Pembebanan kurikulum nasional dan pembangunan ideologi bersama-sama dengan *lingua franca* telah memungkinkan pemerintah pusat dan partai politik untuk mengkonsolidasi kekuatan mereka. Contohnya di Indonesia, Malaysia, Zambia, Afrika

Selatan dan Zimbabwe di mana pendidikan digunakan sebagai mekanisme pembangunan-bangsa). (Hall & Midgley, 2004, h. 146).

Senada dengan hal tersebut, ternyata pendidikan di Indonesia memang masih digunakan sebagai mekanisme pembangunan-bangsa, kurikulum Pendidikan Pancasila dan atau Pendidikan Kewarganegaraan merupakan contoh konkrit kurikulum yang ada pada sistem pendidikan di Indonesia.

#### 2.4.2. Tahapan Kebijakan Sosial

Menurut Jamrozik (2001), sebagai sebuah proses, kebijakan sosial terdiri dari empat tahapan yang berbeda meskipun saling terkait yaitu : perencanaan (*planning*), perumusan (*formulation*), pelaksanaan (*implementation*) dan evaluasi (*evaluation*). (h. 47).

Iatridis (1994) menyebutkan para perencana kebijakan sosial menggunakan berbagai teori serta pendekatan dan mengasumsikan berbagai peran pada masalah sosial yang berbeda-beda atau berbagai tipe praktek kebijakan sosial. Namun, umumnya para perencana melakukan tugas yang sama dalam dua langkah praktek kebijakan yaitu analisis kebijakan dan pelaksanaan perencanaan. (h. 42).

Selama tahap analisis kebijakan, perencana kebijakan mencoba untuk mendefinisikan masalah sosial, identifikasi berbagai isu kunci kebijakan, analisa sejarah berbagai isu kebijakan dan berusaha untuk menyelesaikan masalah, identifikasi pemain kunci dan lembaga pengambil keputusan, model proses pengambilan keputusan, mensintesis informasi dan membuat rekomendasi. Dalam tahapan ini termasuk di dalamnya adalah :

- Pengumpulan informasi tentang masalah sosial, kondisi sosial, atau peluang pembangunan.
- Menyusun kerangka referensi konseptual dan mendefinisikan sifat masalah dan isu-isu yang ada di dalamnya.
- Merancang metodologi.
- Memilih dan melaksanakan teknik analisis dari kajian yang mungkin akan menjadi faktor penyebab permasalahan sosial.

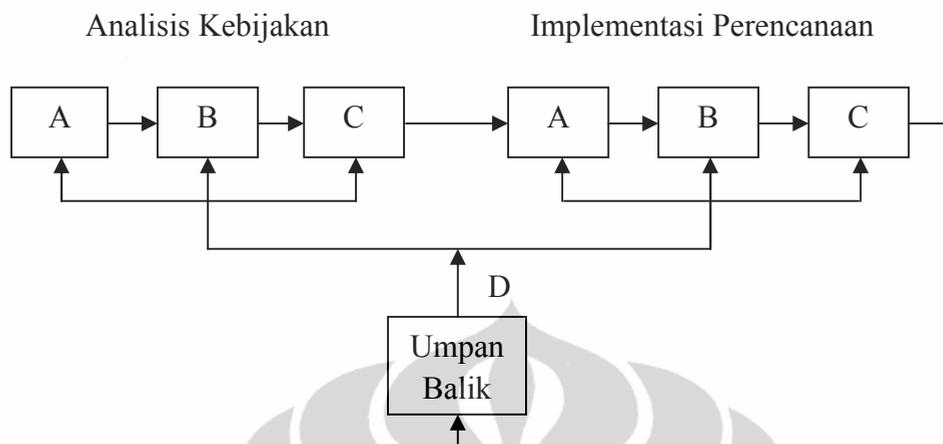
- Menarik kesimpulan, alasan argumentasi kebijakan, dan rencana-rencana; merekomendasikan intervensi jika memang diperlukan; memprediksi hasil (*outcomes*).
- Mengkomunikasikan rekomendasi kepada klien atau pihak-pihak terkait (pembuat kebijakan, kelompok-kelompok, organisasi, masyarakat, atau pengambil kebijakan). (Iatridis, 1994, h. 42).

Memahami lingkungan sosial-ekonomi dari permasalahan sosial dan klien merupakan suatu hal yang sangat penting dalam analisis kebijakan. Tipe tugas dalam analisis kebijakan dapat dikelompokkan ke dalam empat fase berikut : analisis masalah dan intervensi, perumusan dari tindakan yang berorientasi pada rekomendasi kebijakan, mengkomunikasikan rekomendasi tersebut kepada klien dan umpan balik (Iatridis, 1994, h. 43).

Jika rekomendasi untuk intervensi sudah disetujui, perencana kebijakan kemudian dapat merencanakan pelaksanaan. Selama tahap pelaksanaan perencanaan ini, perencana kebijakan berusaha mengorganisir pelaksanaan, melaksanakan dan memantau program, mengevaluasi hasil dan menyelaraskan tugasnya melalui mekanisme umpan balik. Dalam tahapan ini termasuk di dalamnya adalah :

- Merancang program untuk melaksanakan kebijakan yang telah direkomendasikan.
- Pengamanan dan pengorganisasian sumber daya manusia dan material.
- Mengkomunikasikan kepada organisasi yang bertanggung jawab terhadap program dan menjelaskan tujuan, jangkauan dan prosedur dari intervensi, termasuk penugasan peran kepada pelaku utama.
- Menyediakan petunjuk operasional untuk pelaksanaan dan evaluasi.
- Pengorganisasian dan pemantauan program dan pelaksanaan tugas-tugas.
- Evaluasi hasil intervensi dan membandingkan antara hasil dengan apa yang diharapkan.
- Menyesuaikan prosedur pelaksanaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan.
- Merekomendasikan kelanjutan atau tidaklanjutan intervensi untuk memastikan kelangsungan hidup dari perubahan yang dicapai. (Iatridis, 1994, h. 44).

Untuk lebih jelasnya proses tahapan dari kebijakan sosial dapat diperhatikan pada gambar berikut ini :



Gambar 2.1. Tahapan Proses Kebijakan Sosial

Phases of Policy Analysis (Fase Analisis Kebijakan)

A = *Analysis of Problem* (Analisis masalah)

B = *Formulation of Recommendation* (Perumusan rekomendasi)

C = *Communication of Recommendation to Client* (Mengkomunikasikan rekomendasi kepada klien)

Phases of Implementation Planning (Fase Implementasi Perencanaan)

A = *Organization of Implementation* (Pengorganisasian Implementasi)

B = *Implementation and Monitoring* (Implementasi dan pemantauan)

C = *Evaluation* (Evaluasi)

D = *Feedback* (UmpanBalik)

Sumber : Iatridis (1994, h. 46).

### 2.4.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, sebagaimana yang diungkapkan Lester dan Steward (2000) yaitu merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, suatu keluaran (*ouput*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). (Winarno, 2012, h. 147).

Menurut George C. Edwards III (1980) tentang model implementasi kebijakan, faktor-faktor yang mendukung sekaligus menghambat implementasi kebijakan yaitu :

1) Komunikasi

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*).

- a. Transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana nampaknya. Banyak sekali ditemukan keputusan-keputusan tersebut diabaikan atau jika tidak demikian, seringkali terjadi kesalahan-pahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan.

Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi. *Pertama*, pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. *Kedua*, informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi. *Ketiga*, persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

- b. Kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana-pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan, sehingga hal ini akan mendorong interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.

Edwards mengidentifikasi enam faktor pendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan, yaitu kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembentukan kebijakan pengadilan.

- c. Konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walau perintah yang disampaikan sudah jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Perintah yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan sehingga hal ini tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.

## 2) Sumber-sumber

Sumber-sumber yang akan mendukung kebijakan yang efektif terdiri dari staf yang mempunyai keterampilan yang memadai serta dengan jumlah yang cukup, kewenangan, informasi dan fasilitas.

- a. Staf. Ada satu hal yang harus diingat adalah bahwa jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh staf. Kekurangan staf yang terampil merupakan masalah utama dalam program-program baru yang membutuhkan keahlian, di samping juga jumlah personil yang mempunyai pengalaman sangat sedikit.
- b. Informasi. Seperti telah dibahas sebelumnya, para pelaksana perlu mengetahui bagaimana melaksanakan kebijakan-kebijakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari para pejabat atasan. Jika kebijakan-kebijakan bersifat inovatif dan sangat teknis, maka kesulitan terbesar yang dihadapi adalah mendapatkan seseorang yang mengetahui bagaimana melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dengan baik.

Karena kurangnya informasi, beberapa kebijakan tidak pernah dilaksanakan. Kebijakan-kebijakan lain dilaksanakan atas dasar ujicoba sejalan dengan pemahaman tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan secara perlahan-lahan menggunakan proses implementasi dan tanggapan-tanggapan dari mereka yang terlibat.

- c. Wewenang. Wewenang ada dalam banyak bentuk, dari memberi bantuan sampai memaksakan perilaku. Wewenang yang memadai seringkali langka

terutama dalam hal mengatur personil-personil lain. Kadang-kadang wewenang itu tidak ada bahkan di atas kertas sekalipun (wewenang formal). Pada saat yang lain, para pelaksana mempunyai wewenang formal, tetapi dibatasi penggunaannya. Beberapa faktor akan membatasi penggunaan wewenang seperti misalnya, tindakan yang memalukan karena harus menyandarkan pada tindakan-tindakan yang bersifat koersif, campur tangan anggota-anggota legislatif atau pejabat-pejabat daerah yang kuat, kritik dari pers, dan penyelamatan diri sendiri dengan menggunakan tindakan-tindakan seperti memberikan bantuan uang.

- d. Fasilitas. Fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil. Sebagai contoh, implementasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan berhasil, jika tidak dilengkapi dengan gedung sekolah yang memadai, buku-buku sebagai bahan pelajaran, kurangnya tenaga pendidikan dan lain sebagainya. Dengan demikian, fasilitas sangat penting diperlukan untuk implementasi kebijakan yang efektif. Akibat-akibat dari kekurangan fasilitas-fasilitas itu misalnya kekurangan buku-buku yang memadai di sekolah-sekolah serta laboratorium-laboratorium di bawah standar di universitas-universitas kecil kemungkinan akan menghasilkan kualitas lulusan-lulusan yang mutunya rendah.

### 3) Kecenderungan-kecenderungan

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

Kecenderungan-kecenderungan mungkin menghalangi implementasi bila para pelaksana benar-benar tidak sepakat dengan substansi suatu kebijakan. Kadang-kadang implementasi dihambat oleh keadaan-keadaan yang sangat kompleks, seperti bila para pelaksana menanggukkan pelaksanaan suatu kebijakan yang mereka setuju dalam rencananya untuk meningkatkan kemungkinan-kemungkinan mencapai tujuan kebijakan lain yang berbeda. Di samping itu, para pelaksana mungkin menghindari dampak sepenuhnya dari suatu kebijakan dengan memandang secara selektif persyaratan-persyaratan, mengabaikan paling tidak beberapa persyaratan yang bertentangan dengan pandangan-pandangan mereka.

#### 4) Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Mereka tidak hanya berada dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan di institusi-institusi pendidikan dan kadangkala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu (Winarno, 2012, h. 177-206).

#### 2.4.4. Perencanaan Sosial

Sebelum berbicara tentang perencanaan sosial, ada baiknya dikemukakan beberapa definisi tentang perencanaan oleh beberapa ahli seperti yang terlihat pada tabel 2.1 berikut, di antaranya yaitu :

Tabel 2.1  
Definisi Perencanaan Sosial Menurut Beberapa Ahli

Ahli	Uraian
Waterson (1965)	Perencanaan adalah usaha yang secara sadar, terorganisasi, dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu.
Schaffer (1970)	Perencanaan tidak terlepas dari pengambilan keputusan, dengan cara lebih memperhatikan lebih banyak data yang ada, ataupun hasil-

(Sambungan)

	hasil yang mungkin dicapai di masa yang akan datang.
J. Nehru (n.d.) dikutip Waterson (1965)	Perencanaan adalah suatu bentuk intelegensia guna mengolah fakta serta situasi sebagaimana adanya dan juga mencari jalan ke luar guna memecahkan masalah.
Beenhakker (1980)	Perencanaan adalah seni untuk melakukan sesuatu yang akan datang dapat terlaksanakan.
Sociedad Interamericana de Planification (n.d.) dikutip Waterson (1965)	Perencanaan adalah merupakan penerapan yang rasional dari pengetahuan manusia terhadap proses pencapaian keputusan yang bertindak sebagai dasar perilaku manusia

Sumber : Conyers (1991, h. 4).

Kemudian lebih jauh Conyers (1991) menyebutkan bahwa perencanaan merupakan sebagai langkah awal yang melibatkan hal-hal menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada di masa depan. Istilah sumber daya disini digunakan dalam kaitan sumber daya alamiah, manusia dan modal. (h. 5).

Sedangkan Kahn (1969) menyebutkan “*planning is policy formulation and realization through choices and rationalization*” (perencanaan merupakan merumuskan dan merealisasikan kebijakan melalui berbagai pilihan yang rasional). (h. 17).

Dalam laporannya yang dipublikasi pada tahun 1970, PPB memberikan pengertian perencanaan sosial sebagai suatu rangkaian tindakan yang terorganisasi, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memungkinkan individu, kelompok serta masyarakat untuk memperbaiki keadaan mereka sendiri, menyesuaikan diri terhadap kondisi yang ada dan berpartisipasi dalam tugas-tugas pembangunan (Conyers, 1991, h. 15).

Kemudian lebih lanjut PBB (1970) memberikan definisi atas perencanaan sosial dengan meliputi tiga tema pengertian, yakni :

- 1) Perencanaan sosial pada sektor sosial, perencanaan ini meliputi sektor kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan, kependudukan dan keluarga berencana.
- 2) Perencanaan sosial pada lintas sektoral, perencanaan yang lebih dari sekedar perencanaan ekonomi, akan tetapi perencanaan pada berbagai sektor.

- 3) Perencanaan sosial sebagai aspek-aspek sosial dari perencanaan ekonomi.  
(Conyers, 1991, h. 15).

Perencanaan sosial sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial. Keduanya sangat sulit untuk dipisahkan, karena masing-masing konsep dalam kenyataannya seringkali dipertukarkan satu sama lain. Karena itu, Conyers (1991) menjelaskan, perencanaan sebaiknya tidak dipandang sebagai aktivitas yang terpisah dari kebijakan, tetapi menjadi suatu bagian dari proses pengambilan keputusan yang kompleks dimulai dari perumusan tujuan kebijakan, sasaran yang lebih luas, kemudian dikembangkan melalui tahapan-tahapan di mana kebijakan itu diterjemahkan ke dalam bentuk perencanaan yang lebih rinci guna memudahkan pelaksanaan program atau proyek-proyek pembangunan sosial. (h. 32).

Lebih lanjut Conyers (1991), mengemukakan bahwa perencanaan sosial dikelompokkan dalam tiga jenis bidang cakupan besar yaitu :

1. Perencanaan pelayanan sosial

Pelayanan sosial yang paling utama ditujukan pada penyediaan pelayanan-pelayanan pokok di bidang sosial, bukan semata-mata bertalian dengan sifat ekonomisnya. Pelayanan semacam ini adalah jenis pelayanan yang memberikan sumbangan terhadap kesejahteraan sosial (*social well being*) penduduk daripada perkembangan ekonomi itu sendiri.

Cakupan pelayanan-pelayanan sosial yang dimaksud antara lain : pelayanan bidang pendidikan, pelayanan bidang kesehatan, perumahan, pengadaan air bersih, serta penyediaan sarana-sarana rekreasi.

Perlu diperhatikan, setiap bentuk pelayanan sosial mempunyai bidang cakupan kegiatan atau lingkungan tertentu, dalam praktek sering terjadi tumpang tindih (*overlapping*) di antara berbagai bentuk pelayanan sosial. Sebagai contoh dalam bidang pendidikan, bentuk pendidikan non formal di luar sistem pendidikan formal melalui sekolah sering *overlap* dengan bentuk-bentuk mata pelajaran dan kegiatan pendidikan lainnya (h. 58-59).

2. Memperhitungkan skala prioritas sosial dan mempertimbangkannya dalam perencanaan pembangunan.

Perlunya perhatian yang cukup memadai mengenai pertimbangan dan tujuan sosial, merefleksikan realisasi bertahap bahwa faktor-faktor sosial harus diperhitungkan dalam setiap program pembangunan.

3. Jaminan terhadap adanya partisipasi yang luas dalam perencanaan.

Faktor-faktor sosial yang sangat mempengaruhi proses perencanaan dibagi dalam dua hal. *Pertama*, adanya dorongan untuk mendayagunakan perencanaan sosial yang khususnya bertanggungjawab meneliti aspek-aspek sosial pada setiap rencana atau proyek. *Kedua*, timbulnya pengaruh ke arah partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Para perencana menyadari bahwa orang-orang yang terkena sasaran suatu proyek haruslah dilibatkan sebanyak mungkin dalam tahap perencanaan, dengan tujuan agar dapat memberikan kepastian mengenai informasi yang mendetail bagi kebutuhan dan kondisi sosial yang mudah diperoleh dan memberi dorongan masyarakat untuk berpartisipasi dan berkomitmen besar terhadap keberhasilan proyek yang dilaksanakan. (h. 21-27).

Dalam studi perencanaan sosial, Conyers (1991) menjelaskan dampak sosial sebagai bagian dari tahap awal perencanaan agar mampu mencapai tiga tujuan pokok. *Pertama*, studi harus mengusahakan adanya perkiraan mengenai efek sosial yang timbul serta memperhitungkannya dalam proses perencanaan. Hal ini penting karena jika suatu proyek mempunyai dampak negatif maka dapat dievaluasi secara tepat dan dilaksanakan berbagai usaha agar dampak negatif tersebut dapat ditekan semaksimal mungkin. *Kedua*, studi semacam ini juga meneliti kondisi sosial dan kultural setempat dan memikirkan faktor-faktor apa saja yang perlu diperhitungkan dalam proses perencanaan, demi keberhasilan proyek serta mencapai tingkat perolehan keuntungan yang maksimal. *Ketiga*, studi dampak sosial memperhatikan dan mengidentifikasi jenis-jenis dan fasilitas pelayanan sosial apa saja yang tepat dimasukkan dalam rancangan proyek, agar terwujud kebutuhan sosial masyarakat setempat serta memperkecil timbulnya keresahan sosial dari pelaksanaan suatu proyek. Jika proyek sudah dilaksanakan, maka proses perencanaan yang dilaksanakan adalah meneliti efek positif dan negatif yang ditimbulkan, serta cocok atau tidaknya suatu jenis pelayanan sosial tertentu dalam mengantisipasi munculnya masalah-masalah sosial yang akan timbul. (h. 123 dan 148).

Betapa pentingnya memperhitungkan kondisi dan sikap masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pembangunan, perencanaan dan pembuatan program, sekalipun program dan proyek tersebut semata-mata hanya bersifat ekonomis belaka (Conyers, 1991, h. 153).

Oleh karenanya partisipasi masyarakat diperlukan dalam perencanaan pembangunan. Lebih lanjut Conyers (1991) mengungkapkan ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dianggap sangat penting. *Pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek sosial akan gagal. *Kedua*, masyarakat lebih mempercayai program atau proyek pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses, persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. *Ketiga*, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri. Mereka pun punya hak turut *urun rembug* (memberikan saran) dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. (h. 154-155)

Istilah partisipasi itu sendiri menurut FAO (1989) dalam biasanya digunakan masyarakat dalam berbagai makna umum, diantaranya :

- 1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan
- 2) Partisipasi adalah proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan.
- 3) Partisipasi adalah suatu proses aktif, yang bermakna bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- 4) Partisipasi adalah proses menjembatani dialog antara masyarakat dengan penyelenggara proyek dalam rangka persiapan, pelaksanaan dan pemantauan proyek, agar dapat memperoleh informasi tentang konteks lokal maupun dampak sosial proyek terhadap masyarakat

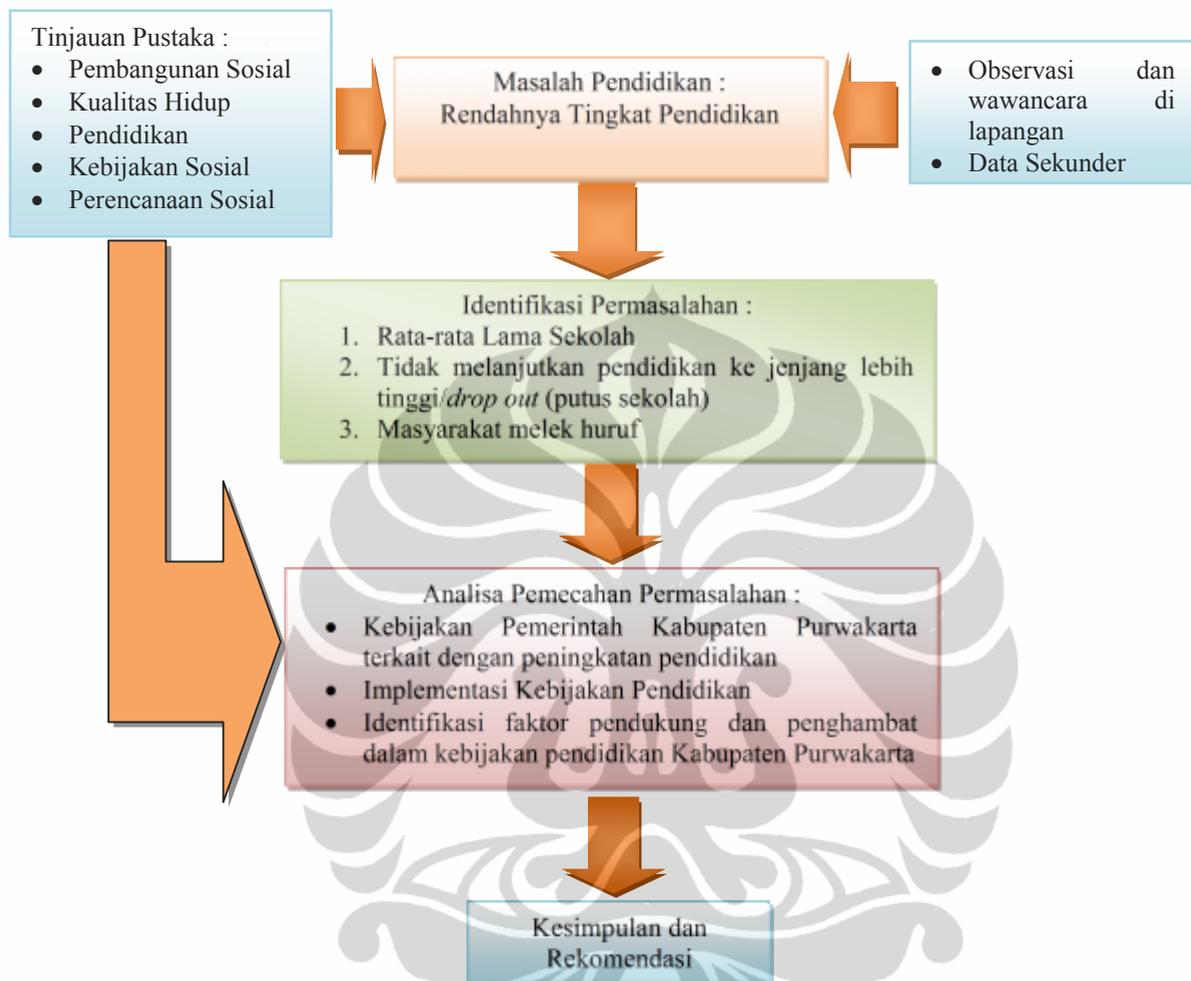
- 5) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat.
- 6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan dan diri mereka sendiri.

(Mikkelsen, 2003, h. 64)

Dalam melakukan kegiatan partisipasi, seorang perencana sosial perlu memahami kondisi masyarakat di antaranya sebagai berikut: *Pertama*, masyarakat akan berpartisipasi apabila mereka merasa bahwa isu atau kegiatan tersebut penting. *Kedua*, bahwa masyarakat harus merasa bahwa keterlibatan aksi dalam partisipasi akan membawa perubahan. *Ketiga*, partisipasi harus diakui dan dihargai. Partisipasi masyarakat haruslah untuk semua orang, sesuai kepentingan dan minat yang harus diperhitungkan. *Keempat*, semua orang harus bisa berpartisipasi, dan didukung dalam melakukannya. *Kelima*, partisipasi tidak boleh mengucilkan. Masyarakat harus mengontrol struktur dan proses serta harus menentukan bentuk yang akan digunakan (Ife & Tesoriero, 2008, h. 310).

Ada dua keuntungan pokok dalam mempekerjakan seorang perencana sosial profesional. *Pertama*, dia memiliki pandangan yang lebih luas terhadap isu-isu dan problem-problem yang ada dalam setiap aspek perencanaan sosial. Misalnya, seorang perencana sosial profesional dalam bidang perencanaan pendidikan mengemukakan perspektif yang lebih luas terhadap perencanaan pendidikan daripada perspektif yang dikemukakan oleh seorang yang dididik hanya dalam bidang pendidikan. *Kedua*, seorang perencana sosial profesional telah memiliki tingkat tertentu dalam hal keterampilan serta beberapa teknik analisa yang sudah diketahui bersifat umum untuk berbagai jenis perencanaan sosial (Conyers, 1991, h. 298).

## 2.5. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2.  
Kerangka Pemikiran Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta

Masalah Rendahnya Tingkat Pendidikan di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah, *drop out* dan masyarakat melek huruf. Dari masalah pendidikan yang ada akan coba dikaitkan dengan beberapa teori kepastakaan diantaranya pembangunan sosial, kualitas hidup, pengertian dan tujuan pendidikan, kebijakan sosial dan perencanaan sosial. Pembangunan sosial bertujuan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang fokusnya kepada manusia. Upaya untuk mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan

untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM. Aspek pendidikan terkait langsung dengan sumber daya manusia dimana manusia merupakan agen perubah (*agent of change*) dalam pembangunan. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan sosial. Dari ketiga hal tersebut, pembangunan sosial → meningkatkan kualitas hidup → melalui pendidikan maka dibutuhkan suatu kebijakan sosial dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Dalam merumuskan suatu kebijakan sosial terkait pula dengan perencanaan sosial, karena antara kebijakan sosial dengan perencanaan sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya saling berhubungan. Kemudian sehubungan dengan masalah pendidikan dilakukan observasi dan wawancara lapangan serta pengumpulan data sekunder sebagai pendukung kajian lalu dari identifikasi permasalahan yang ada dicoba dianalisa pemecahan permasalahannya dilihat dari kebijakan yang dilakukan atau dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta terkait dengan peningkatan pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan tersebut, serta identifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta, pada analisa pemecahan masalah tetap dikaitkan dengan teori-teori yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. Lalu ditarik kesimpulan dan mencoba memberikan rekomendasi terkait dengan hasil kajian.

## BAB 3

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 3.1. Kondisi Geografis

##### 1) Batas Administrasi Daerah

Kabupaten Purwakarta yang terletak antara  $107^{\circ} 30'$  –  $107^{\circ} 40'$  Bujur Barat dan  $6^{\circ} 25'$  –  $6^{\circ} 45'$  Lintang Selatan dan memiliki luas 97.172 ha atau sekitar 2,81% dari luas Propinsi Jawa Barat. Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 Kecamatan dengan 192 desa/kelurahan. Batas-batas wilayah Kabupaten Purwakarta adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor

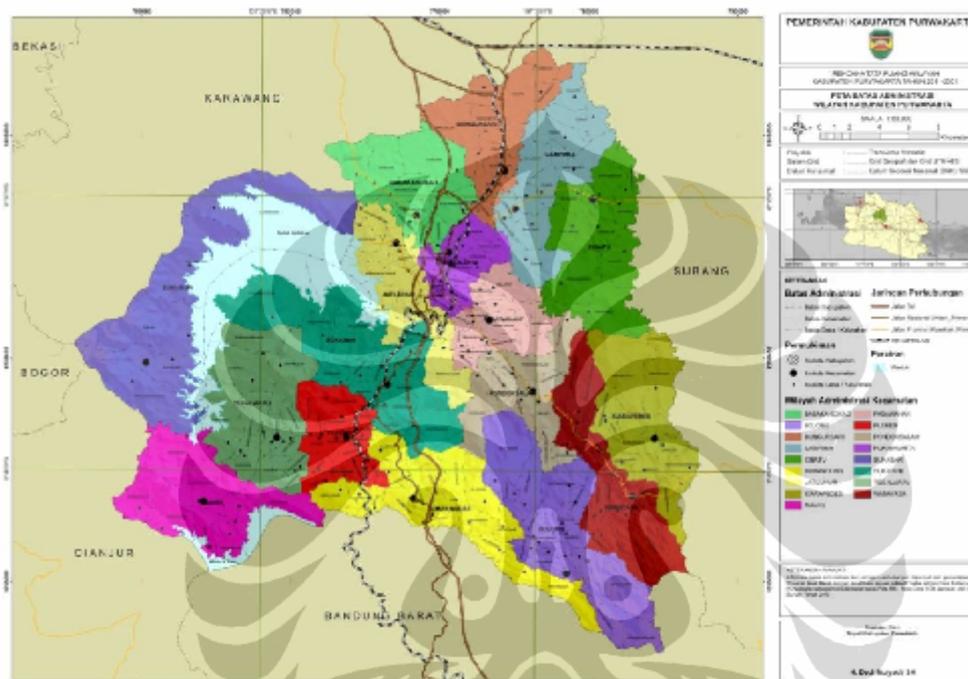
(LKPJ Bupati Purwakarta, 2011, h. I-8 – I-9)

Bagian Utara Kabupaten Purwakarta terdiri dari Kecamatan Campaka, Bungursari, Cibatu, Purwakarta, Babakancikao, Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa dan Kiarapedes yang sebagian besar terletak pada ketinggian 25-500 m dpl. Bagian Barat yang meliputi Kecamatan Jatiluhur, Sukasari dengan ketinggian 400 m dpl. Bagian Selatan dan Timur yang terdiri dari Kecamatan Plered, Maniis, Tegalwaru, Sukatani, Darangdan dan Bojong rata-rata berada pada ketinggian 200 m dpl.

Kabupaten Purwakarta dibelah oleh Jalan Nasional Jakarta-Bandung berupa jalan biasa dan jalan tol pada arah yang sama. Akses jalur utara selatan relatif yang paling baik, disusul akses ke arah Timur melalui Jalan Propinsi menuju Cipeundeuy dan Sagalaherang Kabupaten Subang. Di wilayah barat akses relatif kurang memadai. Selain sebagian terbatas oleh Waduk Jatiluhur dan

Waduk Cirata. Wilayah Barat Purwakarta cenderung lebih dekat aksesnya ke Jonggol atau Cianjur namun dalam kondisi belum optimal.

Gambar 3.1.  
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Purwakarta



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Purwakarta, tahun 2012. Diambil dari LKPJ Bupati Purwakarta tahun 2011, h. I-9

## 2) Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Purwakarta adalah 97.172 hektar atau 971,72 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 17 kecamatan, 183 desa, 9 kelurahan, 476 dusun, 1.021 Rukun Warga (RW), dan 2.959 Rukun Tetangga (RT). Secara geografis Kabupaten Purwakarta berada pada titik temu tiga jalur utama lalu lintas yang sangat strategis, yaitu jalur Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung dan Purwakarta- Cirebon. (LKPJ Bupati Purwakarta, 2011, h. I-9)

Tabel 3.1.  
Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan  
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2011

KECAMATAN	LUAS WILAYAH		JUMLAH DESA/KELURAHAN
	KM	%	
1. Jatiluhur	60,11	6,19	10
2. Sukasari	92,01	9,47	5
3. Maniis	71,64	7,37	8
4. Tegalwaru	73,23	7,54	13
5. Plered	31,48	3,24	16
6. Sukatani	95,43	9,82	14
7. Darangdan	67,39	6,94	15
8. Bojong	68,69	7,07	14
9. Wanayasa	56,55	5,82	15
10. Kiarapedes	52,16	5,37	10
11. Pasawahan	36,96	3,80	12
12. Pondoksalam	44,08	4,54	11
13. Purwakarta	24,83	2,56	10
14. Babakancikao	42,40	4,36	9
15. Campaka	43,60	4,49	10
16. Cibatu	54,66	5,63	10
17. Bungursari	56,50	5,81	10
<b>JUMLAH</b>	<b>971,72</b>	<b>100,00</b>	<b>192</b>

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Purwakarta, Tahun 2012. Diambil dari LKPJ Bupati Purwakarta tahun 2011, h. 1-10

### 3.2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Purwakarta jika dicermati dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Pertambahan penduduk yang pesat juga menggambarkan bertambahnya proporsi penduduk usia muda. Keadaan ini mengharuskan pemerintah untuk lebih memperhatikan upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kualitasnya. Jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta berdasarkan data BPS Kabupaten Purwakarta, pada tahun 2010 sebesar 852.521 jiwa, hal ini mengalami pertambahan sebanyak 7.012 jiwa dari tahun sebelumnya 2009 sebesar 845.509 jiwa. Angka rata-rata laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu tahun 2005-2010 adalah sebesar 2,10%. Laju pertumbuhan yang terkecil terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 2,00% dan laju pertumbuhan yang terbesar terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 2,15 %. Laju

pertumbuhan penduduk tahun 2010 sebesar 2,11%. (Data Makro Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Purwakarta, 2011, h. 77)

Penduduk Kabupaten Purwakarta tahun 2010 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hasil Sensus Penduduk sebanyak 852.521 jiwa dengan sex ratio sebesar 105,00% yang berarti bahwa dari 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Dikarenakan Sensus Penduduk dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali (tahun berakhiran 0), maka untuk tahun 2011 jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta diproyeksikan mencapai 876.249 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 2,78%. Bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk tahun sebelumnya, kondisi ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,60%. Hal ini disebabkan selain akibat faktor pertumbuhan penduduk alami, juga dipengaruhi oleh faktor migrasi, baik migrasi masuk maupun migrasi keluar. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta dari tahun 2006-2011 dapat dilihat pada grafik 3.1, sedangkan untuk jumlah penduduk berdasarkan kecamatan tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel 3.2. (LKPJ Bupati Purwakarta, 2011, h. I-12).

Grafik 3.1  
Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta Tahun 2006-2011



Sumber: Sensus Penduduk tahun 2010, BPS Kabupaten Purwakarta, tahun 2011; diambil dari LKPJ Bupati Purwakarta tahun 2011, h.I-13 \*) Data 2011 merupakan hasil proyeksi Bappeda Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Tabel 3.2  
Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan  
Tahun 2010-2011

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	
		2010	2011*
1.	PURWAKARTA	165.447	169.252*
2.	CAMPAKA	40.907	38.652*
3.	JATILUHUR	61.931	63.634*
4.	PLERED	71.099	74.110*
5.	SUKATANI	63.730	66.485*
6.	DARANGDAN	59.705	64.561*
7.	MANIIS	31.205	33.285*
8.	TEGALWARU	44.160	47.363*
9.	WANAYASA	38.921	38.173*
10.	PASAWAHAN	40.518	40.962*
11.	BOJONG	44.757	50.724*
12.	BABAKANCIKAO	47.476	47.172*
13.	BUNGURSARI	51.298	48.517*
14.	CIBATU	26.989	26.281*
15.	SUKASARI	14.455	14.445*
16.	PONDOKSALAM	26.329	27.804*
17.	KIARAPEDES	23.594	24.831*
<b>JUMLAH</b>		<b>852.521</b>	<b>876.249*</b>

Sumber: Sensus Penduduk tahun 2010, BPS Kabupaten Purwakarta, tahun 2011; diambil dari LKPJ Bupati Purwakarta tahun 2011, h. I-13 – I-14 \*) Data 2011 merupakan hasil proyeksi Bappeda Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

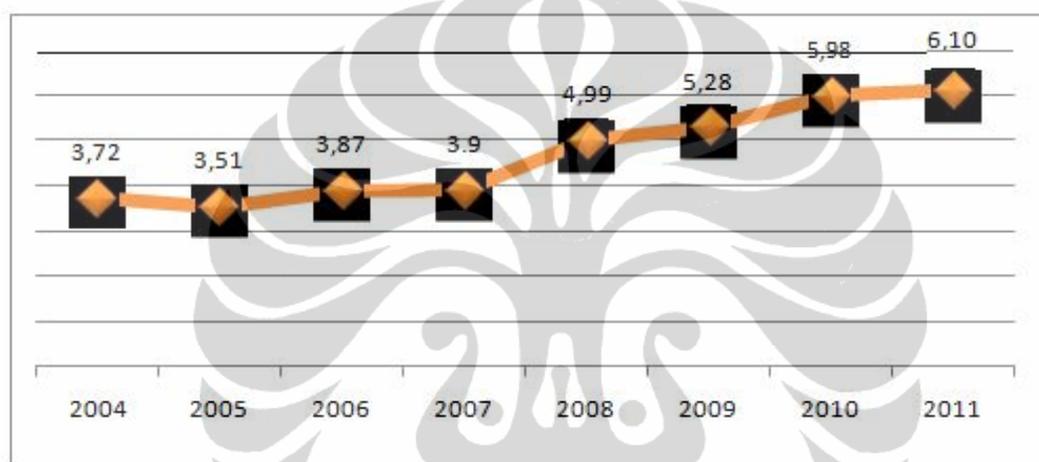
### 3.3. Kondisi Ekonomi Daerah

#### 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menggambarkan besarnya peningkatan produksi yang terjadi dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang telah berlangsung di Kabupaten Purwakarta dalam periode waktu tertentu. Sebagaimana diketahui, perkembangan perekonomian Purwakarta tidak lepas dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional secara umum. Perekonomian nasional yang terus menunjukkan pertumbuhannya baik dari segi investasi maupun sektor perdagangan memberikan imbas pada nilai investasi di Kabupaten Purwakarta yang semakin meningkat, begitupun pada sektor perdagangan memperlihatkan

pertumbuhan positif dari tahun ke tahunnya. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purwakarta tahun 2010 mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,98%, sedangkan tahun 2011 diprediksi terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan sekitar 6,10%. Data Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purwakarta dari tahun 2004-2011, dapat dilihat pada grafik 3.2. (LKPJ Bupati Purwakarta, 2011, h. I-37).

Grafik 3.2  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purwakarta tahun 2004-2011



Sumber: Data tahun 2004-2010, BPS Kabupaten Purwakarta, tahun 2011; diambil dari LKPJ Bupati Purwakarta tahun 2011, h. I-38 \*) Data 2011 merupakan hasil proyeksi Bappeda Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

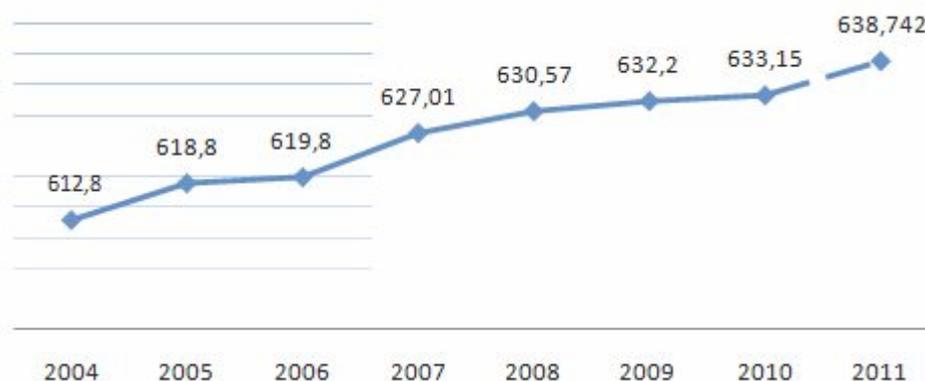
Dari grafik 3.2 di atas menunjukkan bahwa geliat perekonomian Kabupaten Purwakarta tahun 2008 mampu tumbuh sebesar 4,99% dan mengalami peningkatan yang cukup tajam bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purwakarta terus menguat dengan angka 5,28%, dan di tahun 2010 semakin menguat di angka 5,98%, sedangkan untuk tahun 2011 diprediksi terus menguat di angka 6,10%. Peningkatan angka Laju Pertumbuhan Ekonomi tersebut dipicu oleh tiga sektor dominan sebagai penggerak roda perekonomian di Kabupaten Purwakarta, yakni: Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan dan Sektor Pertanian. (LKPJ Bupati Purwakarta, 2011, h. I-38)

## 2) Kemampuan Daya Beli Masyarakat

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Kemampuan daya beli masyarakat ditentukan oleh beberapa faktor, seperti faktor pendapatan, inflasi dan pola konsumsi masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, pertumbuhan Indeks Daya Beli Masyarakat Kabupaten Purwakarta dari tahun ke tahun terus meningkat, dengan menghitung tingkat daya beli masyarakat berdasarkan pengeluaran konsumsi per-Kapita riil tahun 2010 sebesar Rp 633.150,00 mengalami peningkatan bila dibanding tahun 2009 yang hanya sebesar Rp 632.200,00. Sedangkan untuk tahun 2011 Badan Pusat Statistik belum mengeluarkan data Indeks Daya Beli, tetapi pertumbuhannya telah diestimasi yaitu sebesar Rp 638.742,00. Salah satu alasan peningkatan ini adalah pembangunan ekonomi Kabupaten Purwakarta yang mengalami pertumbuhan positif akan berdampak pada kenaikan pendapatan per-kapita masyarakat pada periode yang sama. Sehingga hal ini akan mempengaruhi tingkat kemampuan daya beli masyarakat secara umum. Pertumbuhan Indeks Daya Beli Masyarakat Kabupaten Purwakarta tahun 2004-2011, dapat dilihat pada grafik 3.3. (LKPJ Bupati Purwakarta, 2011, h. I-41).

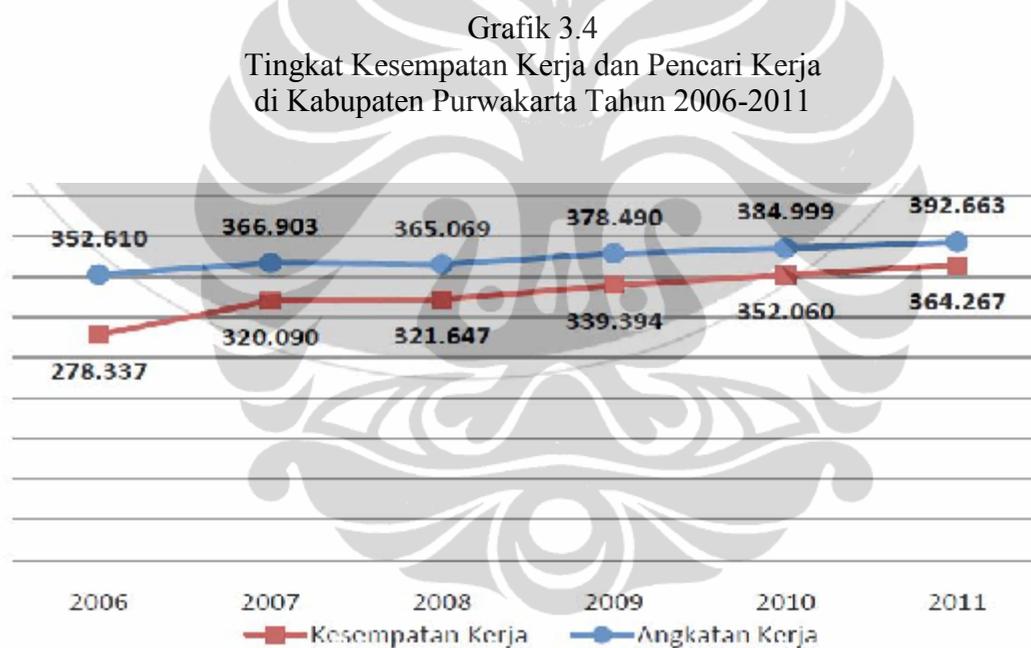
Grafik 3.3  
Indeks Daya Beli Masyarakat Kabupaten Purwakarta Tahun 2004-2011



Sumber: Data tahun 2004-2010, BPS Kabupaten Purwakarta, tahun 2011; diambil dari LKPJ Bupati Purwakarta tahun 2011, h. I-41 \*) Data tahun 2011 merupakan hasil proyeksi Bappeda Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

### 3) Tingkat Kesempatan Kerja dan Pencari Kerja

Tingkat kesempatan kerja menunjukkan jumlah ketersediaan lapangan kerja pada suatu daerah, sedangkan tingkat pencari kerja menunjukkan jumlah penduduk yang sedang dalam kondisi mencari pekerjaan. Hal ini tentunya didasarkan kelompok usia tertentu, yaitu kelompok usia penduduk produktif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, tahun 2011 jumlah kesempatan kerja diperkirakan mencapai 364.267 orang, dengan tingkat pencari kerja sebanyak 392.663 orang. Data tingkat kesempatan kerja dan pencari kerjadi Kabupaten Purwakarta tahun 2006-2011, dapat dilihat pada grafik 3.4. (LKPJ Bupati Purwakarta, 2011, h. I-42)



Sumber: BPS Kabupaten Purwakarta, tahun 2012; diambil dari LKPJ Bupati Purwakarta tahun 2011, h. I-42

### 4) Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah keadaan dimana individu atau sekelompok masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan yang layak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purwakarta tahun 2011 adalah sebanyak 57.007 RTS. Adapun jumlah penduduk miskin Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011 mengalami penurunan

yang cukup signifikan, seperti dapat dilihat pada tabel 3.3. (LKPJ Bupati Purwakarta, 2011, h. I-43)

Tabel 3.3  
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011

Uraian	Tahun	
	2010**)	2011***)
Penduduk Miskin	58.708	57.007

Sumber: \*\*) Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 31A tahun 2010 tentang Juknis Program Beras untuk RTS Penerima Manfaat RTS-PM Raskin Kabupaten Purwakarta, tahun 2010.

\*\*\*) Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Juknis Program

Beras untuk RTS Penerima Manfaat RTS-PM Raskin Kabupaten Purwakarta, tahun 2011

Diambil dari LKPJ Bupati Purwakarta tahun 2011, h. I-43

### 3.4. Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta

Kelurahan Nagri Kaler merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Purwakarta. Karakteristik wilayah kelurahan ini merupakan daerah perkotaan, di mana banyak terdapat pertokoan dan mall. Kawasan pertokoan Pasar Jumat merupakan salah satu bagian wilayah dari Kelurahan Nagri Kaler. Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Nagri Kaler terdiri dari :



Gambar 3.2. Kantor Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta.

Sumber : dokumentasi pribadi, 2012

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tegal Munjul Kecamatan Purwakarta
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta

Kelurahan Nagri Kaler merupakan daerah dengan kontur dataran rendah yang memiliki luas wilayah 173,6 hektar di mana dari total luas wilayah tersebut sebagian besarnya merupakan daerah pemukiman dengan luas 161,18 hektar.

Terdiri dari 12 RW dan 96 RT.

Berdasarkan daftar isian potensi desa dan kelurahan pada tahun 2009 Kelurahan Nagri Kaler memiliki jumlah penduduk 22.618 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 11.257 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 11.361 jiwa serta jumlah kepala keluarga sebanyak 5.600 KK.



Gambar 3.3. Suasana Pertokoan Pasar Jumat di Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta  
Sumber : dokumentasi pribadi, 2012

Dari hasil pengamatan lapangan, infrastruktur di Kelurahan Nagri Kaler sudah sangat baik. Akses dari dan menuju ke Kelurahan Nagri Kaler ini sangat mudah. Beberapa jalan yang ada di kelurahan ini merupakan jalan protokol, di mana kendaraan umum berupa angkutan kota (angkot) dan bis luar kota dari Jakarta dan Bandung melintasi salah satu jalan yang ada di kelurahan ini. Kantor Kecamatan Purwakarta pun berada di wilayah Kelurahan Nagri Kaler. Meski demikian, di sudut wilayah tertentu dari kelurahan ini masih terdapat jalan setapak berupa tanah yang belum tersentuh pembangunan atau belum *dipaving block* apalagi diaspal. Salah satunya berada di wilayah RW 08 dan RW 05 dekat Perumahan Panorama.

Untuk sarana pendidikan yang berada di kelurahan ini, sudah sangat baik dan lengkap. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi sudah ada. Hasil pengamatan lapangan, untuk TK milik pemerintah ada 1 buah terdapat

di Jalan Beringin, sementara SD Negeri terdapat 20 buah yaitu SDN 01 - SDN 20 Nagri Kaler yang tersebar di seluruh kelurahan ini, SMP Negeri terdapat 2 buah yaitu SMPN 4 Purwakarta dan SMPN 7 Purwakarta, SMA Negeri terdapat 1 buah yaitu SMAN 3 Purwakarta, dan kampus UPI Purwakarta dengan program PGSD-

Dari hasil pengamatan lapangan, infrastruktur di Kelurahan Nagri Kaler sudah sangat baik. Akses dari dan menuju ke Kelurahan Nagri Kaler ini sangat mudah. Beberapa jalan yang ada di kelurahan ini merupakan jalan protokol, di mana kendaraan umum berupa angkutan kota (angkot) dan bis luar kota dari Jakarta dan Bandung melintasi salah



Gambar 3.4. Salah satu fasilitas Gedung SD di Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta  
Sumber : dokumentasi pribadi, 2012

nya. Untuk sarana pendidikan milik swasta terdapat SMA PGRI dan dua buah SMK rumpun farmasi serta teknologi dan industri.

### 3.5. Desa Rawasari Kecamatan Plered



Gambar 3.5. Kantor Desa Rawasari  
Kecamatan Plered  
Sumber : dokumentasi pribadi, 2012

Desa Rawasari merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta. Karakteristik wilayahnya merupakan daerah pedesaan. Dengan luas wilayah sebesar 182 hektar, sebagian besar wilayahnya merupakan area persawahan serta perkebunan, dan sepertiga wilayah merupakan area pemukiman penduduk, terdiri dari 3

Dusun/lingkungan, 3 RW dan 16 RT, Desa Rawasari memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Citeko/Desa Sindangsari
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gandasoli
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gandasoli/Desa Gandamekar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Cadasmekar Kecamatan Tegalwaru

Berdasarkan data umum monografi tahun 2012, jumlah penduduk Desa Rawasari sebanyak 3537 jiwa dengan komposisi 1781 jiwa laki-laki dan 1756 jiwa perempuan. Sedangkan jumlah kepala keluarganya sebanyak 942 KK, di mana dari jumlah tersebut sebanyak 400 KK mendapatkan ‘jatah’ program raskin tahun 2011.

Untuk mata pencaharian penduduk Desa Rawasari terdiri dari Petani sebanyak 100 KK, Pedagang sebanyak 15 KK, Pekerja sebanyak 47 KK, PNS sebanyak 8 KK serta lain-lain sebanyak 772 KK. Termasuk dalam kategori lain-lain adalah mereka yang bekerja sebagai buruh tani dan buruh pabrik genteng/lio yang banyak terdapat di Desa Rawasari.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, infrastuktur jalan di Desa Rawasari sudah mengalami perkembangan yang berarti. Ketika penulis berkunjung ke desa ini pada tahun 2010, jalan utama desa ini masih belum diaspal serta jalan setapaknya belum *dipaving block*. Sedangkan pada tahun 2012 ketika penulis kembali berkunjung ke desa ini, jalan utamanya sudah diaspal, meski belum selesai seluruhnya. Jalan-jalan setapak yang menghubungkan wilayah satu dengan wilayah lainnya di desa ini sudah *dipaving block*,



Gambar 3.6. Jalan Utama di Desa Rawasari Kecamatan Plered  
Sumber : dokumentasi pribadi, 2012



Gambar 3.7. Jalan Setapak di Desa Rawasari Kecamatan Plered  
Sumber : dokumentasi pribadi, 2012

targetnya

akhir tahun 2012 semuanya selesai diaspal untuk jalan utama desa, serta *dipaving block* untuk jalan setapak desa. Dana pengembangan infrastruktur jalan desa berasal dari PNPM. Meski demikian, akses dari dan menuju Desa Rawasari, masih belum bisa dicapai kendaraan umum dari Kecamatan Plered. Sarana transportasi yang digunakan menggunakan ojek motor. Sedangkan kendaraan pribadi berupa mobil atau motor sudah bisa menjangkau Desa Rawasari.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, untuk sarana pendidikan di Desa Rawasari telah mengalami perkembangan pula. Pada tahun 2012, sudah terdapat fasilitas sekolah TK hingga SMK di desa ini. Sejak kepemimpinan Kepala Desa Bapak Noeratif yang dimulai dari tahun 2007 hingga saat ini (2012, pen), sarana infrastruktur Desa Rawasari mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Bapak Noeratif sangat *concern* terhadap kemajuan Desa Rawasari, termasuk dalam hal pendidikan di desa ini. Fasilitas SMP di desa ini sudah mulai dirintis sejak kepemimpinan Bapak Noeratif dengan

SMP kelas jauh. Kemudian dilanjutkan dengan SMP Satu Atap dimana lokasinya bergabung dengan gedung SDN Rawasari, hingga sekarang Desa Rawasari memiliki gedung SMPN tersendiri yang letaknya bersebelahan dengan kantor Desa Rawasari. SMPN Rawasari diresmikan pada akhir tahun 2011, tepatnya 31 Desember 2011. Sekolah ini dibangun dengan partisipasi masyarakat menggunakan dana APBN melalui Program *Block Grant* Pengembangan SD-SMP Satu Atap tahun 2011 dengan total biaya pembangunan sebesar Rp 450.000.000,-.

Ketika penulis berkunjung pertama kali ke Desa Rawasari pada tahun 2010, ketika bincang-bincang dengan Bapak Noeratif selaku Lurah Rawasari, saat itu beliau masih ‘mengeluhkan’ tentang fasilitas sekolah yang belum memadai di desa ini.



Gambar 3.8. Fasilitas gedung SMPN Rawasari  
Sumber : dokumentasi pribadi, 2012

Fenomena banyaknya remaja putus sekolah dan bekerja di pabrik genteng/lio merupakan hal biasa. Beliau berusaha keras sehingga akhirnya fasilitas SMPN Rawasari dapat dibangun dan diresmikan pada Desember 2011. Kini, di tahun 2012, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Noeratif, masalah anak putus sekolah di desa ini sudah bisa teratasi. Faktor jarak yang awalnya menjadi kendala serta menjadi alasan anak-anak enggan bersekolah karena anak-anak di desa ini harus bersekolah jauh, kini sudah tidak lagi. Fasilitas gedung sekolah telah dibangun dan jaraknya dekat dengan masyarakat. Pemandangan anak-anak berangkat pergi ke sekolah menjadi hal yang biasa di desa ini, padahal dulunya hal ini sangat langka. Tugas pemerintah desa saat ini yang masih terus dilakukan adalah mengedukasi masyarakat, terutama orang tua, akan pentingnya sekolah. Setidaknya dengan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi akan berdampak pula pada peningkatan perbaikan ekonomi masyarakat.



Gambar 3.9. SMKN 1 Plered yang terletak di Desa Rawasari Kecamatan Plered  
Sumber : dokumentasi pribadi, 2012

Selain SMP, di Desa Rawasari juga ada SMK yaitu SMKN 1 Plered. Dari namanya memang sekolah ini dibangun untuk satu kecamatan yaitu Kecamatan Plered, dan kebetulan letaknya berada di Desa Rawasari. Keberadaan SMKN 1 Plered di Desa Rawasari merupakan salah satu nilai tambah bagi desa ini.

Setidaknya hal ini mendekatkan sarana fasilitas sekolah untuk jenjang yang lebih tinggi di desa ini.

Dengan adanya fasilitas SMK semakin memotivasi anak-anak di Desa Rawasari untuk sekolah ke jenjang lebih tinggi. Bukan hanya anak-anak di Desa Rawasari yang mendapatkan keuntungan dengan adanya fasilitas sekolah ini, selain dari desa tetangga yang masih satu Kecamatan Plered dengan Desa Rawasari, murid-murid sekolah ini juga berasal dari kecamatan tetangga, seperti Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Darangdan dan Kecamatan Maniis. Ada pula yang dari Kabupaten Bandung Barat yang bersekolah di SMKN 1 Plered. Bapak Noeratif pun turut andil dalam bernegosiasi dengan pihak sekolah agar anak-anak Desa Rawasari mendapat prioritas untuk bisa bersekolah di SMKN 1 Plered.

Keunikan dari SMKN 1 Plered adalah ada dua rumpun SMK yang digabung menjadi satu, yaitu rumpun teknologi dan industri serta rumpun ekonomi manajemen. Hal ini sengaja dilakukan tentunya untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada anak usia sekolah untuk dapat menikmati pendidikan tingkat SMK tanpa harus terkendala jarak yang sangat jauh, terutama bagi anak perempuan, mereka bisa mengambil jurusan akuntansi di sekolah ini.

## **BAB 4**

### **HASIL TEMUAN LAPANGAN**

#### **4.1. Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta**

##### **4.1.1. Pendidikan dan Permasalahannya di Kabupaten Purwakarta**

###### **4.1.1.1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) baru mencapai 7,55 tahun**

Tingkat pendidikan merupakan salah satu hal yang menjadi tolok ukur kinerja pembangunan manusia atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan dua hal lainnya adalah kualitas kesehatan dan kondisi ekonomi (pendapatan). Dalam pengukuran pembangunan manusia dalam bidang pendidikan, indikator yang digunakan adalah angka rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta pada tahun 2013 menurut hasil proyeksi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 diasumsikan dapat mencapai skala sebesar 73,52. Adapun pencapaian IPM pada tahun 2009 mencapai sebesar 70,99 meningkat sebesar 0,68 poin dibandingkan angka capaian pada tahun 2008 sebesar 70,31. Bila dibandingkan dengan target IPM Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 sebesar 73,52, maka rata-rata capaian setiap tahunnya harus mencapai angka 0,63 poin. (RKPD Kabupaten Purwakarta tahun 2011, h. II-2).

Kepala Bappeda Kabupaten Purwakarta mengatakan bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Purwakarta saat ini baru mencapai 7,55 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP :

“...Rata-rata Lama Sekolah saat ini masih baru mencapai 7,55 tahun, setara dengan SMP kelas 2 rata-ratanya”. (TH, 16 April 2012).

Hal ini diperkuat oleh dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011 bahwa Kabupaten Purwakarta pada tahun 2013 menurut hasil proyeksi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 diasumsikan dapat mencapai skala sebesar 7,26. Adapun pencapaian RLS pada tahun 2009 mencapai sebesar 7,08 meningkat sebesar 0,08 poin dibandingkan angka capaian pada tahun 2008 sebesar 7,00. Bila

dibandingkan dengan target RLS Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 sebesar 7,26, maka rata-rata capaian setiap tahunnya harus mencapai angka sebesar 0,05 poin. Kondisi ini menggambarkan masih adanya penduduk yang belum tamat SMP sehingga diharapkan pada tahun 2013 penduduk di Kabupaten Purwakarta dapat menamatkan pendidikannya minimal sampai dengan tingkat SMP. (RKPD Kabupaten Purwakarta tahun 2011, h. II-2).

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan sosial. Pendidikan juga merupakan salah satu modal dasar sekaligus menjadi kunci keberhasilan pembangunan di suatu tempat. Pendidikan juga memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi yang berkualitas untuk kepentingan masa depan, sehingga manakala tingkat pendidikan dikatakan tinggi setidaknya menggambarkan pola pikir dan peradaban masyarakat di suatu daerah tersebut. Tingkat pendidikan dapat dikatakan tinggi adalah salah satunya dengan melihat rata-rata lama sekolah di daerah tersebut.

#### **4.1.1.2. Angka Melek Huruf (AMH) belum mencapai 100 persen**

Membaca merupakan sebuah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang manusia dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan membaca, maka orang tersebut akan memiliki pengetahuan dalam berbagai hal yang ingin diketahuinya. Dalam proses belajar pun, kegiatan membaca banyak dilakukan.

Dalam pengukuran pembangunan manusia dalam bidang pendidikan, selain angka rata-rata lama sekolah digunakan pula angka melek huruf sebagai salah satu indikatornya.

Di Kabupaten Purwakarta, angka melek hurufnya saat ini masih berada pada 96 persen, artinya masih ada 4 persen penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Purwakarta yang buta huruf. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Purwakarta saat diwawancarai :

“..masih adanya buta huruf. Angka Melek Huruf 96 persen, artinya masih ada 4 persen yang masih buta huruf”. (TH, 16 April 2012).

Pernyataan Kepala Bappeda ini diperkuat oleh dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011 bahwa Kabupaten

Purwakarta pada tahun 2013 menurut hasil proyeksi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 diasumsikan dapat mencapai skala sebesar 97,81. Adapun pencapaian AMH pada tahun 2009 mencapai sebesar 96,34 meningkat sebesar 0,84 poin dibandingkan angka capaian pada tahun 2008 sebesar 95,50. Bila dibandingkan dengan target AMH Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 sebesar 97,81, maka rata-rata capaian setiap tahunnya harus mencapai angka sebesar 0,37 poin. (RKPD Kabupaten Purwakarta tahun 2011, h. II-2).

Di sisi lain, Bupati Purwakarta mengatakan bahwa untuk angka melek huruf di Kabupaten Purwakarta saat ini tidak mungkin bisa 100 persen karena yang mengalami buta huruf itu adalah para penduduk yang berusia diatas 60-70 tahun. Baca dan tulis diperuntukkan bagi mereka yang masih prospek dan dalam jangka panjang diharapkan semua penduduk di Kabupaten Purwakarta bisa membaca.

“...Angka melek huruf tidak mungkin bisa seratus persen, bagaimana nenek-nenek usia 70 tahun harus belajar? ...Artinya tidak mungkin juga kita seratus persen melek huruf, karena masih banyak yang usianya diatas 60-70 tahun”. (DM, 24 April 2012).

Hal yang sama dikatakan pula oleh Lurah Nagri Kaler terkait permasalahan buta huruf di Kelurahan Nagri Kaler :

“Untuk yang belum bisa membaca atau buta huruf, di sini juga ada, tetapi persentasenya sangat kecil, itu pun usianya yang sudah agak tua”. (ZM, 17 April 2012).

Dari hasil jawaban para informan tersebut di atas, permasalahan tentang angka melek huruf di Kabupaten Purwakarta yang masih belum 100 persen, faktor utamanya adalah penduduk yang berusia lanjut, di atas 60-70 tahun. Dalam jangka pendek hal ini memang terlihat sangat menyulitkan pemerintah daerah untuk menghapus buta huruf di Kabupaten Purwakarta. Tetapi dalam jangka panjang diharapkan persoalan buta huruf di Kabupaten Purwakarta bisa terselesaikan dengan baik.

#### 4.1.1.3. *Drop Out* / Putus Sekolah masih cukup tinggi untuk SLTP dan SLTA

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci pembangunan sumber daya manusia. Semakin tinggi pendidikan di suatu daerah maka semakin baik potensi sumber daya manusianya. Tidak semua peserta didik di Kabupaten Purwakarta dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Baik dari SD ke SMP ataupun dari SMP ke SMA/SMK.

Pada tahun 2008 dapat dilihat jumlah peserta didik dari SD tidak melanjutkan ke SMP sebanyak 580 orang, hal ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 2007 sebanyak 299 orang dan peserta didik dari SMP tidak melanjutkan ke SMA/SMK sebanyak 2.190 orang. (Data Makro Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Purwakarta Tahun 2011, h. 13).

Sementara tahun 2010, jumlah siswa/siswi lulusan SMP/MTs di Kabupaten Purwakarta sebanyak 13.235 yang berasal dari lulusan SMP 10.604 dan MTS 2.631. Sedangkan siswa yang dipastikan diterima di SMA sebanyak 4.032 dan SMK 6.377 siswa serta MA sebanyak 469. Jadi terdapat selisih antara jumlah lulusan SMP/MTS dengan yang melanjutkan ke SMA/SMK/MA sebanyak 2.543 siswa. (pikiran rakyat online dan poskota online edisi Rabu, 14 Juli 2010).

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta lebih lanjut menambahkan permasalahan pendidikan di Purwakarta, terutama di Desa Rawasari Kecamatan Plered dan Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta :

“Khususnya untuk di Desa Rawasari Kecamatan Plered, *pertama* banyak anak-anak yang belum saat menikah mereka menikah, *kedua* yang harusnya dibangku sekolah mereka harus keluar, karena ekonomi mereka buruh upah pabrik genteng sehingga anak-anak dituntut untuk ikut berusaha membantu ekonomi keluarga. Sedangkan di Nagri Kaler, dengan berkembangnya industri, ketika terjadinya kebangkrutan pada perusahaan, mereka juga ikut pindah pada akhirnya memberikan kontribusi angka *drop out* di Purwakarta”. (PD, 8 Mei 2012).

Sementara Lurah Rawasari berpendapat bahwa angka putus sekolah di Rawasari memang ada, tetapi hal tersebut sekarang sudah tidak banyak, perkembangan pendidikan di Rawasari pun sudah lumayan cukup baik dibanding

beberapa tahun ke belakang. Hal ini tak lepas dari keseriusan aparat desa dalam mengkampanyekan betapa pentingnya pendidikan :

“Putus sekolah sekarang tidak banyak, salah satunya nikah karena hamil. Itu memang ada. Tidak kami pungkiri. Sekarang perkembangannya sudah jauh sekali, sudah berkurang”. (N, 8 Mei 2012).

Menanggapi permasalahan *drop out* atau putus sekolah yang terjadi Kabupaten Purwakarta, Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta beralasan :

“Ada angka-angka yang tidak termasuk di dalamnya, misalnya keluaran SMP jumlahnya sekian orang, ketika di SMA jumlahnya berkurang. Asumsinya anak tidak melanjutkan sekolah, tetapi tidak demikian halnya. Bisa jadi yang bersangkutan pindah, melanjutkan ke ponpes atau lainnya yang tidak bisa terdeteksi oleh kita. Tidak dipungkiri juga ada yang putus tidak melanjutkan karena bekerja”. (ZR, 8 Mei 2012).

Meski angka *drop out* atau putus sekolah tidak menjadi salah satu indikator bagi pengukuran pembangunan manusia dalam bidang pendidikan, tetapi angka *drop out* atau putus sekolah memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi angka rata-rata lama sekolah sebagai salah satu indikator bagi pengukuran pembangunan manusia dalam bidang pendidikan. Ada keterkaitan yang sangat kuat antara angka *drop out* atau putus sekolah dengan angka rata-rata lama sekolah.

#### **4.1.2. Kebijakan Pendidikan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purwakarta**

##### **4.1.2.1. Kebijakan Umum dalam Bidang Pendidikan**

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Purwakarta diwujudkan dengan perluasan dan kemudahan akses pendidikan yang bermutu, murah dan mudah dijangkau pada semua jenjang pendidikan dimulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi, terutama bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil. Berbagai program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta setiap tahunnya terus ditingkatkan, baik dari segi infrastruktur bangunan, sarana dan prasarana belajar maupun peningkatan kesejahteraan guru terutama di daerah

terpencil, sehingga dapat meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. (LKPJ Bupati Purwakarta tahun 2011, h. IV-1)

Untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang ada di Kabupaten Purwakarta, ada beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

### **1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**

Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun merupakan kebijakan turunan dari pemerintah pusat. Dalam rangka memperluas kesempatan belajar pendidikan dasar, maka pemerintah pusat mencanangkan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Hal tersebut merupakan upaya lanjutan dalam peningkatan pendidikan wajib belajar enam tahun yang telah dicanangkan sebelumnya.

Dalam upaya menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Bupati Purwakarta mempunyai keinginan untuk menyederhanakan pendidikan yang sudah ada, dengan penyatuan antara SD dan SMP sehingga menjadi pendidikan dasar sembilan tahun.

“...mencoba melakukan langkah-langkah penyederhanaan, walau pun ini agak berat karena sudah menjadi salah satu kebijakan pemerintah pusat, ...menyederhanakan pendidikan. Sekolah SD-SMP disatukan menjadi pendidikan dasar sembilan tahun”. (DM, 24 April 2012).

Sementara itu, seolah menegaskan penjelasan Bupati, Kepala Bappeda Kabupaten Purwakarta berpendapat sama ketika diwawancarai, setidaknya untuk program wajib belajar sembilan tahun cukup melanjutkan naik kelas tanpa perlu ada ujian akhir di kelas enam SD.

“Saya sangat sependapat jika tidak ada ujian di kelas enam SD jika ada pencanangan wajib belajar sembilan tahun, cukup di kelas sembilan (kelas tiga SMP) saja. Buat apa jika harus lulus dulu di SD kemudian hal ini menjadi problem tersendiri bagi orang tua karena dibutuhkan biaya lagi untuk mencari-cari sekolah lanjutan?”. (TH, 16 April 2012)

Senada dengan hal tersebut, anggota DPRD Komisi 4 Bidang Pendidikan pun mengatakan hal yang sama saat dimintai pendapatnya, seharusnya pendidikan dasar sembilan tahun tanpa ada sekat atau pemisahan antara SD (enam tahun) dan SMP (tiga tahun).

“Program pendidikan dasar sembilan tahun, seharusnya tanpa sekat. Artinya, tanpa ada pemisahan enam tahun (SD) dan tiga tahun (SMP)”. (ES, 26 April 2012).

## 2) Kebijakan Pendidikan SD-SMP Terpadu Satu Atap

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta mengatakan ada kebijakan mendekatkan sarana pendidikan ke masyarakat, membuat sekolah SD-SMP satu atap di mana letaknya masih dalam satu kompleks sekolah yang sama dan hal ini untuk mengatasi angka *drop out* atau putus sekolah di mana masyarakat tidak bisa melanjutkan sekolah karena sekolah lanjutan yang letaknya jauh dari domisili serta menjawab program wajib belajar sembilan tahun.

“Di Kabupaten Purwakarta, di luar Desa Rawasari dan Kelurahan Nagri Kaler, ada tiga kecamatan yang terisolir, yaitu Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukatani dan Kecamatan Maniis. Salah satunya mereka yang tidak bisa melanjutkan sekolah yang domisilinya jauh. Untuk hal ini dibuat kebijakan untuk mendekatkan sekolah ke masyarakat. Ada sekolah SD-SMP terpadu satu atap”. (PD, 8 Mei 2012).

Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta mengungkapkan lebih jauh :

“Untuk yang wajar sembilan tahun tidak boleh ada yang terputus dari SD ke SMP. Sehingga ada SMP terpadu untuk mendekatkan akses pendidikan agar tidak terputus. Tidak ada alasan bagi orang tua terkait jauhnya jarak sekolah, ongkos dan sebagainya”. (ZR, 8 Mei 2012).

## 3) Kebijakan Pendidikan Gratis

Sementara untuk kebijakan pendidikan gratis, dana yang dialokasikan untuk kegiatan pendidikan gratis bersumber dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), baik yang digulirkan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi,

maupun pemerintah daerah (kabupaten). Sementara ini alokasi dana bantuan untuk pendidikan gratis hanya diperuntukan pada tingkat SD dan SMP saja.

“Kebijakan pendidikan gratis, sudah dicanangkan sejak beberapa tahun lalu”. (ZM, Lurah Nagri Kaler, 17 April 2012).

Kebijakan Pendidikan di Purwakarta... Pendidikan gratis, biaya operasional sudah ditanggung oleh pemerintah melalui dana BOS, mulai dari SD dan SMP...”. (YS, Tokoh Masyarakat Nagri Kaler, 9 Mei 2012).

“Dari segi kebijakan saat ini, ada dana BOS untuk pendidikan secara gratis”. (SJ, Tokoh Masyarakat Nagri Kaler, 27 April 2012).

Pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta bahkan telah mengeluarkan kebijakan kartu multiguna untuk masyarakat yang tidak mampu untuk bisa mengakses pelayanan dasar gratis di Purwakarta, termasuk pendidikan dan kesehatan.

“Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan kartu multiguna bagi penduduk yang tidak mampu, artinya tidak ada alasan lagi bagi anak-anak yang tidak mampu dalam melanjutkan pendidikannya”. (PD, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, 8 Mei 2012).

Meski demikian, kebijakan pendidikan gratis disini tidak serta merta semua kegiatan pendidikan dibiayai oleh dana BOS, ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang tidak dibiayai dari dana BOS tersebut. Untuk kegiatan yang dibiayai dana BOS sebut saja biaya SPP, ini memang sudah digratiskan oleh pemerintah. Artinya masyarakat atau dalam hal ini orang tua siswa tidak lagi dikenakan pembayaran untuk SPP tersebut. Sementara untuk kegiatan penunjang seperti ekstrakurikuler dan pengadaan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar yang tidak dibiayai oleh pemerintah, biasanya pihak sekolah bersama komite sekolah merumuskan dan merembukkan hal tersebut hingga mencapai kesepakatan bersama dan pada akhirnya dana tersebut dilimpahkan kepada masyarakat atau orang tua siswa untuk ditanggung secara bersama-sama.

Dari uraian tersebut di atas, sebenarnya kebijakan umum dalam bidang pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta satu sama lain saling berkaitan. Kebijakan wajib belajar sembilan tahun agar

penyelenggaraan dapat berjalan secara baik maka didukung oleh penyediaan sarana pendidikan yang memadai, salah satunya membuat kebijakan pendidikan SD-SMP terpadu satu atap di mana gedung sekolah SD-SMP didirikan di lokasi yang sama utamanya di daerah-daerah minim transportasi umum sehingga siswa setelah lulus dari SD bisa melanjutkan ke SMP di lokasi yang sama tanpa harus mengeluarkan biaya untuk ongkos dikarenakan lokasi sekolah yang jauh dari domisilinya. Kemudian kebijakan wajib belajar sembilan tahun juga didukung oleh kebijakan pendidikan gratis yang diperuntukkan bagi siswa SD dan SMP dengan menggunakan dana BOS yang alokasi anggarannya bersumber dari APBN pemerintah pusat maupun APBD pemerintah daerah.

Program pendidikan tidak mungkin akan berjalan dengan baik tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai. Pada tahun 2009 di Kabupaten Purwakarta terdapat 642 sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Umum (SMU), baik negeri maupun swasta dengan jumlah murid 163.579 orang.

Jika dilihat secara umum, keadaan tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008 terlihat jumlah sekolah menurun sebesar 1,98 persen dan jumlah murid meningkat sebesar 0,66 persen. Sedangkan jumlah guru meningkat menjadi 11,97 persen. (BPS Purwakarta, Purwakarta Dalam Angka 2010, h. 51).

Untuk lebih jelasnya terkait jumlah sekolah, murid dan guru di Kabupaten Purwakarta tahun 2009 dapat diperhatikan pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1  
Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru menurut Tingkat Pendidikan  
dan Status Sekolah di Kabupaten Purwakarta  
Tahun 2009

Tingkat Pendidikan	Sekolah			Murid			Guru		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
TK	3	95	98	113	4.011	4.124	33	467	500
SD	429	8	437	102.498	2.492	104.990	5.394	132	5.526
SLTP	58	7	65	3.1621	1.234	32.855	1.422	100	1.522
SMU	14	7	21	8.142	1.676	9.818	479	160	639
SMK	5	16	21	4.753	7.039	11.792	292	516	808
Jumlah	509	133	642	147.127	16.452	163.579	7.620	1.375	8.995
Tahun 2008	520	135	655	147.894	14.612	162.506	6.718	1.315	8.033
Tahun 2007	509	121	630	144.907	14.761	159.668	6.606	718	7.324

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam BPS, Purwakarta Dalam Angka tahun 2010, h. 57

Dari Data tersebut dapat dikatakan bahwa penyediaan sarana kelas dan guru sudah cukup baik, yang harus dikembangkan adalah kualitas guru maupun prasarana sekolah agar dapat menjamin mutu pendidikan yang lebih baik. Yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah adalah *distribusi sekolah serta tenaga pendidik yang kurang merata antar kecamatan*. Saat ini masih terkonsentrasi di perkotaan. Hal ini yang menyebabkan adanya kesenjangan tingkat pendidikan di Kabupaten Purwakarta, terutama antara masyarakat yang berada pada perkotaan dan pedesaan.

#### **4.1.2.2. Kebijakan Lokal dalam Bidang Pendidikan**

Pembangunan Aspek Pendidikan di Kabupaten Purwakarta diarahkan pada pembentukan watak dan kepribadian yang berbasis religi dan penguatan nilai-nilai lokal (*local value*) untuk mengembangkan sumber daya manusia. Hal ini merupakan upaya optimalisasi potensi humanistik yang melekat pada diri setiap manusia, sehingga sektor pendidikan mampu mengembangkan potensi sumber daya manusia yang paripurna, yaitu manusia yang unggul secara intelektual, emosional dan spiritual atau unggul secara kognitif, afektif serta psikomotorik sehingga sesuai dengan tata nilai : *cageur, bageur, bener, pinter jeung singer*. (RKPD Kabupaten Purwakarta, Bappeda, 2011, h. II-5). Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta pun memiliki kebijakan lokal dalam bidang pendidikan.

##### **1) Program Kurikulum Baca Tulis Al Qur'an (BTQ)**

Kebijakan lokal dari pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh Bupati dalam bidang pendidikan diantaranya adalah Program Baca Tulis Al Qur'an (BTQ). Program ini diluncurkan oleh Bupati Purwakarta pada tahun 2011. Kepala Bappeda Kabupaten Purwakarta berpendapat bahwa hal ini sangat baik terhadap kualitas moral bangsa melalui pendidikan agama :

“Kebijakan lokal dari pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh Bupati Purwakarta dalam bidang pendidikan yang diatur melalui peraturan bupati (perbup) diantaranya kebijakan anak sekolah di SD sudah memiliki sertifikat Baca Tulis Qur'an (BTQ), hal ini sangat baik terhadap kualitas

pendidikan moral bangsa melalui pendidikan agama..”. (TH, 16 April 2012)

Sementara itu, terkait dengan kebijakan BTQ Bupati Purwakarta berpandangan bahwa :

“Baca Qur’an merupakan bagian dari ritual untuk membangun komunikasi intelektual dan spiritual manusia dengan pembelajarannya pada akhirnya menjadi komunikasi dengan Tuhannya. Sehingga hal itu disebut dengan persenyawaan kehidupan”. (DM, 24 April 2012).

Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta pun menyetujui kebijakan lokal bidang pendidikan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah, berikut pendapatnya saat diwawancarai :

“Bagus sekali, Pak Bupati menggiring ke arah yang religi. *Attitude* yang diinginkan. Saya setuju. Bukan hanya sekedar formal, pembelajaran agama dan sebagainya tetapi diisi dengan memaknai Al Qur’an itu sendiri, dimulai dengan membaca Al Qur’an terbata-bata, membaca Al Qur’an secara bisa, membaca Al Qur’an dengan artinya, mengartikannya dengan bagus. Sehingga bisa meng-*aplicated* di kehidupan sehari-hari”. (ZR, 8 Mei 2012).

Lebih lanjut, ketika hal ini ditanyakan kepada tokoh masyarakat di Kelurahan Nagri Kaler, mereka juga mengatakan hal yang sama. Berikut kutipan wawancara dari beberapa orang tokoh masyarakat di Nagri Kaler :

“Kebijakan Pendidikan di Purwakarta sebagai penguatan ada kurikulum BTQ”. (YS, 9 Mei 2012).

“Peningkatan budi pekerti anak, membaca tulis Al Qur’an sebagai kurikulum muatan lokal, digulirkan oleh Bupati, hal ini untuk mengantisipasi perilaku yang menyimpang saat ini, seperti tawuran”. (KW, 25 April 2012).

Demikian halnya dengan tokoh masyarakat Rawasari, berpendapat yang sama ketika diwawancarai :

“Kebijakaan pendidikan di Purwakarta, terutama di Rawasari, ... kebijakan BTQ sangat terasa manfaatnya, selain belajar ilmu umum, mereka juga bisa belajar ilmu agama”. (AB, 10 Mei 2012).

## 2) Kebijakan Pengaturan Jajanan Anak Sekolah

Selain program kurikulum Baca Tulis Al Qur'an (BTQ), kebijakan lokal dalam bidang pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah adalah kebijakan pengaturan jajanan anak sekolah, program ini baru diluncurkan pada awal tahun 2012. Dalam program ini anak-anak sekolah dianjurkan untuk membawa bekal makanan sehat dari rumah, bagi anak-anak yang tidak mampu cukup membawa rantang (wadah tempat makanan) yang kosong ke sekolah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Purwakarta saat diwawancarai :

“...kemudian kebijakan jajanan anak sekolah, anak sekolah tidak boleh jajan tetapi membawa bekal makanan sehat dari rumah. Bagi yang anak yang tidak mampu/miskin yang tidak punya apa-apa cukup membawa rantang kosong ke sekolah”. (TH, 16 April 2012)

Sementara itu, terkait dengan kebijakan pengaturan jajanan anak sekolah, Bupati Purwakarta berpandangan bahwa jika ingin melahirkan masyarakat yang sehat maka makanannya juga harus sehat dimana makanan tersebut dimasak oleh orang tua siswa, dalam hal ini ibunya, karena di dalamnya terkandung doa :

“...makanannya juga, kalau ingin melahirkan masyarakat yang sehat, sistem pendidikan yang sehat, maka makanan sekolahnya juga harus sehat. Makanannya harus penuh dengan nilai-nilai ritualitas, yaitu makanan yang dipersiapkan secara ikhlas, makanan yang dimasak oleh ibunya. Inilah konsepsi dasar dalam pembentukan karakter manusia, dan di sana ada doa”. (DM, 24 April 2012).

Ketika hal ini ditanyakan kepada tokoh masyarakat di Kelurahan Nagri Kaler, mereka juga mengatakan hal yang sama. Berikut kutipan wawancara dari beberapa orang tokoh masyarakat di Nagri Kaler :

“Kebijakan Pendidikan di Purwakarta sebagai penguatan ada ... program membawa bekal anak ke sekolah”. (YS, 9 Mei 2012).

“Kebijakan lainnya adalah makanan jajanan di sekolah. Dianjurkan agar orang tua menyiapkan bekal makanan untuk anaknya ke sekolah”. (KW, 25 April 2012).

Demikian halnya dengan tokoh masyarakat Rawasari, berpendapat yang sama ketika diwawancarai :

“Kebijakan pendidikan di Purwakarta, terutama di Rawasari, ...kebijakan membawa bekal makanan dari rumah, hal ini untuk menghindari makanan yang tidak sehat yang dijual oleh pedagang. Selain makan secara sehat, hal ini juga menghemat orang tua karena tidak jajan di luar”. (AB, 10 Mei 2012).

“Terkait kebijakan membawa bekal ke sekolah, karena jajanan banyak mengandung bahan kimia, terutama pewarna, orang tua pasti akan menyiapkan yang terbaik untuk anaknya, untuk menghindari hal tersebut dan anak tetap sehat”. (K, 10 Mei 2012).

Dari gambaran jawaban para informan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat juga mengetahui hal tersebut dengan cukup baik. Artinya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan, setidaknya diketahui oleh masyarakat dengan cukup baik. Tabel 4.2 berikut akan menjelaskan gambaran kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta, baik kebijakan umum bidang pendidikan maupun kebijakan lokal bidang pendidikan :

Tabel 4.2  
Kebijakan Pendidikan Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

<b>Kebijakan Umum Bidang Pendidikan</b>	<b>Kebijakan Lokal Bidang Pendidikan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b> Program turunan dari pemerintah pusat bahwa setiap anak usia sekolah harus sudah menyelesaikan pendidikan dasarnya selama sembilan tahun.</li> <li>- <b>Kebijakan Pendidikan SD-SMP Terpadu Satu Atap</b> Kebijakan untuk mendekatkan sarana sekolah SMP kepada masyarakat di daerah-daerah minim akses transportasi umum dengan mendirikan SMP satu lokasi dengan SD sehingga siswa setelah lulus SD bisa langsung melanjutkan ke SMP di lokasi yang sama.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Program Kurikulum BTQ</b> Program pengenalan dan pembiasaan baca tulis Al Qur'an sejak dini, hal ini sejalan dengan karakter budaya masyarakat Purwakarta yang mayoritas beragama Islam.</li> <li>- <b>Kebijakan Pengaturan Jajanan Anak Sekolah</b> Anak-anak dihimbau untuk membawa bekal makanan sehat dari rumah yang dipersiapkan oleh orang tuanya untuk menghindari resiko terhadap jajanan sekolah yang tidak sehat karena banyak mengandung bahan kimia berbahaya. Selain itu anak-anak dilatih jiwa sosialnya dengan saling berbagi bekal</li> </ul>

(Sambungan)

<p>- <b>Kebijakan Pendidikan Gratis</b>          Anggaran bersumber dari dana BOS yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, propinsi, maupun daerah. Kebijakan ini diperuntukan bagi siswa SD dan SMP.</p>	<p>makanan yang dibawanya dari rumah.</p>
--	---

Sumber : telah diolah kembali

## 4.2. Implementasi Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta

### 4.2.1. Kebijakan Umum dalam Bidang Pendidikan

#### 1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Untuk pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta secara umum, Bupati Purwakarta, mengatakan bahwa hal tersebut sudah dilaksanakan secara efektif. Bupati Purwakarta bahkan menyampaikan gagasannya dalam bidang pendidikan saat diwawancarai :

“Pelaksanaannya sudah berjalan sangat efektif. Cita-cita saya hari ini, *pertama* menyederhanakan pendidikan. Sekolah SD-SMP disatukan menjadi pendidikan dasar 9 tahun. *Kedua* menyederhanakan kurikulum.. Jika hal ini dilakukan, maka pendidikan akan murah, sederhana dan menyenangkan”. (DM, 24 April 2012).

Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Purwakarta berpendapat tidak perlu adanya pemisahan antara SD dan SMP, sehingga sebaiknya ujian akhir di kelas enam tidak perlu dilakukan hanya sebatas melanjutkan ke kelas selanjutnya yaitu kelas tujuh, delapan dan sembilan.

“Wajib belajar sembilan tahun harus dijalankan saja, cukup melanjutkan dari kelas enam ke kelas tujuh, delapan, sembilan tanpa ujian akhir di kelas enam. Meski hal ini mirip dengan konsep dari masyarakat Barat, kenapa tidak kita adopsi hal yang baik ini?” (TH, 16 April 2012)

Meski demikian, dilihat dari segi pelaksanaannya kebijakan program wajib belajar sembilan tahun di lapangan cenderung memiliki beberapa hal diantaranya program ini tidak bersifat paksaan melainkan hanya berupa persuasif atau ajakan semata meski ada kata-kata ‘wajib’ pada program tersebut sehingga tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak ikut serta melaksanakan program tersebut.

## 2) Kebijakan Pendidikan SD-SMP Terpadu Satu Atap

Kebijakan pendidikan SD-SMP terpadu satu atap pelaksanaannya terutama untuk masyarakat Kabupaten Purwakarta yang berada di wilayah pedesaan di mana akses menuju sarana pendidikan berupa sekolah lanjutan SMP lokasinya jauh berada di luar wilayah domisili masyarakat yang bersangkutan. Salah satu kecamatan yang letaknya masih terisolir karena minimnya sarana dan infrastruktur angkutan umum adalah Kecamatan Sukasari, terletak di seberang danau waduk Jatiluhur. Pemerintah daerah mendirikan SD-SMP terpadu satu atap di Kecamatan Sukasari, bahkan sudah ada empat sekolah terpadu satu atap.

“Contohnya di Sukasari ada empat sekolah yang didekatkan ke masyarakat, SD-SMP satu atap. Alasannya karena kendala jarak jauh tersebut, sehingga Pak Bupati mendekatkan sekolahnya untuk menjawab wajib belajar sembilan tahun”. (PD, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, 8 Mei 2012).

Selain itu, di Desa Rawasari pun demikian. Meski dana yang dialokasikan untuk pembangunan sekolah terpadu satu atap, di Desa Rawasari SMPN yang didirikan lokasinya berbeda dengan SDN Rawasari. Lokasinya tidak terlalu jauh dari SDN Rawasari, tepatnya berada di sebelah kantor Desa Rawasari. Perintisan akan SMP di Desa Rawasari sudah dilakukan selama 4 tahun, sejak tahun 2007 yang dimulai dengan SMP kelas jauh, lalu SMP terpadu satu atap yang berlokasi sama di SD (menumpang pada SD), hingga saat ini berdiri sendiri di lokasi yang berbeda dekat dengan SD.

“...dengan dibangunnya SMP satu atap di Rawasari. Pemerintah berusaha mendekatkan sekolah ke masyarakat. Sudah berjalan selama 4 tahun, tahun ini baru akan meluluskan angkatan ke-dua”. (AB, Tokoh Masyarakat Rawasari, 10 Mei 2012).

Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Komisi 4 Bidang Pendidikan bahkan mengatakan bahwa SD-SMP satu atap mungkin hanya baru ada di Kabupaten Purwakarta saja sebagai terobosan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Purwakarta.

“Sekolah SD-SMP satu atap mungkin hanya ada di Purwakarta saja, sebagai terobosan pemerintah daerah Purwakarta, program Bupati Purwakarta..”. (ES, 26 April 2012).

Dari hasil gambaran jawaban informan dapat diketahui bahwa pada dasarnya pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta sudah sangat peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerahnya, di mana hal ini telah dilaksanakannya suatu terobosan baru dengan mendirikan bangunan SD-SMP terpadu satu atap dalam satu kompleks yang sama sehingga hal ini bisa mendekatkan sarana sekolah kepada masyarakat terutama di wilayah pedesaan.

### **3) Kebijakan Pendidikan Gratis**

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta menjelaskan pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, yang dibiayai baik dari pusat, propinsi, maupun kabupaten/kota sudah tidak ada kendala:

“Pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis masih tetap gratis, sudah tidak ada kendala. Untuk SD-SMP seperti buku dan lain-lain sudah dibiayai oleh dana BOS. Sarana pembangunan sudah dibiayai oleh pemerintah, baik dari pusat, propinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintah juga membuat aturan bahwa tidak diperbolehkan sekolah menjual buku dan LKS, kecuali yang sudah diprogramkan oleh pusat dengan anggaran dari dana BOS”. (PD, 8 Mei 2012).

Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Purwakarta mengatakan ada pengecualian pada pelaksanaan pendidikan gratis, di mana hal ini diaturnya kesepakatan antara komite sekolah dengan pihak sekolah untuk menanggulangi dana-dana yang tidak ditanggulangi oleh pemerintah :

“Pendidikan dasar sudah gratis dan tidak dipungut biaya. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan, ternyata kebijakan tersebut ada kesepakatan antara komite sekolah dengan pihak sekolah untuk menanggulangi dana-dana yang tidak ditanggulangi oleh pemerintah. Baik dana pemerintah daerah maupun dana dari pemerintah pusat”. (TH, 16 April 2012).



Gambar 4.1  
Spanduk Pendidikan Gratis Bagi Seluruh Siswa di SDN 12, 13, 14 Nagri Kaler

Sumber : dokumentasi pribadi, 2012

Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Komisi 4 Bidang Pendidikan mengungkapkan bahwa realita di lapangan terkait pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis sejatinya tidak mendidik masyarakat untuk berpikir, karena anggapan masyarakat ketika dikatakan pendidikan gratis hal tersebut sudah mencakup keseluruhan kegiatan pendidikan di sekolah.

“Ketika kebijakan pendidikan gratis dengan pembiayaan dari dana BOS dikeluarkan, terutama untuk SPP, seolah-olah ini meringankan orang tua, tetapi hal ini menyebabkan tidak mendidik masyarakat berpikir. Ketika ada pembiayaan di luar pembiayaan dana BOS, seperti kegiatan ekstrakurikuler, dianggap sebagai pungutan. Padahal hal ini wajar adanya. Pun untuk penyediaan sarana belajar, seperti kursi, dan lain sebagainya”. (ES, 26 April 2012).

#### 4.2.2. Kebijakan Lokal dalam Bidang Pendidikan

##### 1) Program Kurikulum Baca Tulis Al Qur’an (BTQ)

Terkait pelaksanaan kebijakan BTQ, Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta mengatakan hal ini memang belum maksimal karena masih berproses.

“Meski demikian masih belum maksimal, ini masih berproses. Baru dicanangkan tahun lalu. Karena ini dimaknai sebatas pelaksanaan

kurikulum, padahal sejatinya tidak seperti itu. Dijadikan *habits* atau kebiasaan. Harapannya seperti itu. Tenaga pengajarnya bisa siapa saja yang ada pada sekolah tersebut, tidak harus guru agama. Sebaiknya tidak secara parsial dalam memahami kebijakan tersebut”. (ZR, 8 Mei 2012)

Ketika hal ini ditanyakan kepada tokoh masyarakat di Nagri Kaler, mereka berpendapat bahwa pelaksanaan sudah cukup baik, meski pada awalnya ada resistensi dari masyarakat tetapi pada akhirnya masyarakat memahami kebijakan tersebut dan mendukungnya.

“Kebijakan tersebut, sangat membantu masyarakat. Seperti BTQ, awalnya kontradiksi, ada anggapan masyarakat bahwa sudah ada sekolah agama, sudah ada pendidikan agama. Padahal ini untuk penguatan, minimal ada *support* bagi guru untuk membiasakan siswanya untuk baca Qur’an. Minimal membaca surat-surat pendek. Pada akhirnya orang tua sangat menyambut baik kebijakan ini”. (YS, 9 Mei 2012).

Demikian pula halnya untuk program kurikulum BTQ di Desa Rawasari, pelaksanaannya sudah cukup baik.

“Pelaksanaannya untuk BTQ dilaksanakan sebelum jam masuk sekolah, diawali dengan membaca surat-surat pendek”. (AB, 10 Mei 2012).

## 2) Kebijakan Pengaturan Jajanan Anak Sekolah

Kepala Bappeda Kabupaten Purwakarta mengemukakan pendapatnya terkait pelaksanaan kebijakan lokal Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam bidang pendidikan, terutama kebijakan jajanan anak sekolah dengan membawa bekal makanan dari rumah. Di lapangan, pelaksanaannya tidak mudah. Terutama bagi anak yang tidak mampu.

“Kebijakan tentang membawa rantang baru digulirkan tahun ini. Hal ini merupakan sesuatu yang positif. Bagi yang anak yang tidak mampu/miskin yang tidak punya apa-apa cukup membawa rantang kosong ke sekolah. Meski demikian, pelaksanaannya di lapangan tidaklah mudah. Misalnya, di lingkungan kelas, yang miskinnya lebih banyak, seperti di pedesaan, menjadi problem tersendiri, karena lebih banyak yang membawa rantang

kosong ketimbang rantang isi. Perlu ada pengembangan sosialisasi pada pelaksanaannya”. (TH, 16 April 2012).

Program pengaturan jajanan anak sekolah dengan membawa bekal makanan sehat dari rumah pelaksanaan sudah cukup baik, meski pada awalnya ada resistensi dari masyarakat tetapi pada akhirnya masyarakat memahami kebijakan tersebut dan mendukungnya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh tokoh masyarakat Nagri Kaler sebagai berikut :

“Program rantangan pun demikian, awalnya dirasakan berat oleh orang tua, tetapi kemudian justru hal ini menjadi pengkondisian bagi anak-anak yang susah untuk sarapan pagi. Selain itu hal ini bisa memupuk jiwa sosial anak, saling berbagi antar mereka dengan saling tukar bekal yang mereka bawa dari rumah”. (YS, 9 Mei 2012).

Begitu pun halnya yang terjadi di Rawasari, pelaksanaannya sudah berjalan cukup baik, meski demikian masih belum optimal dalam pelaksanaannya.

“Untuk kebijakan membawa bekal ke sekolah, belum semua melaksanakan. Masih ikut dengan kebiasaan lama, jajan di sekolah. Di Rawasari, karena keterbatasan masyarakat bukan membawa rantang sebagai wadah makanan, tetapi membawa *timbel* yang dibungkus daun pisang, satu kali pakai dan langsung buang”. (AB, 10 Mei 2012).

Dari hasil gambaran kutipan-kutipan wawancara tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta sebenarnya sudah dapat dikatakan cukup baik. Meski demikian, masih terdapat beberapa kendala di lapangan. Salah satunya adalah pemahaman masyarakat yang masih agak kurang terhadap kebijakan pendidikan itu sendiri. Oleh karenanya diperlukan pengembangan sosialisasi secara terus menerus.

#### **4.2.3. Penilaian Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta**

Setiap kebijakan, apa pun, termasuk kebijakan pendidikan, tentunya perlu dievaluasi. Hal ini bertujuan untuk perbaikan-perbaikan kebijakan atau program yang ada di masa selanjutnya. Terkait mekanisme evaluasi kebijakan pendidikan, Kepala Bappeda Kabupaten Purwakarta berpendapat sebagai berikut :

“Di Bappeda sendiri, ada monitoring dan evaluasi. Lebih pada bagaimana mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, kegiatan dalam satu tahun anggaran. Tidak sampai mengevaluasi bagaimana pelaksanaan pendidikan secara *detail* di sekolah, itu wilayahnya dinas pendidikan”. (TH, 16 April 2012).

Sementara saat hal ini ditanyakan kepada pihak dinas pendidikan, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta mengatakan bahwa evaluasi kebijakan pendidikan mekanismenya dilakukan secara bersama-sama, sementara untuk program yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan dilakukan secara internal melalui kepanjangan tangan mereka di lapangan.

“Untuk evaluasi dilakukan secara bersama-sama, termasuk Pak Bupati. Tiap pekan, sebanyak tiga kali, Pak Bupati melakukan kegiatan *gempungan*, semua terkontrol kegiatan-kegiatan yang digulirkan. Untuk program-program yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan, kami memiliki UPTD, pengawas, kepala sekolah, kami sendiri melakukan rapat-rapat, setidaknya bisa merekam apa yang terjadi di wilayah masing-masing”. (PD, 8 Mei 2012).

Lebih lanjut Bupati Purwakarta mengemukakan pendapatnya mengenai mekanisme evaluasi, dikatakan bahwa setiap tahun dilakukan evaluasi terhadap pendidikan. Keberhasilan program pendidikan dapat diukur melalui beberapa hal :

“Dalam setiap tahun kita melakukan evaluasi. Budi pekerti diukur saja anak-anak itu bagaimana *sih* tingkat jajannya di sekolah, meningkat atau menurun? Tawurannya, meningkat atau menurun? Nilai-nilai kenakalan lainnya, meningkat atau menurun? Tingkat kebersihannya di sekolah, meningkat atau menurun? Disitulah esensi pendidikan, bukan pada UAN saja”. (DM, 24 April 2012).

Kemudian Bupati Purwakarta mengatakan bahwa masyarakat yang mengevaluasinya. Karena masyarakat yang bersentuhan langsung di lapangan. Sementara untuk kebijakan yang menyangkut aspek formal dilakukan oleh guru.

“Yang mengevaluasi masyarakat. Masyarakat akan merasakan anaknya disekolahkan, mengalami peningkatan kualitas atau tidak. Kalau untuk aspek-aspek regulasi formal dilakukan oleh guru. Secara umum

masyarakat yang melakukan evaluasi, apakah pendidikan ini berhasil atau tidak”. (DM, 24 April 2012).

Dari gambaran jawaban informan tersebut di atas terlihat bahwa sesungguhnya masyarakat yang dapat merasakan langsung dampak atau manfaat terkait bidang pendidikan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah, oleh karenanya masyarakat yang menilai langsung terkait keberhasilan program pendidikan tersebut. Sementara terkait dengan program kegiatan pendidikan yang bersifat formal, penilaiannya dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah sebagai bukti pertanggungjawaban akuntabilitas publik. Meski hal ini hanya baru sekedar pada penyerapan anggaran pada kegiatan atau program bidang pendidikan.

#### **4.2.4. Keterlibatan DPRD dalam Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta**

##### **4.2.4.1. Hak Budget DPRD**

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, setidaknya hal ini memerlukan persetujuan dewan, sebagai representasi perwakilan masyarakat di parlemen. Begitu pula halnya dengan yang terjadi di Kabupaten Purwakarta. Terkait dengan kebijakan pendidikan, Bupati Purwakarta menjelaskan keterlibatan DPRD sebagai berikut :

“DPRD kan ada dua kebijakan, *pertama* budget, bersama-sama menyusun anggaran pendidikan...”. (DM, 24 April 2012).

Menegaskan pernyataan Bupati terkait keterlibatan DPRD dalam kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta berpendapat :

“DPRD, ketika kami membuat satu perencanaan, lalu diekspos, Pak Bupati menyetujui, lalu menyusun anggaran, biasanya DPRD mempertanyakan rancangan tersebut, *ouputnya* mau seperti apa? jika mereka memahami mereka akan meng-*acc* tetapi jika tidak maka akan meng-*cut* anggaran tersebut. Keterlibatan langsung dari DPRD lebih cenderung kepada merespon, merekomendasikan anggaran yang diusulkan”. (PD, 8 Mei 2012).

Lebih lanjut, Kepala Bappeda Kabupaten Purwakarta menjelaskan lebih detail tentang keterlibatan DPRD dalam kebijakan pembangunan daerah, termasuk di dalamnya bidang pendidikan :

“...Mulai dari kebijakan umum 5 tahunan, setiap tahunnya kebijakan umum anggaran juga dievaluasi dan selalu dikomunikasikan, tentunya dalam penyusunan APBD sebagai implementasi tahunan untuk pelaksanaan kegiatan satu tahun Hak Budget ada di anggota dewan, disetujui bagaimana kebijakan itu”. (TH, 16 April 2012).

Sesungguhnya apa yang disampaikan tersebut di atas pada dasarnya sejalan dan tidak bertentangan. Ketika ditanya pendapatnya tentang koordinasi yang terjalin selama ini antara pihak eksekutif dan pihak legislatif, Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Komisi 4 Bidang Pendidikan mengatakan sebagai berikut :

“*Alhamdulillah*, di Kabupaten Purwakarta, antara eksekutif dan legislatif hubungannya berjalan dengan sangat baik. Dalam rangka menentukan anggaran dan lain sebagainya hal itu tak lepas dari koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD”. (ES, 26 April 2012).

Dari gambaran hasil kutipan-kutipan wawancara tersebut di atas terlihat bahwa keterlibatan DPRD dalam setiap kebijakan pembangunan daerah, termasuk di dalamnya pendidikan memang telah berjalan dengan baik. Artinya, pihak eksekutif selalu berkoordinasi dan berkomunikasi secara baik dengan pihak legislatif dalam menentukan sebuah kebijakan di Purwakarta. Terutama terkait dengan anggaran yang pembiayaannya bersumber pada APBD, hak budget sepenuhnya berada pada DPRD dalam menyetujui usulan yang diajukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, dengan adanya keterlibatan DPRD khususnya dalam penggunaan hak budget, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Digunakan sebagai persetujuan (*approval*) pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran kegiatan yang bersumber dari APBD dan bertujuan untuk memperoleh legitimasi dan legalitas yang kuat terhadap kebijakan yang dikeluarkan tersebut

2. Terkait penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan telah mendapatkan persetujuan DPRD, hal ini bertujuan sebagai akuntabilitas publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Digunakan untuk menaikkan anggaran belanja pemerintah daerah dari tahun ke tahun, sebagai contoh hal ini bisa dilihat pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3  
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2009-2010

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Proporsi	Belanja Langsung	Proporsi
2009	506.774.144.557	67,66%	242.242.593.719	32,34%
2010	607.991.238.004	68,75%	276.379.303.268	31,25%

Sumber : DPKAD Kabupaten Purwakarta, Tahun 2010. Diambil dari LKPJ Bupati tahun 2010, h. III-13

#### 4.2.4.2. Hak Pengawasan DPRD

Selain hak budget, anggota DPRD memiliki hak pengawasan dalam keterlibatannya pada kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk bidang pendidikan. Lebih lanjut, Bupati Purwakarta mengatakan bahwa DPRD juga memiliki kewenangan untuk mengawasi regulasi pendidikan yang ada di Purwakarta sebagaimana terungkap pada kutipan wawancara berikut :

“DPRD kan ada dua kebijakan, ..., yang *kedua* pengawasan, mereka juga memiliki kewenangan untuk mengawasi bagaimana regulasi pendidikan yang ada di Purwakarta, bagaimana pertumbuhan sekolah, bagaimana perkembangan kreatifitas siswa, DPRD secara politik dan administratif bisa melakukan evaluasi secara menyeluruh”. (DM, 24 April 2012).

Kepala Bappeda Kabupaten Purwakarta pun mengatakan hal yang sama di mana DPRD memiliki hak pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang telah disepakati sebelumnya antara pemerintah daerah dan DPRD.

“...Kemudian DPRD mempunyai hak pengawasan, apa yang sudah disepakati itu, implementasinya di lapangan seperti apa...”. (TH, 16 April 2012).

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan mengakui bahwa sering dipanggil untuk menemui DPRD memberikan penjelasan terkait dengan program-program yang dikembangkan oleh dinas pendidikan.

“...Sering pula kami dipanggil, baik secara kelembagaan dinas atau pun per-bidang, terkait dengan program-program yang dikembangkan oleh dinas pendidikan... DPRD melaksanakan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan”. (PD, 8 Mei 2012).

Ketika dikonfirmasi langsung, Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, Komisi 4 Bidang Pendidikan berpendapat :

“Bagi kami selaku anggota dewan, ketika sudah diprogramkan kami serahkan sepenuhnya ke pihak eksekutif. Kami hanya sekedar pengawasan, teknisnya diserahkan kepada eksekutif”. (ES, 26 April 2012).

Ketika dimintai pendapatnya tentang mekanisme anggota DPRD dalam menjangkau aspirasi masyarakat serta komunikasi yang dilakukan dengan masyarakat terkait bidang pendidikan, Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Komisi 4 Bidang Pendidikan menjelaskan sebagai berikut :

“Di DPRD, masing-masing anggota dewan memiliki *leading sector*, saya sendiri dalam bidang pendidikan. Ketika ada permasalahan pendidikan, saya sebagai *leading sector* pendidikan selalu turun ke lapangan/masyarakat langsung. Misalnya, kemarin saya melakukan kunjungan kerja pemantauan kegiatan UN di Kecamatan Bojong dan Kecamatan Darangdan. Ketika ada permasalahan lain di luar pendidikan, kami tetap menampung aspirasi dan keluhan masyarakat, kemudian nanti dibicarakan di tingkat komisi”. (ES, 26 April 2012).

Dari jawaban tersebut terlihat bahwa, sebagai anggota dewan dan merupakan perwakilan masyarakat di parlemen, anggota dewan juga memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat sebagai konstituennya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat serta mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sampai berhasil. Fungsi pengawasan yang ada pada DPRD juga bertujuan untuk :

1. Mengusung agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2. Meminimalisir adanya penyelewangan terkait penggunaan anggaran karena DPRD setiap saat bisa memanggil pelaksana program untuk dimintai keterangannya.
3. Apabila ditemui kekurangan pada pelaksanaan kebijakan maka dapat diperbaiki saat itu atau di masa selanjutnya.

#### **4.2.5. Keterlibatan Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta**

##### **4.2.5.1. Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan**

Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam sebuah kebijakan sangat diperlukan, selain digunakan sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan serta sikap persepsi masyarakat di lapangan, hal ini bertujuan agar masyarakat merasa memiliki program atau kegiatan yang dilakukan tersebut sehingga dapat diharapkan program atau kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik tanpa menemui kegagalan.

Dalam kegiatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Purwakarta, termasuk di dalamnya bidang pendidikan, partisipasi masyarakat dilakukan melalui kegiatan *minggon* desa/kelurahan, kemudian dilanjutkan pada musrenbang tingkat desa/kelurahan, kemudian dibawa ke tingkat kecamatan dan pada akhirnya ke tingkat kabupaten.

“Penyampaian aspirasi masyarakat disampaikan melalui kegiatan *minggon* desa. Mulai dari RT, RW, Bamus Desa. Musrenbang tingkat desa. Dari desa kemudian dilanjutkan ke musrenbang tingkat kecamatan”. (N, Lurah Rawasari, 10 Mei 2012).

“Di kami ada musrenbang, ada kegiatan *minggon* tingkat kelurahan, membahas tentang apa-apa yang akan dibangun baik fisik maupun non fisik, termasuk pembangunan pendidikan. Dari kelurahan dibawa ke tingkat kecamatan. Kemudian dibawa lagi ke tingkat kabupaten”. (SJ, Tokoh Masyarakat Nagri Kaler, 27 April 2012).

Meski kegiatan musrenbang ini terlihat seperti kegiatan untuk menampung aspirasi masyarakat dari bawah serta memberikan usulan atau rekomendasi bagi kegiatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Purwakarta, sejatinya

masyarakat hanya sebatas memberikan usulan atau rekomendasi saja tanpa bisa terlibat lebih jauh, yang memiliki hak secara penuh terhadap penyusunan kegiatan atau program dalam bidang apapun, termasuk pendidikan, adalah pemerintah daerah melalui persetujuan DPRD. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Purwakarta saat dimintai pendapatnya :

“...mereka hanya bisa memberikan rekomendasi, tidak punya hak dalam memutuskan anggaran pendidikan untuk kegiatan-kegiatan. Sepenuhnya pada pemerintah daerah, melalui persetujuan DPRD”. (TH, 16 April 2012).

Selain kegiatan musrenbang, untuk penyampaian aspirasi masyarakat bisa dilakukan melalui kegiatan *gempungan* yang dilakukan oleh Bupati, dalam satu pekan selama tiga kali Bupati melakukan kegiatan turun kampung. Masyarakat bisa beraudiensi dengan Bupati secara langsung menyampaikan aspirasi atau keluhannya dalam bidang apapun, termasuk pendidikan.

“...pemerintah daerah, terutama Bupati melakukan *gempungan* dalam menampung aspirasi masyarakat secara langsung”. (ZR, Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, 8 Mei 2012).

“...dilakukan secara langsung oleh Bupati melalui kegiatan *gempungan*”. (YS, Tokoh Masyarakat Nagri Kaler, 9 Mei 2012).

Dari gambaran jawaban para informan dapat diketahui bahwa sesungguhnya pemerintah daerah kabupaten Purwakarta telah melakukan perencanaan partisipatif dengan turut serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Purwakarta meski hal ini baru sekedar pemberian rekomendasi atau masukan dari masyarakat saja.

#### **4.2.5.2. Keterlibatan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial Bagi Penyelenggara Pendidikan**

Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat bisa menjadi kontrol serta motivasi bagi pemerintah daerah sebagai penyelenggara pendidikan.

“Keterlibatan masyarakat, saat ini masyarakat sudah menyoroti tentang pendidikan, ...maka ketika ada kebijakan-kebijakan yang sedikit saja tidak

bagus kadang-kadang bisa muncul, bisa langsung atau melalui DPRD. Itu merupakan sebagai suatu kontrol bagi kami, sebagai motivasi bagi kami untuk perbaikan-perbaikan sistem... Pendidikan harus dibentuk oleh tiga unsur, yaitu sekolah, orang tua dan lingkungan. Satu sama lain harus kompak...". (ZR, 8 Mei 2012).

Kontrol sosial yang dilakukan masyarakat begitu penting adanya, ketika ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai maka masyarakat akan langsung dapat mempertanyakan bahkan meluruskan kebijakan tersebut.

#### **4.2.5.3. Keberhasilan Masyarakat Dalam Mengusung Kebutuhan terhadap Sarana Pendidikan Di Daerahnya**

Salah satu fungsi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah untuk mengetahui kebutuhan masyarakat di lapangan. Karena sejatinya masyarakat yang lebih mengetahui kebutuhan di daerahnya masing-masing. Di Desa Rawasari, perjuangan untuk mewujudkan SMP di desa ini sudah dimulai sejak kepemimpinan Kepala Desa Bapak Noeratif dari tahun 2007. Fasilitas SMP di desa ini sudah mulai dirintis dengan SMP kelas jauh. Kemudian dilanjutkan dengan SMP Satu Atap dimana lokasinya bergabung dengan gedung SDN Rawasari, hingga sekarang Desa Rawasari memiliki gedung SMPN tersendiri yang letaknya bersebelahan dengan kantor Desa Rawasari. SMPN Rawasari diresmikan pada akhir tahun 2011, tepatnya 31 Desember 2011. Sekolah ini dibangun dengan partisipasi masyarakat menggunakan dana APBN melalui Program *Block Grant* Pengembangan SD-SMP Satu Atap tahun 2011 dengan total biaya pembangunan sebesar Rp 450.000.000,-.



Gambar 4.2

Bukti Peresmian SMPN Rawasari Dibangun Dengan Partisipasi Masyarakat

Sumber : dokumentasi pribadi, 2012

Hal ini pun dikuatkan dengan pernyataan tokoh masyarakat Rawasari. Berikut kutipan wawancaranya :

“...awalnya didasari keluhan masyarakat yang merasa susah dan jauh ketika akan melanjutkan ke SMP. Kami merintis sejak lama... perjuangan kami dalam mewujudkan SMP di Rawasari lumayan cukup panjang. Sejak tahun 2007. *Alhamdulillah*, dengan komunikasi intensif berbagai pihak, mulai dari kelas jauh, satu atap, kini sudah ada SMP berdiri sendiri”. (N, 10 Mei 2012).

“*Alhamdulillah*, kita bisa merintis sejak tahun 2007 untuk penyediaan sarana SMP, dimulai dengan jarak jauh, satu atap, sekarang sudah berdiri sendiri. Dulu kendalanya SMP sangat jauh, tapi sekarang sudah tidak lagi”. (K, 10 Mei 2012).

“...terutama di Rawasari, adanya pemerataan pendidikan, dengan dibangunnya SMP satu atap. Pemerintah berusaha mendekatkan sekolah ke masyarakat. Sudah berjalan selama 4 tahun, tahun ini baru akan meluluskan angkatan ke-dua” (AB, 10 Mei 2012).

“Perkembangan antara dulu dan sekarang sangat jauh berbeda. Sekarang ini sarana pendidikan dan infrastrukturnya sudah lebih baik dari sebelumnya”. (M, 10 Mei 2012).

Dengan adanya pembangunan SMP di Rawasari, bukan hanya masyarakat desa tersebut yang mendapatkan keuntungan bisa mengakses sarana pendidikan lebih dekat, tetapi masyarakat di sekitar Desa Rawasari yang berasal dari desa tetangga juga ikut menikmati pembangunan sarana SMP di Desa Rawasari.

“Dengan sekolah tersebut dibangun, kami merasa beruntung karena hal ini demi kepentingan masyarakat Desa Rawasari... Peserta didiknya bukan hanya dari Desa Rawasari, tetapi dari Desa Cadasmekar Kecamatan Tegalwaru, Desa Citeko, Desa Pamoyanan”. (N, Lurah Rawasari, 10 Mei 2012).

#### **4.2.5.4. Keterlibatan Masyarakat Dalam Komite Sekolah**

Sementara untuk tingkat sekolah, aspirasi masyarakat, dalam hal ini peserta didik dan orang tuanya, biasanya ditampung oleh komite sekolah sebagai bagian dari masyarakat karena anggotanya merupakan orang tua siswa dan guru sekolah yang bersangkutan. Kebijakan-kebijakan internal sekolah yang anggarannya tidak didanai oleh pemerintah melalui dana BOS, biasanya dirumuskan bersama antara komite sekolah dan pihak sekolah. Hal ini sebagai mana diungkapkan oleh tokoh masyarakat, baik dari Nagri Kaler maupun dari Rawasari saat diwawancarai :

“Komite sekolah merupakan mitra sekolah, yang menampung aspirasi masyarakat dalam hal ini orang tua siswa. Ketika ada suatu kebijakan sekolah yang terkait dengan anggaran diluar pembiayaan pemerintah, biasanya ditangani oleh komite sekolah”.(YS, Tokoh Masyarakat Nagri Kaler, 9 Mei 2012).

“Penyampaian aspirasi masyarakat biasanya melalui komite sekolah. Biasanya ketika akan memutuskan sebuah kebijakan yang menyangkut anggaran di luar pembiayaan pemerintah, maka biasanya mereka berembuk juga. Salah satunya ketika akan membuat sarana penunjang kegiatan, musholla/masjid sekolah, ini semua dikomunikasikan kepada seluruh orang tua siswa agar saling membantu dalam pembiayaan pembangunan musholla/masjid sekolah tersebut. Komite sekolah terdiri

dari orang tua dan guru”. (AB, Tokoh Masyarakat Rawasari, 10 Mei 2012).



Gambar 4.3  
Musholla Sekolah Sebagai Penunjang Kegiatan Pendidikan di Sekolah

Sumber : dokumentasi pribadi, 2012

Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam setiap kebijakan atau program yang dikeluarkan pemerintah sangat penting adanya. Hal ini setidaknya membuat masyarakat merasa dihargai sehingga kebijakan atau program tersebut bisa didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Selain itu, media dan sarana penyampaian aspirasi masyarakat harus disediakan secara baik agar partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam kebijakan atau program yang dikeluarkan pemerintah bisa maksimal.

#### **4.3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta**

Setiap kebijakan, apabila ingin dinilai secara efektif dan efisien tentunya didukung oleh faktor-faktor tertentu. Begitu pula halnya, jika mengalami

hambatan maka dapat dipastikan kebijakan tersebut akan mengalami gangguan dalam setiap tahapan-tahapan prosesnya. Berikut ini penulis himpun beberapa faktor pendukung serta faktor penghambat yang diperoleh dari hasil wawancara serta diidentifikasi oleh para informan di lapangan.

#### 4.3.1. Faktor Pendukung

##### 1) Ketersediaan Sarana Dan Media Komunikasi Antara Masyarakat Dengan Pemerintah

Dari segi komunikasi, pemerintah daerah, dalam hal ini bupati, terus menerus melakukan kegiatan *gempungan* yang tujuannya untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat dalam bidang apapun, termasuk bidang pendidikan. Bahkan kegiatan ini dilakukan tiga kali dalam tiap pekan, sebagaimana diungkapkan dalam kutipan wawancara berikut :

“...tiap pekan, sebanyak tiga kali, Pak Bupati melakukan kegiatan *gempungan*...”. (PD, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, 8 Mei 2012)

“...dari segi komunikasi, pemerintah daerah, terutama Bupati melakukan *gempungan* dalam menampung aspirasi masyarakat secara langsung”. (ZR, Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, 8 Mei 2012).

Sosialisasi kebijakan pendidikan pun dilakukan secara langsung oleh Bupati Purwakarta melalui kegiatan *gempungan*, serta melalui media *banner*/spanduk yang dipasang di sekolah-sekolah.

“...sosialisasi kebijakan pendidikan dilakukan secara langsung oleh Bupati melalui kegiatan *gempungan*, melalui *banner*/spanduk, dan lain-lain”. (YS, Tokoh Masyarakat Nagri Kaler, 9 Mei 2012).



Gambar 4.4

Media Komunikasi Sosialisasi Kebijakan Pendidikan melalui spanduk di Sekolah

Sumber : dokumentasi pribadi, 2012

Bukan hanya kegiatan *gempungan* yang dilakukan oleh Bupati dalam menampung aspirasi dan keluhan masyarakat, ada kegiatan lain seperti kegiatan *minggonan* di masing-masing wilayah untuk menyerap aspirasi serta keluhan masyarakat yang kemudian akan dibawa ke tahap yang lebih tinggi sebagaimana telah dibahas sebelumnya pada sub-bab keterlibatan masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Artinya, sarana-sarana komunikasi yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat sudah lumayan baik.

## 2) Ketersediaan Alokasi Anggaran Pendidikan Yang Bersumber Dari APBD

Dalam membuat suatu kebijakan pembangunan, dalam bidang apapun, termasuk pendidikan, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan program atau kegiatan tersebut adalah anggaran atau dana. Tidak dapat dipungkiri, alokasi dana dalam setiap kegiatan pembangunan memang sangat diperlukan. Terkait pengalokasian anggaran, sepenuhnya merupakan hak dari pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Semakin besar alokasi dana yang diberikan untuk bidang tertentu dalam hal ini pendidikan, hal ini jelas memperlihatkan bahwa pemerintah daerah *concern* terhadap dunia pendidikan. Tetapi apabila anggaran yang dialokasikan minim, maka tentunya dapat dikatakan pemerintah daerahnya kurang peduli dengan dunia pendidikan.

“Terkait pendidikan, jika anggarannya besar maka pemerintahnya *concern* terhadap pendidikan, jika anggarannya minim, maka sekedar omong doang. Di Purwakarta, *Alhamdulillah* anggaran pendidikannya sudah minimal 20 persen dari APBD”. (SJ, Tokoh Masyarakat Nagri Kaler, 27 April 2012).

Tentunya diperlukan adanya *political will* pemerintah dalam hal ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta saat dimintai pendapatnya :

“...salah satunya *political will* dari pemerintah. Bupati saat ini sangat *concern* terhadap pendidikan. Saya sangat senang dengan hal ini, sangat melihat pendidikan. Begitu kritis dan peduli terhadap pendidikan”. (ZR, 8 Mei 2012).

Sejalan dengan pernyataan tokoh masyarakat Nagri Kaler yang menyatakan bahwa alokasi anggaran untuk bidang pendidikan yang dikeluarkan pemerintah daerah sudah lebih dari 20 persen sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang, Kepala Bappeda Kabupaten Purwakarta pun mengatakan demikian saat diwawancari.

“...kemampuan APBD yang dialokasikan untuk bidang pendidikan sudah cukup baik. Tahun 2011, kumulatif APBD termasuk untuk gaji pegawai (guru) lebih dari 40 persen, kalau dilihat dari belanja pembangunannya sudah lebih dari 25 persen. Itu sudah lebih dari yang diamanatkan undang-undang, yaitu 20 persen”. (TH, 16 April 2012).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh data berikut, pada tahun 2010, alokasi anggaran untuk urusan Pendidikan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, dianggarkan sebesar Rp.373.500.334.994,- atau sebesar 43,99 % dari anggaran pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta sebesar Rp.848.949.290.040,- (LKPJ Bupati Purwakarta tahun 2010, h. III-3 dan III-17).

Sementara saat ditanyakan terkait alokasi anggaran pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, anggota DPRD berpendapat lain bahwa sekarang ini anggaran yang dialokasikan untuk bidang pendidikan di Kabupaten Purwakarta belum mencapai 20 persen sebagai mana yang diamanatkan oleh

undang-undang. Pernyataan ini berbeda dengan pernyataan Kepala Bappeda sebelumnya.

“Pemerintah sudah memprogramkan bahwa anggaran pendidikan 30 persen, kami sangat menyambut baik hal ini, jika kita berbicara tentang pendidikan sekarang di Purwakarta belum sampai 12 persen jika tidak salah”. (ES, Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, Komisi 4 Bidang Pendidikan, 26 April 2012).

Dari jawaban informan tersebut di atas terdapat perbedaan pendapat antara pihak eksekutif dan pihak legislatif. Pihak eksekutif, dalam hal ini Kepala Bappeda Kabupaten Purwakarta mengatakan bahwa pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran untuk bidang pendidikan di atas 20 persen, sementara pihak legislatif, dalam hal ini anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Komisi 4 Bidang Pendidikan mengatakan bahwa alokasi anggaran untuk bidang pendidikan masih di bawah 20 persen. Terdapat perbedaan penghitungan alokasi anggaran pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

### **3) Ketersediaan Sumber Daya Manusia Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan**

Sementara dari aspek sumber daya manusia, pemerintah daerah memiliki jumlah pegawai yang cukup untuk mendukung kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Kepala Bappeda Kabupaten Purwakarta dan anggota DPRD Kabupaten Purwakarta mengungkapkan hal tersebut saat dimintai pendapatnya :

“Dari sumber daya manusia, pemerintah daerah dengan jumlah pegawai yang tidak terlalu banyak menjadi salah satu pendukung terhadap segala pelaksanaan kegiatan dalam segala bidang, termasuk pendidikan”. (TH, 16 April 2012).

“...dari total 12 ribu jumlah pegawai pemda, 6 ribu lebih merupakan guru”. (ES, 26 April 2012).

Meski dari segi jumlah pegawai pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta sudah sangat memadai, yang perlu diperhatikan lagi adalah keahlian dan keterampilan para pegawai yang senantiasa harus terus ditingkatkan agar kualitas

sumber daya manusia pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara optimal.

#### 4.3.2. Faktor Penghambat

##### 1) Persebaran Tenaga Pengajar Yang Belum Merata

Kepala Bappeda Kabupaten Purwakarta mengemukakan bahwa persebaran tenaga pendidik yang berkualitas masih banyak di perkotaan, sehingga hal ini menjadi ketimpangan antara kota dan desa. Akibatnya, pedesaan menjadi kontributor terhadap tingkat pendidikan rendah di Kabupaten Purwakarta.

“...yang berkontribusi menyumbangkan terhadap pendidikan rendah itu di pedesaan... Salah satu permasalahannya adalah kualifikasi tenaga pendidik. Jika kualitas gurunya baik, maka demikian pula *output* pengajaran yang dihasilkan pun akan baik. Antara guru di desa, di kota kecil, di kota sedang dan kota besar pasti beda secara kualitasnya”. (TH, 16 April 2012).

Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Komisi 4 Bidang Pendidikan juga mengatakan hal yang serupa, persebaran tenaga pendidik di Kabupaten Purwakarta masih belum merata dan terkonsentrasi di perkotaan. Beliau bahkan menegaskan perlu keberanian dinas pendidikan untuk membenahi permasalahan persebaran tenaga pendidik yang tidak merata ini.

“Perbedaan antara pedesaan dan perkotaan, bukan dari materi pendidikan, tetapi pada tenaga pendidik atau guru. Lebih banyak terkonsentrasi di kota. Hal ini yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendidikan antara desa dan kota..”. (ES, 26 April 2012).

Hal yang sama diamini oleh Tokoh Masyarakat Rawasari terkait tenaga pengajar atau guru yang ada di Desa Rawasari, terutama guru SMPN Rawasari yang gedung sekolahnya baru dibangun tahun lalu. Rata-rata tenaga pengajar di sekolah tersebut masih berstatus honorer, sementara pegawai negeri sipilnya hanya ada satu orang yaitu kepala sekolahnya.

“Hambatannya, guru-guru SMP di sini masih berstatus honorer, satu-satunya PNS hanya kepala sekolahnya. Sehingga tenaga pengajarnya yang masih menjadi kendala”. (AB, 10 Mei 2012).

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada dinas pendidikan, Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta mengatakan masih berusaha membuat pemetaan terhadap persebaran guru. Dinas pendidikan juga berusaha terus untuk menggugah para guru terhadap komitmen awalnya ketika diangkat menjadi pegawai negeri yang menyatakan siap ditempatkan di mana saja.

“Kami sedang berusaha membuat *mapping* tentang persebaran guru. Menggugah kembali komitmen awal, siap ditempatkan di mana saja. Memberi pemahaman *mindset* kepada guru-guru bahwa semua sekolah sama..”. (ZR, 8 Mei 2012).

Dari jawaban informan tersebut di atas, terutama dari Dinas Pendidikan, sudah selayaknya dilakukan persebaran tenaga pengajar agar lebih merata di seluruh Kabupaten Purwakarta, bukan hanya sekedar menumpuk di perkotaan. Kunci keberhasilan dari hal ini adalah keberanian serta kemauan dan usaha yang lebih yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan selaku penanggung jawab kegiatan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Jika hal ini dapat terealisasikan dengan baik, maka dapat dipastikan ketimpangan kualitas pendidikan antara desa dan kota tidak akan terjadi.

## **2) Pemahaman Masyarakat Terhadap Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Yang Masih Kurang Dan Belum Merata**

Pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kebijakan pendidikan itu sendiri yang masih belum merata, terutama di pedesaan, sehingga hal ini menjadi faktor penghambat dalam kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Purwakarta dan Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta saat diminta pendapatnya.

“Sementara hambatannya, saya kira pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan masih belum merata, terutama di pedesaan”. (TH, 6 April 2012).

“Faktor penghambatnya, belum seragamnya pemahaman masyarakat tentang sebuah kebijakan...”. (ZR, 8 Mei 2012).

Ketika ditanyakan kepada tokoh masyarakat Nagri Kaler, mereka pun berpendapat sama bahwa pemahaman atau persepsi masyarakat yang masih kurang terhadap kebijakan pendidikan yang ada menjadi salah satu hal yang menghambat kebijakan pendidikan itu sendiri.

“Faktor penghambat, pemahaman masyarakat yang masih kurang terhadap kebijakan pendidikan yang ada”. (YS, 9 Mei 2012).

“Faktor penghambat, persepsi masyarakat yang masih kurang saat memahami kebijakan yang ada...”. (KW, 25 April 2012).

Senada dengan hal tersebut, tokoh masyarakat Rawasari pun mengungkapkan hal yang sama bahwa yang menghambat kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta terutama di Desa Rawasari adalah kesadaran serta pemahaman masyarakat yang masih kurang terhadap pendidikan. Bisa jadi ini disebabkan karena tingkat SDM di Desa Rawasari masih tergolong rendah, sehingga pemahaman masyarakatnya pun terhadap pendidikan masih kurang.

“Faktor penghambat, salah satunya kesadaran masyarakat masih kurang”. (N, 10 Mei 2012).

“..., masih ada beberapa orang tua siswa yang pemahamannya terhadap pendidikan masih kurang...”. (M, 10 Mei 2012).

Dari gambaran jawaban para informan di atas, memang perlu adanya upaya untuk mengedukasi masyarakat secara terus menerus tanpa lelah dalam memberikan pemahaman yang lebih baik akan pentingnya pendidikan. Dengan meningkatnya pendidikan, maka diharapkan akan meningkatnya ekonomi masyarakat yang tentunya akan berdampak pada meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat sehingga perekonomian daerah secara makro pun akan menjadi lebih baik.

### **3) Ketidakjelasan Pelimpahan Wewenang Dari Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Propinsi Kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten)**

Kepala Bappeda Kabupaten Purwakarta mengatakan bahwa dari segi komunikasi, terutama dalam hal pembagian wewenang antara pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah (kabupaten) serta pemerintah propinsi terhadap pemerintah daerah (kabupaten), tidak sepenuhnya memberikan delegasi dalam

bidang pendidikan serta ketidakjelasan kewenangan dalam penggunaan anggaran, menjadi hambatan dalam kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Seolah terjadi *gap* di antara mereka, karena terkadang kebutuhan daerah (kabupaten) dengan yang dilakukan pemerintah pusat atau pemerintah propinsi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sejatinya pemerintah daerah (kabupaten) yang lebih memahami akan kebutuhan di daerahnya.

“Dari segi komunikasi, dalam pembagian kewenangan, pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah tidak sepenuhnya mendelegasikan sepenuhnya dalam bidang pendidikan, utamanya dalam kewenangan penggunaan anggaran. Demikian pula halnya dengan pemerintah propinsi, tidak jelas kewenangannya dalam penggunaan anggaran. Cukup pemerintah propinsi sebagai koordinasi saja, baik dalam perencanaan, pelaksanaannya, dan lebih dominan pada koordinasi dalam hal pengawasannya. Tetapi hal ini masih belum dilakukan, sehingga seolah ada *gap*. Terkadang apa yang dilakukan pemerintah propinsi tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Padahal pemerintah daerah lebih mengetahui akan kebutuhan daerahnya”. (TH, 16 April 2012).

Dari gambaran jawaban informan dapat diketahui apa-apa saja yang menjadi faktor pendukung serta penghambat dalam kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Untuk faktor pendukung harus terus diupayakan secara maksimal sementara untuk faktor penghambat sebisa mungkin diminimalisir bahkan dihilangkan agar kebijakan pendidikan yang ada dapat optimal dalam pelaksanaannya sehingga upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Purwakarta dapat dilakukan secara baik. Lebih lanjut, identifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam kebijakan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4  
Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Pendidikan

	<b>Faktor Pendukung</b>	<b>Faktor Penghambat</b>
<b>Kabupaten Purwakarta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi strategis di antara dua kota, Bandung dan Jakarta</li> <li>- Ketersediaan sarana dan media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah</li> <li>- Alokasi anggaran untuk pendidikan sudah di atas 20 persen</li> <li>- Ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketidakjelasan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi kepada pemerintah kabupaten</li> <li>- Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pendidikan dan kebijakan pendidikan</li> </ul>
<b>Kelurahan Nagri Kaler</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan infrastruktur dan sarana transportasi umum yang sudah sangat memadai</li> <li>- Ketersediaan tenaga pengajar berkualitas yang sudah cukup baik</li> <li>- Ketersediaan sarana dan media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pendidikan dan kebijakan pendidikan</li> </ul>
<b>Desa Rawasari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan sarana dan media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimnya tenaga pengajar berkualitas</li> <li>- Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pendidikan dan kebijakan pendidikan</li> <li>- Minimnya sarana transportasi umum yang terjangkau</li> </ul>

Sumber : telah diolah kembali

## BAB 5 ANALISA

### 5.1. Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta

#### 5.1.1. Pendidikan dan Permasalahannya di Kabupaten Purwakarta

Dari temuan lapangan terkait masih rendahnya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Purwakarta diketahui ada beberapa indikator yang digunakan di antaranya adalah sebagai berikut :

*Pertama* Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Kabupaten Purwakarta pada tahun 2013 menurut hasil proyeksi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 diasumsikan dapat mencapai skala sebesar 7,26. Adapun pencapaian RLS pada tahun 2009 mencapai sebesar 7,08 meningkat sebesar 0,08 poin dibandingkan angka capaian pada tahun 2008 sebesar 7,00. Bila dibandingkan dengan target RLS Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 sebesar 7,26, maka rata-rata capaian setiap tahunnya harus mencapai angka sebesar 0,05 poin. Kondisi ini menggambarkan masih adanya penduduk yang belum tamat SMP sehingga diharapkan pada tahun 2013 penduduk di Kabupaten Purwakarta dapat menamatkan pendidikannya minimal sampai dengan tingkat SMP. (RKPD Kabupaten Purwakarta tahun 2011, h. II-2).

*Kedua* Angka Melek Huruf (AMH). Kabupaten Purwakarta pada tahun 2013 menurut hasil proyeksi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 diasumsikan dapat mencapai skala sebesar 97,81. Adapun pencapaian AMH pada tahun 2009 mencapai sebesar 96,34 meningkat sebesar 0,84 poin dibandingkan angka capaian pada tahun 2008 sebesar 95,50. Bila dibandingkan dengan target AMH Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 sebesar 97,81, maka rata-rata capaian setiap tahunnya harus mencapai angka sebesar 0,37 poin. (RKPD Kabupaten Purwakarta tahun 2011, h. II-2).

*Ketiga* Putus Sekolah (*Drop Out*). Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci pembangunan sumber daya manusia. Semakin tinggi pendidikan di suatu daerah maka semakin bagus potensi sumber daya manusianya. Tidak semua peserta didik di Kabupaten Purwakarta dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih

tinggi. Baik dari SD ke SMP ataupun dari SMP ke SMA / SMK. Pada tahun 2008 dapat dilihat jumlah peserta didik dari SD tidak melanjutkan ke SMP sebanyak 580 orang, hal ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 2007 sebanyak 299 orang dan peserta didik dari SMP tidak melanjutkan ke SMA/SMK sebanyak 2.190 orang. (Data Makro Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Purwakarta Tahun 2011, h.13). Sementara tahun 2010, jumlah siswa/siswi lulusan SMP/MTs di Kabupaten Purwakarta sebanyak 13.235 yang berasal dari lulusan SMP 10.604 dan MTS 2.631. Sedangkan siswa yang dipastikan diterima di SMA sebanyak 4.032 dan SMK 6.377 siswa serta MA sebanyak 469. Jadi terdapat selisih antara jumlah lulusan SMP/MTS dengan yang melanjutkan ke SMA/SMK/MA sebanyak 2.543 siswa. (pikiran rakyat online dan poskota online edisi Rabu, 14 Juli 2010).

Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta pada tahun 2013 menurut hasil proyeksi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 diasumsikan dapat mencapai skala sebesar 73,52. Adapun pencapaian IPM pada tahun 2009 mencapai sebesar 70,99 meningkat sebesar 0,68 poin dibandingkan angka capaian pada tahun 2008 sebesar 70,31. Bila dibandingkan dengan target IPM Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 sebesar 73,52, maka rata-rata capaian setiap tahunnya harus mencapai angka 0,63 poin. (RKPD Kabupaten Purwakarta tahun 2011, h. II-2).

Permasalahan tentang angka melek huruf di Kabupaten Purwakarta yang masih belum 100 persen, ketika diidentifikasi berdasarkan informasi dari informan diketahui bahwa faktor utamanya adalah penduduk yang berusia lanjut, di atas 60-70 tahun. Idealnya memang diharapkan semua masyarakat di Kabupaten Purwakarta saat ini sudah bebas dari permasalahan buta huruf. Tetapi, kenyataan yang ada saat ini dalam jangka pendek memang terlihat sangat menyulitkan bagi pemerintah daerah untuk menghapus buta huruf di Kabupaten Purwakarta. Oleh karenanya, dalam jangka panjang diharapkan persoalan buta huruf di Kabupaten Purwakarta bisa terselesaikan dengan baik.

Meski angka *drop out* atau putus sekolah tidak menjadi salah satu indikator bagi pengukuran pembangunan manusia dalam bidang pendidikan, tetapi angka *drop out* atau putus memberikan pengaruh yang sangat signifikan

bagi angka rata-rata lama sekolah sebagai salah satu indikator bagi pengukuran pembangunan manusia dalam bidang pendidikan. Ada keterkaitan yang sangat kuat antara angka *drop out* atau putus sekolah dengan angka rata-rata lama sekolah. Idealnya memang seharusnya tidak perlu ada lagi kasus anak putus sekolah di Kabupaten Purwakarta sehingga hal ini tentunya akan turut pula mendorong peningkatan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Purwakarta, di mana diharapkan penduduk usia sekolah sudah harus menyelesaikan pendidikan dasar mereka minimal sembilan tahun atau bahkan bisa sampai dua belas tahun.

Secara teoritis, sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Iatridis (bab 2, h. 45-47), yaitu dalam tahapan proses kebijakan sosial, biasanya dimulai dengan analisis masalah. Dalam tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan berbagai informasi tentang masalah sosial, kondisi sosial atau peluang pembangunan. Kemudian dari masalah sosial yang ada berkembang menjadi isu di masyarakat yang kemudian akan menjadi agenda pemerintah untuk mencari solusi pemecahannya melalui perumusan pembuatan kebijakan.

Dari gambaran realita yang penulis ungkapkan di awal bab ini (secara lebih mendalam bisa dilihat pada bab 4 temuan hasil lapangan) terlihat permasalahan pendidikan yang ada di Kabupaten Purwakarta, yaitu rendahnya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat di kabupaten ini. Analisis permasalahan ini tentunya sangat berguna bagi pemerintah daerah untuk menyusun serta merumuskan kebijakan yang tepat guna dalam mengantisipasi permasalahan tersebut sehingga diharapkan rata-rata tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Purwakarta bisa meningkat. Betapa pentingnya pendidikan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di mana sumber daya manusia merupakan aset bagi pembangunan di daerah. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula sehingga manakala penduduk di daerah tersebut tingkat pendidikannya sudah tinggi maka dapat dikatakan pola pikirnya pun tentunya sudah sangat baik.

### **5.1.2. Kebijakan Pendidikan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purwakarta**

Untuk mengatasi permasalahan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Purwakarta, berdasarkan hasil lapangan yang diperoleh diketahui bahwa ada beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

#### **1. Kebijakan Umum dalam Bidang Pendidikan**

- a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun : Program turunan dari pemerintah pusat bahwa setiap anak usia sekolah harus sudah menyelesaikan pendidikan dasarnya selama sembilan tahun.
- b. Kebijakan Pendidikan SD-SMP Terpadu Satu Atap : Kebijakan untuk mendekatkan sarana sekolah SMP kepada masyarakat di daerah-daerah minim akses transportasi umum dengan mendirikan SMP satu lokasi dengan SD sehingga siswa setelah lulus SD bisa langsung melanjutkan ke SMP di lokasi yang sama.
- c. Kebijakan Pendidikan Gratis : Anggaran bersumber dari dana BOS yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah. Kebijakan ini diperuntukan bagi siswa SD dan SMP.

#### **2. Kebijakan Lokal dalam Bidang Pendidikan**

- a. Program Kurikulum Baca Tulis Al Qur'an (BTQ) : Program pengenalan dan pembiasaan baca tulis Al Qur'an sejak dini, sejalan dengan karakter budaya masyarakat Purwakarta yang mayoritas beragama Islam.
- b. Kebijakan Pengaturan Jajanan Anak Sekolah : Anak-anak dihimbau untuk membawa bekal makanan sehat dari rumah yang dipersiapkan oleh orang tuanya untuk menghindari resiko terhadap jajanan sekolah yang tidak sehat karena banyak mengandung bahan kimia berbahaya. Selain itu anak-anak dilatih jiwa sosialnya dengan saling berbagi bekal makanan yang dibawanya dari rumah.

Tinjauan literatur yang diungkapkan Iatridis (bab 2, h. 45-47) dikatakan bahwa tahapan proses kebijakan selanjutnya adalah perumusan rekomendasi. Setelah mengetahui masalah sosial yang terjadi di daerah yang kemudian berkembang menjadi isu di masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta

membuat rumusan rekomendasi kebijakan. Dari rumusan rekomendasi ini, sebelumnya perlu dikomunikasikan dengan pihak lain, dalam hal ini DPRD, untuk mendapatkan persetujuan. Ketika program-program atau kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah daerah dikomunikasikan kepada DPRD terkait penggunaan anggarannya, maka pihak DPRD dapat mempelajari usulan program atau kegiatan tersebut lebih jauh. Jika memang kiranya dapat dipahami maksud dan tujuan dari program atau kegiatan tersebut biasanya DPRD memberikan persetujuannya terhadap program atau kegiatan tersebut. Lalu jika rekomendasi untuk intervensi (program atau kegiatan) sudah disetujui maka langkah selanjutnya adalah membuat perencanaan dalam pelaksanaannya.

Jika melihat program atau kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta bahwa dari kebijakan tersebut di atas, kebijakan yang langsung berpengaruh pada peningkatan indikator penghitungan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Purwakarta memang hanya kebijakan umum bidang pendidikan, sementara kebijakan lokal bidang pendidikan merupakan penguatan terhadap karakter budaya masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Tetapi jika direnungi lebih jauh, sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta sudah cukup baik. Artinya, pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta tidak hanya berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Purwakarta cerdas secara intelektual di bidang pendidikan, tetapi mereka juga berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Purwakarta cerdas secara emosional dan spiritual melalui kebijakan-kebijakan lokal yang digulirkan. Sehingga hal ini diharapkan nantinya bisa menjadi seimbang antara cerdas secara intelektual dengan cerdas secara emosional dan spiritual. Dan tentunya hal ini akan berdampak pula terhadap pembentukan karakter manusia di Kabupaten Purwakarta secara utuh dan paripurna.

## **5.2. Implementasi Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta**

Setelah kebijakan atau program dalam bidang pendidikan dikeluarkan oleh pemerintah daerah, selanjutnya kebijakan atau program tersebut tentunya akan

dilaksanakan di lapangan, tentunya dengan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat.

### **1. Kebijakan Umum dalam Bidang Pendidikan**

Kebijakan umum dalam bidang pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta terdiri dari : program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, kebijakan pendidikan SD-SMP terpadu satu atap dan kebijakan pendidikan gratis. Dari segi pelaksanaannya, jika dilihat lebih jauh sebenarnya kebijakan umum dalam bidang pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta satu sama lain saling berkaitan. Kebijakan wajib belajar sembilan tahun agar penyelenggaraan dapat berjalan secara baik maka didukung oleh penyediaan sarana pendidikan yang memadai, salah satunya membuat kebijakan pendidikan SD-SMP terpadu satu atap di mana gedung sekolah SD-SMP didirikan di lokasi yang sama utamanya di daerah-daerah minim transportasi umum seperti di wilayah pedesaan sehingga siswa setelah lulus dari SD bisa melanjutkan ke SMP di lokasi yang sama tanpa harus mengeluarkan biaya untuk ongkos dikarenakan lokasi sekolah lanjutan yang jauh dari domisili tempat tinggalnya. Kemudian kebijakan wajib belajar sembilan tahun juga didukung oleh kebijakan pendidikan gratis yang diperuntukkan bagi siswa SD dan SMP dengan menggunakan dana BOS yang alokasi anggarannya bersumber dari APBN pemerintah pusat maupun APBD pemerintah daerah.

Pelaksanaan pendidikan wajib belajar sembilan tahun telah diatur lebih luas di dalam UU Nomor 20 tahun 2003, bahwa sistem pendidikan nasional memberi hak kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan juga berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Bagi warga negara yang memiliki kelainan emosional, mental, intelektual dan atau sosial, serta warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Demikian juga warga negara di daerah terpencil atau terbelakang. Lebih jauh dijelaskan bahwa pendidikan wajib belajar sembilan tahun bagi anak usia 7 sampai 15 tahun harus diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat tanpa dipungut biaya. (Mulyadi, 2011, h. 157).

Dari paparan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pendidikan wajib belajar sembilan tahun harus diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat bagi anak usia 7 sampai 15 tahun tanpa terkecuali, siapa pun dia dan di mana pun dia berada, memiliki kesempatan yang sama dan harus bisa menikmati pendidikan wajib belajar sembilan tahun serta penyelenggaraannya dilakukan secara gratis atau tidak dipungut biaya.

Lebih lanjut Mulyadi (2011) mengatakan ada beberapa alasan yang melatarbelakangi dicanangkannya program pendidikan wajib belajar sembilan tahun bagi semua anak usia 7-15 tahun mulai tahun 1994, antara lain :

1. Pada tahun 1992, sekitar 73,7 persen angkatan kerja Indonesia hanya berpendidikan SD atau lebih rendah. Jauh ketinggalan dibanding dengan negara-negara lain di ASEAN, seperti Singapura.
2. Dan sudut pandang kepentingan ekonomi, pendidikan dasar sembilan tahun merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang dapat memberi nilai tambah lebih tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan rata-rata pendidikan dasar sembilan tahun, dimungkinkan mereka dapat memperluas wawasannya dalam menciptakan kegiatan ekonomi secara lebih beraneka ragam (*diversified*).
3. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar peluang untuk lebih mampu berperan serta sebagai pelaku ekonomi dalam sektor-sektor ekonomi atau sektor-sektor industri.
4. Dari segi kepentingan peserta didik, peningkatan wajib belajar dari enam tahun menjadi sembilan tahun akan memberikan kematangan yang lebih tinggi dalam penguasaan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan. Dengan meningkatnya penguasaan kemampuan dan keterampilan, maka akan memperbesar peluang yang lebih merata untuk meningkatkan martabat, kesejahteraan, serta makna hidupnya.
5. Dengan semakin meluasnya kesempatan belajar sembilan tahun, maka usia minimal angkatan kerja produktif dapat ditingkatkan dari 10 tahun menjadi 15 tahun.

Meski demikian, pelaksanaan pendidikan wajib belajar sembilan tahun di Indonesia cenderung memiliki ciri-ciri : (1) tidak bersifat paksaan melainkan

persuasif, (2) tidak ada sanksi hukum, (3) tidak diatur dengan undang-undang tersendiri, (4) keberhasilannya diukur dengan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat. (h. 157-159).

Idealnya, karena program ini merupakan hal yang wajib, sebaiknya pemerintah membuat aturan yang jelas agar tingkat partisipasi masyarakat dalam program wajib belajar sembilan tahun bisa meningkat. Tidak hanya itu, perlu pula adanya penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan guna tercapainya keberhasilan program. Tidak mungkin program bisa berhasil jika fasilitas sekolahnya minim dan jauh. Terobosan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta dengan membuat kebijakan SD-SMP terpadu satu atap perlu diapresiasi lebih jauh. Ini merupakan salah satu ide cemerlang yaitu mendekatkan sarana fasilitas sekolah lanjutan dengan domisili tempat tinggal masyarakat serta menghemat banyak anggaran karena yang dibutuhkan hanya pembangunan penambahan ruang kelas saja, tidak memerlukan lahan baru yang tentunya membutuhkan banyak biaya untuk penyediaan lahan baru tersebut. Selain itu, memang sudah selayaknya jika program pendidikan wajib belajar sembilan tahun ingin berhasil dalam penyelenggaraannya maka harus tanpa biaya atau digratiskan hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat yang tidak mampu dalam menikmati layanan pendidikan yang ada.

## **2. Kebijakan Lokal dalam Bidang Pendidikan**

Selain kebijakan umum dalam bidang pendidikan, pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta juga mengeluarkan kebijakan lokal dalam bidang pendidikan yang terdiri dari : Kurikulum Program Baca Tulis Al Qur'an (BTQ) dan kebijakan pengaturan jajanan anak sekolah.

Pelaksanaan kebijakan kurikulum program BTQ di lapangan saat ini memang masih berproses, karena sejatinya program ini baru dicanangkan tahun 2011 lalu. Pada awalnya memang mengalami kendala, salah satunya resistensi dari orang tua dan guru. Hal ini karena masih kurangnya pemahaman mereka terhadap isi serta tujuan dari kebijakan tersebut. Meski demikian, setelah beberapa waktu berselang pada akhirnya mereka memahaminya serta mendukung program

ini karena dinilai sangat baik untuk memupuk kesalehan sosial masyarakat terutama anak-anak usia sekolah sebagai bekal bagi kehidupan mereka kelak.

Senada dengan hal tersebut di atas, dikatakan bahwa setiap siswa harus membaca, menulis, mempelajari, mendalami, dan mengamalkan Al Qur'an. Bupati telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati, bahwa seluruh sekolah di Purwakarta harus menerapkan format kurikulum tersebut. Namun, sebagian guru terjebak pada penilaian apakah kebijakan ini baik atau tidak. Penilaian ini tentunya akan berdampak pada ketidakefektifan pelaksanaan surat edaran tersebut. Mungkin, sebagian besar guru berpikir bahwa budaya membaca Al Qur'an sebelum kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak termasuk dalam kategori UAN, sehingga tidak harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Padahal, kegiatan ini merupakan bagian dari membangun penghayatan dan pemahaman terhadap Al Qur'an. Minimal, tradisi membaca Al Qur'an menjadi kebiasaan sehari-hari. Secara kultural, setelah tamat SD dan masuk SMP, anak-anak sudah tidak mau lagi pergi mengaji ke masjid. Oleh karena itu, harus ada tradisi alternatif yang bisa mendekatkan Al Qur'an pada kehidupan mereka sehari-hari. Kerangka inilah yang seharusnya menjadi daya dorong. Esensi dari membaca dan menulis Al Qur'an adalah membangun kesalehan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Kalau tujuannya untuk membangun kesalehan siswa, meskipun hanya setengah jam sehari, ini lebih baik daripada berdebat tentang penambahan jam pelajaran agama dua kali dalam seminggu. Padahal, pelajaran agama bukanlah pelajaran favorit di mata siswa. Di samping itu, belajar setengah jam setiap hari, tentu lebih baik daripada belajar empat jam dua kali dalam seminggu. Kebiasaan itu akan membentuk kepribadian mereka. Ada pepatah lama yang mengatakan, "bisa karena terbiasa". (Mulyadi, 2011, h. 230-231)

Begitu pula halnya yang terjadi dengan kebijakan pengaturan jajan anak sekolah. Program ini baru dicanangkan pada awal tahun 2012. Hingga kini pelaksanaannya masih belum optimal dan mengalami kendala, terutama terjadi di wilayah pedesaan yang masih banyak terdapat penduduk miskin. Pelaksanaannya tidaklah mudah bagi masyarakat yang tidak mampu. Sementara untuk di wilayah perkotaan kebijakan ini sangat disambut baik oleh masyarakat, meski pada awalnya mereka pun menyatakan keberatan karena harus menyiapkan bekal bagi

anak mereka ke sekolah tetapi selang beberapa waktu mereka telah terbiasa dengan hal tersebut.

Idealnya memang diharapkan baik program kurikulum BTQ atau pun kebijakan pengaturan jajanan anak sekolah pelaksanaannya bisa sesuai dengan apa yang telah diatur oleh pemerintah daerah melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Purwakarta tentang kebijakan-kebijakan tersebut.

Dari tinjauan literatur dikatakan bahwa tahapan selanjutnya dari proses kebijakan menurut Iatridis (bab 2, h. 45-47) adalah implementasi atau pelaksanaan kebijakan. Dalam tahapan ini dilakukan pengorganisasian pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan serta pemantauan kebijakan atau program yang telah dibuat. Artinya sebelum kegiatan pelaksanaan program atau kebijakan dibuat lebih dahulu petunjuk operasional pelaksanaan program atau kegiatan tersebut di lapangan. Hal ini menjadi penting agar para pelaksana di lapangan memahami isi serta tujuan dari kebijakan atau program yang telah dibuat oleh pemerintah daerah.

Dari hasil gambaran tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta sebenarnya sudah dapat dikatakan cukup baik. Meski demikian, masih terdapat beberapa kendala di lapangan. Salah satunya adalah pemahaman masyarakat yang masih agak kurang terhadap kebijakan pendidikan itu sendiri. Oleh karenanya diperlukan pengembangan sosialisasi yang lebih baik secara terus menerus serta dibuat petunjuk operasional pelaksanaannya di lapangan.

### **5.2.1. Penilaian Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta**

Evaluasi dalam sebuah kebijakan atau program perlu dilakukan. Hal ini bertujuan sebagai umpan balik untuk perbaikan-perbaikan kebijakan atau program yang ada di masa selanjutnya. Artinya, ketika terjadi permasalahan atau kekurangan-kekurangan pada kebijakan atau program tersebut bisa diantisipasi secepatnya serta diperbaiki demi keberlangsungan kebijakan atau program tersebut di masa yang akan datang.

Seperti dikatakan sebelumnya bahwa keberhasilan program atau kebijakan dalam bidang pendidikan hanya diukur dengan angka partisipasi pendidikan yang semakin meningkat. Gambaran tersebut sebagaimana terlihat pada paparan berikut

ini : Pencapaian Kabupaten Purwakarta tahun 2011 bidang pendidikan terus mengalami peningkatan, yang dapat diukur dari capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK). Dalam penanggulangan angka putus sekolah dan penuntasan wajib belajar sembilan tahun tergambar dari IKK Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sederajat dan IKK Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs sederajat. Pada tahun 2011 di Kabupaten Purwakarta dapat dipastikan tidak terdapat lagi anak yang putus sekolah pada tingkat SD/MI sederajat dan SMP/MTs sederajat. Untuk pendidikan menengah juga mengalami penurunan pada IKK Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs sederajat sebesar 0.10 point. Seperti IKK untuk pendidikan anak usia dini tahun 2011 mencapai 53,06%, atau meningkat 0,86 point dibandingkan dengan tahun 2010. Bahkan IKK untuk Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK sederajat tahun 2011, mencapai 75,94% atau mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 2.15 point dibandingkan dengan tahun 2010. (LKPJ Bupati Purwakarta tahun 2011, h. IV-1 – IV-2)

IKK Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan IKK Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA berturut-turut mengalami penurunan sebesar 27,16 point dan 2,10 point. Hal ini dapat disebabkan beberapa faktor diantaranya peserta didik tidak melanjutkan pendidikannya di daerah asal melainkan melanjutkan pendidikannya di kota besar lain atau daerah tertentu (*pesantren/boarding school*). Data Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1  
Prosentase Indikator Kinerja Kunci (IKK)  
pada Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta

No.	URAIAN	TAHUN 2010	TAHUN 2011	%/ Kenaikan
1.	IKK pendidikan anak usia dini	52,20	53,06	0.86
2.	IKK penduduk yang berusia dibawah 15 tahun yang melek huruf	98,18	98,91	0.73
3.	IKK Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/paket A sederajat	99,64	98,21	-1.43
4.	IKK Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs sederajat	96,92	96,29	-0.63
5.	IKK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK sederajat	73,79	75,94	2.15
6.	IKK Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sederajat	0,00	0,00	0.00

(Sambungan)

7.	IKK Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs sederajat	0,09	0,00	-0.09
8.	IKK Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK sederajat	0,35	0,25	-0.10
9.	IKK Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	0.00
10.	IKK Angka Kelulusan (AL) SMP	100	100	0.00
11.	IKK Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100	99,97	-0.03
12.	IKK Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	99,22	72,06	-27.16
13.	IKK Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	85,55	83,45	-2.10
14.	IKK guru-guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV	61,62	63,53	1.91

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta, tahun 2012; diambil dari LKPJ Bupati Purwakarta tahun 2011, h. IV-2 – IV-3.

Setelah kebijakan tersebut dilaksanakan, dari tinjauan literatur dikatakan bahwa tahapan selanjutnya dari proses kebijakan menurut Iatridis (bab 2, h. 45-47) adalah evaluasi hasil intervensi, artinya membandingkan antara hasil pelaksanaan dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Dari hasil evaluasi tersebut tentunya akan ada upaya-upaya perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi terhadap kebijakan yang ada pada saat pelaksanaannya. Kemudian membuat rekomendasi lanjutan apakah program tersebut akan dilanjutkan atau tidak berdasarkan hasil temuan yang ada saat melakukan evaluasi.

Dalam dokumen LAKIP Dinas Pendidikan maupun LKPJ Bupati Purwakarta jika ditelaah lebih jauh terlihat bahwa evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta merupakan evaluasi terhadap penyerapan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang telah dibuat dengan tujuan pencapaian kegiatan hanya berkisar pada terlaksananya atau terealisasinya kegiatan tersebut atau dapat dikatakan hal ini hanya berfokus pada tujuan pencapaian *output* semata. Idealnya, dibutuhkan suatu kajian evaluasi secara lebih mendalam agar kebijakan atau program yang ada ke depannya bisa lebih efektif, efisien dan maksimal serta tepat sasaran dalam pelaksanaannya.

Meski demikian, terkait dengan penilaian kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta, sesungguhnya yang dapat merasakan langsung dampak atau manfaat kebijakan pendidikan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah adalah masyarakat, oleh karenanya masyarakat yang menilai secara langsung

keberhasilan kebijakan atau program pendidikan tersebut di lapangan. Sementara program kegiatan pendidikan yang bersifat formal, evaluasinya dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah sebagai bukti pertanggungjawaban akuntabilitas publik.

### **5.2.2. Keterlibatan DPRD dalam Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta**

Di Kabupaten Purwakarta, dari hasil lapangan yang ada saat ini terkait keterlibatan DPRD dalam setiap kebijakan pembangunan daerah, termasuk pendidikan, memang telah berjalan dengan baik. Artinya, pihak eksekutif selalu berkoordinasi dan berkomunikasi secara baik dengan pihak legislatif dalam menentukan sebuah kebijakan di Purwakarta. Berikut akan dipaparkan hak yang dimiliki DPRD, di antaranya yaitu :

#### **1. Hak Budget DPRD**

- a. Digunakan sebagai persetujuan (*approval*) pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran kegiatan yang bersumber dari APBD dan bertujuan untuk memperoleh legitimasi dan legalitas yang kuat terhadap kebijakan yang dikeluarkan tersebut
- b. Terkait penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan telah mendapatkan persetujuan DPRD, hal ini bertujuan sebagai akuntabilitas publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- c. Digunakan untuk menaikkan anggaran belanja pemerintah daerah dari tahun ke tahun.

#### **2. Hak Pengawasan DPRD**

- a. Mengusung agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- b. Meminimalisir adanya penyelewangan terkait penggunaan anggaran karena DPRD setiap saat bisa memanggil pelaksana program untuk dimintai keterangannya.
- c. Apabila ditemui kekurangan pada pelaksanaan kebijakan maka dapat diperbaiki saat itu atau di masa selanjutnya.

Terkait dengan anggaran, lebih lanjut Tedja (2011) mengatakan bahwa pihak legislatif seharusnya berperan maksimal agar asas penggunaan keuangan negara mengacu sepenuhnya pada dua asas utama yang perlu diperhatikan untuk membuktikan adanya kinerja legislatif dalam mengawasi anggaran oleh eksekutif; yaitu asas tepat sasaran; dan asas dapat dipertanggungjawabkan secara politis. Asas tepat sasaran, tentunya secara konseptual sangat sederhana, untuk dinyatakan. Akan tetapi dalam aplikasinya, ada begitu banyak anggaran yang sama sekali tidak tepat sasaran. Kalaupun tepat sasaran sesuai dengan tujuan – tujuan pengalokasian keuangan – seringkali yang kita dapatkan adalah tidak secara keseluruhan anggaran tersebut sampai pada kelompok sasaran (masyarakat). Asas yang kedua adalah dapat dipertanggungjawabkan secara politis. Dalam pengertian bahwa segala format pos pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, yang secara substantif maupun teknis diperuntukkan bagi suatu aktivitas tertentu (fisik maupun non fisik) haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada legislatif, maupun kepada masyarakat secara luas apabila ada tuntutan untuk mempertanggungjawabkan. Hal inilah yang disebut sebagai pertanggung jawaban politis. (h. 47-48)

Selain hak budget, anggota DPRD memiliki hak pengawasan dalam keterlibatannya pada kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk bidang pendidikan. DPRD juga memiliki kewenangan untuk mengawasi regulasi pendidikan yang ada di Purwakarta serta terhadap implementasi kebijakan yang telah disepakati sebelumnya antara pemerintah daerah dan DPRD. Sehingga DPRD bisa menilai secara langsung terhadap kebijakan tersebut.

Dari tinjauan literatur terkait tahapan proses kebijakan sosial (bab 2, h. 46-47), keterlibatan DPRD ini masuk dalam tahapan mengkomunikasikan rekomendasi perumusan program yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dan dibutuhkan persetujuan DPRD selaku perwakilan masyarakat di parlemen. Jika rekomendasi untuk intervensi kebijakan sudah disetujui oleh DPRD, maka selanjutnya pemerintah daerah menyiapkan perencanaan pelaksanaan kegiatan program atau kebijakan tersebut di lapangan. Setelah itu masuk ke tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan kebijakan atau program tersebut.

Pihak legislatif merupakan jembatan penghubung antara pemerintah daerah (pihak eksekutif) dengan masyarakat, mereka juga sebagai juru bicara masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan kesejahteraan masyarakat karena pihak legislatif merupakan perwakilan masyarakat di parlemen yang bisa secara langsung bersinggungan dengan pemerintah daerah. Di sisi inilah pentingnya keterlibatan DPRD secara aktif dalam setiap tahapan proses kebijakan. Pihak legislatif memiliki kewajiban serta tanggung jawab moral kepada masyarakat yang telah memilih mereka sebagai perwakilannya di parlemen. Oleh karenanya, memang sudah selayaknya DPRD harus memperjuangkan aspirasi masyarakat sebagai konstituen mereka.

### **5.2.3. Keterlibatan Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta**

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan. Dalam kegiatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Purwakarta, termasuk di dalamnya bidang pendidikan, partisipasi masyarakat dilakukan melalui kegiatan *miggon* desa/kelurahan, kemudian dilanjutkan pada musrenbang tingkat desa/kelurahan, kemudian dibawa ke tingkat kecamatan dan pada akhirnya ke tingkat kabupaten.

Kegiatan musrenbang ini memang tampak terlihat seperti kegiatan untuk menampung aspirasi masyarakat dari bawah serta memberikan usulan atau rekomendasi bagi kegiatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Purwakarta, tetapi sejatinya masyarakat hanya sebatas memberikan usulan atau rekomendasi saja tanpa bisa terlibat lebih jauh, yang memiliki hak secara penuh terhadap penyusunan kegiatan atau program dalam bidang apapun, termasuk pendidikan, adalah pemerintah daerah melalui persetujuan DPRD. Tentunya salah satunya tidak terlepas dari usulan atau rekomendasi yang diberikan oleh masyarakat.

Selain kegiatan musrenbang, untuk penyampaian aspirasi masyarakat bisa dilakukan melalui kegiatan *gempungan* yang dilakukan oleh Bupati, dalam satu pekan selama tiga kali Bupati melakukan kegiatan turun kampung. Masyarakat bisa beraudiensi dengan Bupati secara langsung menyampaikan aspirasi atau keluhannya dalam bidang apapun, termasuk pendidikan.

Selain itu, keterlibatan masyarakat bisa menjadi kontrol serta motivasi bagi pemerintah daerah sebagai penyelenggara pendidikan. Kontrol sosial yang dilakukan masyarakat begitu penting adanya, ketika ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai maka masyarakat akan langsung dapat mempertanyakan bahkan meluruskan kebijakan tersebut.

Jika melihat kondisi yang ada di Kabupaten Purwakarta, setidaknya pemerintah daerah telah melaksanakan kegiatan perencanaan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Atau dapat dikatakan sebagai *bottom-up planning*, karena mengumpulkan atau menampung aspirasi serta rekomendasi dari masyarakat mulai dari tingkat yang paling bawah. Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan *minggon* desa/kelurahan, kegiatan musrenbang mulai tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten. Di sisi lain, Bupati Purwakarta juga melakukan kegiatan *gempungan* tiga kali dalam satu pekan.

Idealnya, alangkah baiknya jika masyarakat selalu dilibatkan dalam semua tahapan yang ada, tidak hanya sebatas memberikan rekomendasi saat penjarangan aspirasi melalui kegiatan *minggon* atau pun musrenbang. Tetapi pada kenyataannya hal tersebut memang agak susah diterapkan karena kekuasaan dalam menyusun serta merumuskan sebuah kebijakan hingga menjadi sebuah program atau kegiatan sepenuhnya berada pada pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah serta tentunya mendapatkan persetujuan dari pihak legislatif. Sementara masyarakat posisinya hanya sebatas memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan awal bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah serta masyarakat bisa menjadi kontrol sosial bagi penyelenggara kebijakan ketika ada kebijakan yang kiranya tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Meski demikian, masyarakat sesungguhnya telah terlibat secara penuh dalam semua proses tahapan kebijakan, meski tidak secara langsung, melalui para wakil mereka di legislatif.

Begitu pentingnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan lebih jauh diungkapkan oleh Conyers (1991) di mana ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dianggap sangat penting. *Pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa

kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek sosial akan gagal. *Kedua*, masyarakat lebih mempercayai program atau proyek pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses, persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. *Ketiga*, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri. Mereka pun punya hak turut *urun rembug* (memberikan saran) dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. (h. 154-155)

Dari tiga hal yang diungkapkan Conyers di atas, terlihat bahwa salah satu fungsi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah untuk mengetahui kebutuhan masyarakat di lapangan. Karena sejatinya masyarakat yang lebih mengetahui kebutuhan di daerahnya masing-masing. Sehingga kegiatan pembangunan yang ada bisa tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan setidaknya membuat masyarakat merasa lebih dihargai sehingga kebijakan atau program tersebut bisa didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Selain itu, media dan sarana penyampaian aspirasi masyarakat harus disediakan secara baik agar partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam kebijakan atau program yang dikeluarkan pemerintah bisa maksimal, efektif dan efisien.

### **5.3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta**

#### **5.3.1. Faktor Pendukung**

Berdasarkan hasil keterangan para informan yang dipaparkan saat kegiatan wawancara di lapangan, ada beberapa faktor yang menjadi pendukung dalam kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta, penulis merangkumnya sebagai berikut :

#### **1. Ketersediaan Sarana Dan Media Komunikasi Antara Masyarakat Dengan Pemerintah**

Dari segi komunikasi, dari hasil kegiatan lapangan diperoleh keterangan bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini bupati, terus menerus melakukan

kegiatan *gempungan* yang tujuannya untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat dalam bidang apapun, termasuk bidang pendidikan. Bahkan kegiatan ini dilakukan tiga kali dalam tiap pekan. Bukan hanya kegiatan *gempungan* yang dilakukan oleh Bupati dalam menampung aspirasi dan keluhan masyarakat, ada kegiatan lain seperti kegiatan *minggonan* di masing-masing wilayah untuk menyerap aspirasi serta keluhan masyarakat yang kemudian akan dibawa ke tahap yang lebih tinggi sebagaimana telah dibahas pada bab 4 sebelumnya.

Artinya, sarana-sarana komunikasi yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta untuk masyarakat sudah cukup ideal. Komunikasi menjadi begitu penting untuk mendukung keberhasilan sebuah kebijakan agar apa yang akan dilakukan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan.

## 2. Ketersediaan Alokasi Anggaran Pendidikan Yang Bersumber Dari APBD

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan program atau kegiatan dalam membuat suatu kebijakan pembangunan, bidang apapun, termasuk pendidikan tersebut adalah anggaran atau dana. Tidak dapat dipungkiri, alokasi dana dalam setiap kegiatan pembangunan memang sangat diperlukan. Terkait pengalokasian anggaran, sepenuhnya merupakan hak dari pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Semakin besar alokasi dana yang diberikan untuk bidang tertentu dalam hal ini pendidikan, hal ini jelas memperlihatkan bahwa pemerintah daerah *concern* terhadap dunia pendidikan. Tetapi apabila anggaran yang dialokasikan minim, maka tentunya dapat dikatakan pemerintah daerahnya kurang peduli dengan pendidikan. Tentunya diperlukan adanya *political will* pemerintah dalam hal ini.

Berdasarkan informasi yang telah diungkapkan oleh informan pada bab 4 sebelumnya diketahui bahwa alokasi anggaran untuk bidang pendidikan yang dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta sudah lebih dari 20 persen sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Kondisi ini memang bisa dikatakan sudah cukup ideal karena jumlah alokasi anggaran untuk pendidikan di Kabupaten Purwakarta sudah lebih dari 20 persen sebagai mana yang telah diamanatkan oleh undang-undang pendidikan. Meski demikian diharapkan agar penggunaan anggaran untuk pendidikan tersebut bisa lebih efektif dan efisien sehingga pemanfaatannya bisa lebih maksimal serta

dalam penggunaannya bisa diawasi secara lebih ketat guna menghindari adanya kebocoran atau penyelewengan penggunaan anggaran yang ada oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

### 3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan

Sementara dari aspek sumber daya manusia, pemerintah daerah memiliki jumlah pegawai yang cukup untuk mendukung kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Meski dari segi jumlah pegawai pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta sudah sangat memadai, idealnya, yang perlu diperhatikan lagi adalah keahlian dan keterampilan para pegawai yang senantiasa harus terus ditingkatkan agar kualitas sumber daya manusia pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara optimal.

Faktor-faktor tersebut dapat dikatakan telah sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh George C. Edwards III (bab 2, h. 48-51) yang mengatakan bahwa komunikasi yang dilakukan secara konsisten dan jelas merupakan salah satu faktor yang mendukung terhadap keberhasilan kebijakan, komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat telah dilakukan secara konsisten melalui berbagai sarana dan media yang ada seperti kegiatan *minggonan*, *gempungan*, dan lain-lain sehingga informasi yang disampaikan memiliki kejelasan makna. Dalam komunikasi juga tentunya ada informasi yang akan disampaikan, informasi ini juga merupakan sumber-sumber yang mendukung terhadap kebijakan yang ada. Sumber-sumber lain yang mendukung terhadap kebijakan adalah staf. Yang perlu diingat adalah jumlah staf yang banyak juga belum tentu menjadi pendukung kebijakan jika hal ini tidak diimbangi oleh kualitas mereka seperti keahlian serta keterampilan yang cukup dan memadai. Di sisi lain, anggaran merupakan salah satu fasilitas pendukung terhadap keberhasilan pendidikan. Dengan tersedianya anggaran yang memadai diharapkan kebijakan atau program yang bisa dilaksanakan secara baik dan maksimal. Oleh karenanya, semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan maka semakin *concern* pemerintah terhadap pendidikan.

### 5.3.2. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, ada pula faktor penghambat yang masih menjadi kendala terhadap kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta, diantaranya adalah sebagai berikut :

#### 1. Persebaran Tenaga Pengajar Yang Belum Merata

Keadaan yang terjadi saat ini di Kabupaten Purwakarta adalah persebaran tenaga pendidik yang berkualitas masih banyak terkonsentrasi di perkotaan, sehingga hal ini menjadi ketimpangan antara kota dan desa. Akibatnya, pedesaan menjadi kontributor terhadap tingkat pendidikan rendah di Kabupaten Purwakarta. Begitupun halnya yang terjadi di Desa Rawasari, terutama di SMPN Rawasari yang baru diresmikan pada akhir tahun lalu, rata-rata tenaga pengajar di sekolah tersebut masih berstatus honorer, sementara pegawai negeri sipilnya hanya ada satu orang yaitu kepala sekolahnya. Kondisi ini terjadi merata di hampir seluruh wilayah pedesaan di Kabupaten Purwakarta.

Idealnya, sudah selayaknya dilakukan persebaran tenaga pengajar agar lebih merata di seluruh Kabupaten Purwakarta, bukan hanya sekedar menumpuk di perkotaan. Ketika dikonfirmasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, mereka masih berusaha membuat pemetaan terhadap persebaran guru. Dinas pendidikan juga berusaha terus untuk menggugah para guru terhadap komitmen awalnya ketika diangkat menjadi pegawai negeri yang menyatakan siap di tempatkan di mana saja. Rasanya tidak cukup jika hanya melakukan pemetaan dan menggugah komitmen awak para guru tetapi diperlukan keberanian, kemauan serta usaha yang lebih dari dinas pendidikan selaku penanggung jawab kegiatan pendidikan di Kabupaten Purwakarta untuk membenahi permasalahan persebaran tenaga pendidik yang tidak merata ini. Jika hal ini dapat terealisasikan dengan baik, maka dapat dipastikan ketimpangan kualitas pendidikan antara desa dan kota tidak akan terjadi.

#### 2. Pemahaman Masyarakat Terhadap Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Yang Masih Kurang Dan Belum Merata

Kondisi nyata di Kabupaten Purwakarta yang terjadi saat ini adalah pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kebijakan pendidikan itu sendiri yang masih belum merata, terutama di pedesaan, sehingga hal ini

menjadi faktor penghambat dalam kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Bisa jadi ini disebabkan karena tingkat sumber daya manusia di pedesaan masih tergolong rendah, sehingga pemahaman masyarakatnya pun terhadap pendidikan masih agak kurang.

Padahal idealnya jika pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sudah baik maka setidaknya hal ini akan berpengaruh baik pula terhadap kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Artinya, masyarakat telah memiliki kesadaran secara penuh terhadap pendidikan sehingga tanpa harus diberitahukan lagi masyarakat akan turut ambil bagian dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengedukasi masyarakat secara terus menerus tanpa lelah dalam memberikan pemahaman yang lebih baik akan pentingnya pendidikan. Dengan meningkatnya pendidikan, maka diharapkan akan meningkatnya ekonomi masyarakat yang tentunya akan berdampak pada meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat sehingga perekonomian daerah secara makro pun akan menjadi lebih baik.

### 3. Ketidakjelasan Pelimpahan Wewenang Dari Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Propinsi Kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten)

Sementara dari segi komunikasi yang terjadi saat ini di Kabupaten Purwakarta, terutama dalam hal pembagian wewenang antara pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah (kabupaten) serta pemerintah propinsi terhadap pemerintah daerah (kabupaten), tidak sepenuhnya memberikan delegasi dalam bidang pendidikan serta ketidakjelasan kewenangan dalam penggunaan anggaran, menjadi hambatan dalam kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Seolah terjadi *gap* di antara mereka, karena terkadang kebutuhan daerah (kabupaten) dengan yang dilakukan pemerintah pusat atau pemerintah propinsi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sejatinya pemerintah daerah (kabupaten) yang lebih memahami akan kebutuhan di daerahnya.

Idealnya, seharusnya pemerintah pusat dan pemerintah propinsi memberikan kewenangan yang penuh kepada pemerintah daerah (kabupaten) untuk menjalankan kebijakan yang ada. Kemudian pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh dalam menyusun serta merumuskan kebijakan atau program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat di daerah. Pemerintah pusat dan

pemerintah propinsi cukup menjadi koordinator serta melaksanakan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap pelaksanaan kebijakan di daerah agar tidak terjadi penyimpangan terhadap penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk pemerintah daerah. Yang terjadi saat ini seolah-olah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah propinsi semacam proyek belaka yang tidak menyentuh secara langsung apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh daerah, lain yang dibutuhkan lain pula yang diberikan.

Dari faktor-faktor penghambat tersebut di atas, menurut George C. Edwards III (bab 2, h. 48-51) staf sebagai salah satu sumber selain menjadi faktor pendukung juga bisa menjadi faktor penghambat. Jika kebutuhan tenaga pengajar yang masih kurang persebarannya di wilayah pedesaan hal ini akan menjadi kendala terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Purwakarta terutama di wilayah pedesaan. Bukan hanya sekedar jumlah staf yang dibutuhkan, tetapi diperlukan pula staf yang memiliki kualitas baik agar dapat mendukung dan tidak menghambat terhadap keberhasilan kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta.

Kemudian komunikasi juga demikian halnya, selain bisa menjadi faktor pendukung hal ini bisa menjadi faktor penghambat dalam kebijakan. Ketidakjelasan komunikasi yang terjadi akan menghambat keberhasilan kebijakan yang ada. Ketika daerah membutuhkan suatu hal tetapi yang diberikan lain maka tentunya akan menjadi kendala di lapangan. Kurangnya informasi yang diperoleh pemerintah pusat atau pemerintah propinsi terhadap apa yang dibutuhkan oleh daerah menyebabkan terjadinya ketidakjelasan komunikasi yang ada di antara mereka. Lebih lanjut, struktur birokrasi yang tercipta justru menjadi penghambat keberhasilan kebijakan yang dilakukan karena tentunya hal ini akan terjadi saling lempar tanggung jawab jika terjadi suatu masalah. Misalnya, ketika pemerintah pusat atau pemerintah propinsi melaksanakan suatu kegiatan atau program di daerah sementara program tersebut belum dibutuhkan daerah, maka seolah-olah daerah menerima program tersebut akan setengah hati, di sisi lain pemerintah pusat atau pemerintah propinsi telah melimpahkan semuanya kepada pemerintah daerah ketika program tersebut telah selesai dikerjakan.

Faktor lain yang bisa menjadi penghambat adalah kecenderungan-kecenderungan. Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Hal ini terlihat dengan masih enggannya para tenaga pengajar untuk ditempatkan di wilayah pedesaan, mereka merasa lebih nyaman berada di perkotaan. Akibatnya, konsentrasi mereka lebih banyak di perkotaan dan membawa dampak terhadap kebijakan pendidikan secara umum di Kabupaten Purwakarta terutama di wilayah pedesaan karena kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas di wilayah pedesaan. Lebih lanjut, pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan masih sangat kurang terutama hal ini juga banyak terjadi di wilayah pedesaan. Pantas kiranya jika wilayah pedesaan menjadi kontributor terbesar terhadap rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Purwakarta, di satu sisi wilayah pedesaan kekurangan akan tenaga pengajar yang berkualitas, sementara di sisi lain pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan masih kurang sehingga masih ada orang tua yang enggan untuk menyekolahkan anaknya pada pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Dari pemaparan yang telah diuraikan sebelumnya, berikut ini akan disampaikan matriks perbandingan antara temuan lapangan dengan ideal, seperti pada tabel 5.2 di berikut ini :

Tabel 5.2  
Matriks Perbandingan Antara Temuan Lapangan Dengan Ideal

	<b>Teori/Ideal</b>	<b>Temuan Lapangan</b>
Permasalahan masih rendahnya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Analisis Masalah : Pengumpulan informasi tentang masalah sosial, kondisi sosial, mendefinisikan sifat masalah dan isu-isu yang ada di dalamnya.	Pada tahapan ini diketahui bahwa : - Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) baru mencapai 7,55 tahun. - Angka Melek Huruf (AMH) belum mencapai 100 persen. - <i>Drop Out</i> / putus sekolah masih cukup tinggi untuk SLTP dan SLTA.
Kebijakan Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta.	Perumusan kebijakan, alasan argumentasi kebijakan serta merekomendasikan intervensi.	- Kebijakan umum dalam bidang pendidikan. a. Program wajib belajar sembilan tahun. b. Kebijakan pendidikan SD-SMP satu atap. c. Kebijakan Pendidikan gratis. - Kebijakan lokal dalam bidang pendidikan. a. Program kurikulum Baca Tulis Al Qur'an (BTQ). b. Kebijakan pengaturan jajanan anak sekolah.
Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta	Mengorganisir pelaksanaan, melaksanakan dan memantau program.	- Kebijakan umum dalam bidang pendidikan. a. Program wajib belajar sembilan tahun : tidak bersifat paksaan, tidak ada sanksi hukum, tidak diatur dengan undang-undang tersendiri, keberhasilan hanya diukur dengan angka partisipasi meningkat b. Kebijakan pendidikan SD-SMP satu atap : sudah dilakukan di beberapa wilayah pedesaan terisolir. c. Kebijakan Pendidikan gratis : diperuntukan

(Sambungan)

		<p>bagi siswa SD dan SMP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan lokal dalam bidang pendidikan.             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program kurikulum Baca Tulis Al Qur'an (BTQ) : membaca surat-surat pendek, dilaksanakan setengah jam setiap pagi hari, belum optimal, masih berproses.</li> <li>b. Kebijakan pengaturan jajanan anak sekolah : masih belum optimal, baru digulirkan awal tahun 2012, masih ditemui kendala terutama di wilayah pedesaan.</li> </ul> </li> </ul>
Penilaian Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta	Evaluasi hasil intervensi dan membandingkan antara hasil dengan apa yang diharapkan, merekomendasikan kelanjutan atau ketidaklanjutan program/kebijakan.	Dalam dokumen LAKIP Dinas Pendidikan dan LKPJ Bupati Purwakarta terlihat evaluasi yang dilakukan merupakan evaluasi terhadap penyerapan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dengan tujuan pencapaian kegiatan hanya berkisar pada terlaksananya atau terealisasinya kegiatan tersebut, dapat dikatakan hal ini hanya berfokus pada pencapaian <i>output</i> semata. Keberhasilan program atau kebijakan dalam bidang pendidikan hanya diukur dengan angka partisipasi pendidikan yang semakin meningkat.
Keterlibatan DPRD dalam Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta	Pemerintah daerah mengkomunikasikan rekomendasi program yang telah disusun / dirumuskan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak budget DPRD : sebagai persetujuan pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD</li> <li>- Hak pengawasan DPRD : sebagai kontrol agar pelaksanaan kebijakan yang telah disetujui</li> </ul>

(Sambungan)

		bersama bisa lebih efektif dan efisien, meminimalisir akan adanya penyelewengan penggunaan anggaran.
Keterlibatan Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta	Perencanaan Partisipatif atau <i>bottom-up planning</i> , melibatkan masyarakat mulai dari tingkat paling bawah.	Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan dilakukan melalui kegiatan <i>minggon</i> desa/kelurahan, musrenbang dan <i>gempungan</i> yang dilakukan oleh Bupati sebagai sarana dan media komunikasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, keluhan serta permasalahan yang terjadi di wilayah mereka masing-masing.
Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor pendukung           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komunikasi</li> <li>b. Sumber-sumber : staf, informasi, wewenang, fasilitas</li> <li>c. Kecenderungan</li> <li>d. Birokrasi</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor pendukung           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaan sarana dan media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah : <i>minggon</i> desa/kelurahan, musrenbang, <i>gempungan</i>.</li> <li>b. Ketersediaan alokasi anggaran pendidikan yang bersumber dari APBD : alokasi anggaran pendidikan oleh pemerintah daerah sudah lebih dari 20 persen.</li> <li>c. Ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan : pemerintah daerah memiliki jumlah pegawai yang cukup, terutama bagi tenaga pengajar.</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor Penghambat           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komunikasi</li> <li>b. Sumber-sumber : staf, informasi,</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor Penghambat           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persebaran tenaga pengajar yang belum merata : persebaran</li> </ul> </li> </ul>

(Sambungan)

	<p>wewenang, fasilitas</p> <p>c. Kecenderungan</p> <p>d. Birokrasi</p>	<p>tenaga pengajar masih terkonsentrasi di perkotaan.</p> <p>b. Pemahaman masyarakat terhadap pendidikan dan kebijakan pendidikan yang masih kurang dan belum merata : terjadi terutama di pedesaan.</p> <p>c. Ketidakjelasan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi kepada pemerintah daerah (kabupaten) : terkadang kebutuhan daerah dengan apa yang dilakukan tidak sesuai.</p>
--	--	---

Sumber : telah diolah kembali

## **BAB 6**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **6.1. Kesimpulan**

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan sosial. Pendidikan juga merupakan salah satu modal dasar sekaligus menjadi kunci keberhasilan pembangunan di suatu tempat. Pendidikan juga memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi yang berkualitas untuk kepentingan masa depan, sehingga manakala tingkat pendidikan dikatakan tinggi setidaknya menggambarkan pola pikir dan peradaban masyarakat di suatu daerah tersebut. Dalam pengukuran pembangunan manusia dalam bidang pendidikan, indikator yang digunakan adalah angka rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf.

Dari hasil temuan lapangan serta dikuatkan oleh pernyataan informan diketahui bahwa Kabupaten Purwakarta saat ini angka rata-rata lama sekolahnya masih berkisar di angka 7,55 tahun, di mana hal ini setara dengan kelas dua SMP. Padahal idealnya rata-rata lama sekolah seharusnya bisa melebihi angka sembilan tahun sehingga pencaangan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dapat dikatakan berhasil. Sementara angka melek huruf di Kabupaten Purwakarta baru mencapai 96 persen di mana masih ada 4 persen masyarakat yang berusia di atas 10 tahun yang mengalami buta huruf. Terkait buta huruf, memang realita di lapangan saat ini tidak memungkinkan bagi Kabupaten Purwakarta untuk bisa mencapai 100 persen angka melek huruf, hal ini dikarenakan masyarakat yang buta huruf merupakan penduduk yang berusia lanjut di atas 60-70 tahun. Jangka panjang diharapkan Kabupaten Purwakarta bisa memberantas angka buta huruf di daerahnya. Selain itu pula, masih dijumpai adanya anak putus sekolah terutama banyak terjadi di wilayah pedesaan yang minim sarana dan prasarana sekolah yang menyebabkan masyarakat menjadi susah serta jauh dalam menjangkau akses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di mana hal tersebut membutuhkan biaya transportasi atau ongkos dalam menjangkau sekolah lanjutan tersebut. Sementara banyak penduduk secara

ekonomi dapat dikategorikan miskin dan tidak mampu dalam membiayai ongkos transportasi anak-anak mereka yang akan sekolah jauh dari domisili tempat tinggal mereka dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya putus sekolah.

Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011 (RKPD Kabupaten Purwakarta tahun 2011) dikatakan bahwa permasalahan pendidikan di Kabupaten Purwakarta adalah tingkat pendidikan masyarakat masih rendah sesuai dengan indikator yang digunakan yaitu angka rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf seperti telah diungkapkan sebelumnya.

Kesimpulan berikut disajikan berdasarkan tujuan penelitian, yaitu :

### **1. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan pendidikan di Kabupaten Purwakarta**

Berdasarkan hasil temuan lapangan terkait dengan permasalahan pendidikan yang terjadi di Kabupaten Purwakarta, untuk mengatasi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengambil beberapa kebijakan dalam bidang pendidikan diantaranya adalah :

1. Kebijakan umum bidang pendidikan, terdiri dari :
  - a. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Program turunan dari pemerintah pusat bahwa setiap anak usia sekolah harus sudah menyelesaikan pendidikan dasarnya selama sembilan tahun
  - b. Kebijakan SD-SMP terpadu satu atap, Kebijakan untuk mendekatkan sarana sekolah SMP kepada masyarakat di daerah-daerah minim akses transportasi umum dengan mendirikan SMP satu lokasi dengan SD sehingga siswa setelah lulus SD bisa langsung melanjutkan ke SMP di lokasi yang sama.
  - c. Kebijakan pendidikan gratis, anggaran bersumber dari dana BOS yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, propinsi, maupun daerah. Kebijakan ini diperuntukan bagi siswa SD dan SMP.
2. Kebijakan lokal bidang pendidikan, terdiri dari :
  - a. Program kurikulum BTQ, Program pengenalan dan pembiasaan baca tulis Al Qur'an sejak dini, hal ini sejalan dengan karakter budaya masyarakat Purwakarta yang mayoritas beragama Islam.

- b. Kebijakan pengaturan jajanan anak sekolah. Anak-anak dihibau untuk membawa bekal makanan sehat dari rumah yang dipersiapkan oleh orang tuanya untuk menghindari resiko terhadap jajanan sekolah yang tidak sehat karena banyak mengandung bahan kimia berbahaya. Selain itu anak-anak dilatih jiwa sosialnya dengan saling berbagi bekal makanan yang dibawanya dari rumah.

Dari kebijakan tersebut di atas, kebijakan yang langsung berpengaruh pada peningkatan indikator penghitungan indeks pembangunan manusia memang hanya kebijakan umum bidang pendidikan, sementara kebijakan lokal bidang pendidikan merupakan penguatan terhadap karakter budaya masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

## **2. Implementasi Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta**

1. Kebijakan umum bidang pendidikan
  - a. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun : tidak bersifat paksaan, tidak ada sanksi hukum, tidak diatur dengan undang-undang tersendiri, keberhasilan hanya diukur dengan angka partisipasi meningkat.
  - b. Kebijakan SD-SMP terpadu satu atap : sudah dilakukan di beberapa wilayah pedesaan terisolir.
  - c. Kebijakan pendidikan gratis : diperuntukan bagi siswa SD dan SMP.
2. Kebijakan lokal bidang pendidikan
  - a. Program kurikulum BTQ : membaca surat-surat pendek, dilaksanakan setengah jam setiap pagi hari, belum optimal, masih berproses.
  - b. Kebijakan pengaturan jajanan anak sekolah : masih belum optimal, baru digulirkan awal tahun 2012, masih ditemui kendala terutama di wilayah pedesaan.

Dalam pelaksanaannya dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta sudah cukup baik di mana pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta sudah sangat peduli terhadap peningkatan pendidikan di daerahnya. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Purwakarta sudah dilakukan melalui mekanisme kegiatan musrenbang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kemudian dibawa ke tingkat kecamatan dan terakhir pada tingkat

kabupaten, meski dalam kegiatan musrenbang ini masyarakat hanya baru sekedar bisa memberikan rekomendasi atau masukan saja bagi pemerintah daerah dalam merumuskan serta memutuskan kebijakan atau program-program pembangunan daerah secara umum termasuk pendidikan tetapi setidaknya masyarakat diberikan kesempatan melalui kegiatan musrenbang ini untuk mengutarakan pendapat serta aspirasinya terkait dengan apa yang mereka butuhkan bagi pengembangan di wilayahnya masing-masing, termasuk dalam bidang pendidikan. Sehingga dapat dikatakan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta telah melakukan kegiatan perencanaan secara partisipatif. Selain itu masyarakat juga bisa menjadi kontrol sosial bagi penyelenggara pendidikan, jika terdapat kebijakan yang tidak sesuai bisa langsung ditanyakan atau diluruskan. Kemudian masyarakat juga bisa menilai secara langsung terkait program atau kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena yang merasakan secara langsung program atau kebijakan pendidikan tersebut adalah masyarakat.

### **3. Faktor pendukung dan penghambat pada kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan pendidikan di Kabupaten Purwakarta**

Kebijakan pendidikan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta dalam upaya meningkatkan pendidikan di Kabupaten Purwakarta memiliki beberapa faktor pendukung diantaranya adalah :

*Pertama*, ketersediaan sarana dan media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Selain kegiatan *gempungan* yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta dalam menyerap aspirasi serta keluhan masyarakat secara langsung, sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dilakukan dengan kegiatan *minggonan* atau pertemuan pekanan yang diadakan mulai dari tingkat RT/RW kemudian juga tingkat desa/kelurahan.

*Kedua*, ketersediaan alokasi anggaran pendidikan yang bersumber dari APBD. Pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta sudah sangat peduli dengan pendidikan, hal ini terlihat dari pengalokasian anggaran untuk kegiatan dalam bidang pendidikan yang bersumber dari APBD di mana jumlahnya sudah lebih dari 20 persen sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang.

*Ketiga*, ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Dari total jumlah pegawai negeri di Kabupaten Purwakarta yang berjumlah 12 ribu orang, lebih dari setengahnya merupakan pegawai dinas pendidikan dalam hal ini merupakan tenaga pengajar (guru) sehingga dapat dikatakan jumlah sumber daya manusia dalam bidang pendidikan sudah sangat lebih dari cukup.

Di sisi lain, kebijakan pendidikan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta dalam upaya meningkatkan pendidikan di Kabupaten Purwakarta juga masih menemui beberapa hambatan, diantaranya adalah :

*Pertama*, persebaran tenaga pengajar yang belum merata. Kenyataan yang ada saat ini jumlah tenaga pengajar yang berkualitas lebih banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara di pedesaan masih sangat minim jumlahnya.

*Kedua*, pemahaman masyarakat terhadap pendidikan dan kebijakan pendidikan yang masih kurang dan belum merata. Hal ini terutama terjadi di wilayah pedesaan, di mana tingkat pendidikan masyarakatnya juga cenderung masih rendah sehingga berpengaruh terhadap pola pikirnya. Karena yang paling banyak dalam memberikan kontribusi terhadap rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Purwakarta berada pada masyarakat pedesaan.

*Ketiga*, ketidakjelasan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah (kabupaten), sehingga seolah terjadi *gap* di antara mereka.

Secara garis besar berdasarkan tahapan-tahapan proses kebijakan yang ada dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta telah melakukan tahapan proses kebijakan tersebut dengan cukup baik. Mulai dari analisis permasalahan pendidikan yang ada di Kabupaten Purwakarta di mana salah satunya dilakukan melalui kegiatan menampung aspirasi serta permasalahan yang terjadi di masyarakat, merumuskan serta merekomendasikan intervensi berupa kebijakan atau program dalam bidang pendidikan, melaksanakan dan memantau program tersebut di lapangan, sampai pada penilaian kebijakan.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga melakukan komunikasi rekomendasi program yang ada kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan dalam

penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD, terlihat jelas adanya keterlibatan DPRD dalam tahapan proses kebijakan. Sementara dari segi perencanaan, pemerintah daerah telah melakukan perencanaan partisipatif atau *bottom-up planning* dengan melibatkan masyarakat dari tingkat yang paling bawah melalui kegiatan musrenbang.

Meski demikian, dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di lapangan masih menemui beberapa hambatan, salah satunya terkait dengan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan terutama terjadi di pedesaan.

Kemudian, untuk kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini hanya sekedar evaluasi terhadap penyerapan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang telah dibuat dengan tujuan pencapaian kegiatan atau program hanya berkisar pada terlaksananya atau terealisasinya kegiatan atau program di mana hal ini hanya berfokus pada tujuan pencapaian *output* semata.

## 6.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan lapangan, pembahasan serta kesimpulan yang ada maka berikut ini penulis sampaikan beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta serta instansi yang terkait, diantaranya sebagai berikut :

1. Terkait persebaran tenaga pengajar yang kurang merata, saat ini jumlahnya lebih banyak terkonsentrasi di perkotaan, maka perlu adanya keberanian, ketegasan serta keseriusan dari pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan selaku instansi pembina para tenaga pengajar. Salah satunya dengan terus menerus memberikan pemahaman serta menggugah kembali komitmen para tenaga pengajar agar siap ditempatkan di mana saja di seluruh Kabupaten Purwakarta sebagai bagian dalam pengabdian mereka untuk mencerdaskan masyarakat di Kabupaten Purwakarta terutama yang berada di wilayah pedesaan. Sehingga masalah akan minimnya tenaga pengajar berkualitas di wilayah pedesaan bisa teratasi dengan baik serta dapat meningkatkan hasil kualitas lulusan sekolah di wilayah pedesaan.

2. Ketika dikeluhkan akan minimnya tenaga pengajar yang berkualitas di wilayah pedesaan saat ini maka bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama atau bahkan lebih diutamakan bagi para tenaga pengajar yang berada di wilayah pedesaan untuk meningkatkan kualitas keterampilan serta keahlian mereka di berbagai bidang sehingga bisa menjadi percepatan peningkatan kualitas tenaga pengajar yang dampaknya akan dirasakan pula pada hasil kualitas lulusan sekolah di wilayah pedesaan.
3. Terkait pemahaman masyarakat yang masih kurang akan pentingnya pendidikan, perlu adanya edukasi secara terus menerus kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan dan waktu, sehingga jika masyarakat telah paham akan pentingnya pendidikan dengan sendirinya masyarakat akan sadar ikut berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan. Dengan meningkatnya partisipasi orang tua dalam menyekolahkan anak mereka maka secara otomatis indeks pembangunan manusia terutama dalam bidang pendidikan di Kabupaten Purwakarta akan meningkat pula.
4. Perlu adanya intervensi Bupati Purwakarta lebih jauh terhadap pemutakhiran data secara *up-to-date* agar validitas datanya bisa lebih diakui secara ilmiah karena dijumpai data-data yang diberikan terutama keluaran BPS Kabupaten Purwakarta masih merupakan data lama. Misalnya, buku Purwakarta Dalam Angka Tahun 2010, diterbitkan tahun 2011 sementara isinya merupakan kumpulan data tahun 2009. Hal ini juga dikeluhkan oleh pihak Bappeda Kabupaten Purwakarta sehingga pada akhirnya Bappeda Kabupaten Purwakarta membuat proyeksi data berdasarkan data beberapa tahun sebelumnya, sehingga data yang ditampilkan bukan merupakan data *real* sebenarnya.
5. Perlu adanya konsep evaluasi kebijakan atau program pendidikan secara lebih jelas dan terperinci bukan hanya sekedar evaluasi terhadap penyerapan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang telah dibuat dengan tujuan pencapaian kegiatan atau program hanya berkisar pada terlaksananya atau terealisasinya kegiatan atau program di mana hal ini hanya berfokus pada tujuan pencapaian *output* semata.

## DAFTAR REFERENSI

### BUKU

- Adi, Isbandi Rukminto. (2008). *Intervensi Komunitas; Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Rajawali Pers
- (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas (dari Pemikiran Menuju Penerapan)*. Depok : FISIP UI Press.
- Alston, Margareth & Bowles, Wendy. (1998). *Research for Social Workers: An Introduction to The Methods*. Sidney : Allen & Unwind Ltd.
- Coffey, Amanda. (2004). *Reconceptualizing Social Policy : Sociological Perspective on Contemporary Social Policy*. United Kingdom : Open University Press
- Conyers, Diana. (1991). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar*. (Susetiawan, Penerjemah). Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Dye, Thomas R. (1981). *Understanding Public Policy*. United States of America : Prentice-Hall, Inc
- Fuad, A. Ihsan. (1997). *Dasar-dasar Pendidikan*. (Cet. I). Jakarta : Rineka Cipta
- Getteng, H.A. Rahman. (1997). *Pendidikan Islam dalam Pembangunan*. (Cet. I). Ujung Pandang : Yayasan Al-Ahkam
- Gilbert, Neil., Specht, Harry., & Terrel, Paul. (1974). *Dimensions of Social Welfare Policy*. United States of America : Prentice-Hall, Inc
- Hall, Anthony & Midgley, James. (2004). *Social Policy for Development*. London : Sage Publication
- Hasbullah. (1999). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Iatridis, Demetrius. (1994). *Social Policy : Institutional Context of Social Development and Human Services*. United States of America : Brooks/Cole Publishing Company
- Ife, Jim & Tesoriero, Frank. (2008). *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Jakarta : Pustaka Pelajar
- Isjoni. (2006). *Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

- Jamrozik, Adam. (2001). *Social Policy in The Post-Welfare State : Australians on The Threshold of The 21st Century*. Australia : Pearson Education
- Kahn, Alfred J. (1969). *Theory and Practice of Social Planning*. New York : Russel Sage Foundation.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (1997). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jilid I. Jakarta : PT Gunung Agung
- Midgley, James. (2005). *Pembangunan Sosial; Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*. (Dorita Setiawan dan Sirojudin Abbas, Penerjemah). Jakarta : Diperta Islam Depag RI
- Mikkelsen, Britha. (2003). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan : Sebuah buku Pegangan bagi Praktisi Lapangan*. (Matheos Nalle, Penerjemah) Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael. (1987). *Qualitative Data Analysis : A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills : Sage Publication
- Minichiello, Victor., Aroni, Rosalie., Timewell, Eric & Alexander, Loris. (1996). *In-depth Interviewing*. (2nd Ed). Melbourne : Longman.
- Mkandawire, Thandika. (2004). *Social Policy in Development Context*. New York : Palgrave MacMilan / UNRISD
- Moleong, Lexy. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Dedi. (2011). *Gagasan Pembangunan Purwakarta Berkarakter*. Purwakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Neuman, W. Lawrence. (2006). *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*. (Sixth Edition). United States of America : Pearson Education, Inc
- Nisal, Samsul. (2002). *Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*. Jakarta : Ciputat
- Patton, Michael Quinn. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. (3rd Ed). United States of America : Sage Publication
- Purwanto, M. Ngalm. (1988). *Ilmu Pendidikan : Teoretis dan Praktis*. Bandung : Remadja Karya

- Rosada, Dede. (2004). *Paradigma Pendidikan Demokrasi : Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta : Prenada Media
- Sagala, Syaiful. (2007). *Manajemen Stratejik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung : Alfabeta
- Salam, Burhanuddin. (1996). *Pengantar Pedagogik : Dasar-dasar Ilmu Mendidik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Sudirman N, et.al. (1989). *Ilmu Pendidikan : Kurikulum, program pengajaran efek instruksional dan pengiring, CBSA, metode mengajar, media pendidikan, pengelolaan kelas, evaluasi hasil belajar*. Bandung : Remadja Karya
- Sudjana S. (2004). *Pendidikan Nonformal Wawasan Sejarah Perkembangan Filsafat Teori Pendukung Azas*. Bandung : Falah Production.
- Suharto, Edi. (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- (2008). *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung : Alfabeta
- Stiglitz, Joseph E., Sen, Amartya., Fitoussi, Jean-Paul. (2011). *Mengukur Kesejahteraan : Mengapa Produk Domestik Bruto Bukan Tolok Ukur Yang Tepat Untuk Menilai Kemajuan?* (Mutiara Arumsari dan Fitri Bintang Timur, Penerjemah). Marjin Kiri
- Taylor, SJ. & Bogdan, R. (1984). *Introduction to Qualitative Research Methods : The Search For Meanings*. (2nd Ed). Toronto : John Wiley & Son
- Tirtarahardja, Umar dan S. L. Lasulo. (2005). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus (Edisi dan Revisi Terbaru)*. Yogyakarta : CAPS
- Yunus, Firdaus M. (2004). *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial Paula Fraire dan YB. Mangunwijaya*. Yogyakarta : Logung Pustaka
- Yusuf, Muri. (1982). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Zuriah, Nurul. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori-Aplikasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara

**SERIAL**

- Indahri, Yulia. (2009). *Komitmen Masyarakat Terhadap Pendidikan*. Jakarta : P3DI Setjen DPR RI
- Larasati, Tika. (n.d.) *Jurnal Kualitas Hidup Pada Wanita Yang Sudah Memasuki Masa Menopause*. Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma
- Prawiro, Mulyono D. (2009). *Paradigma Baru Pembangunan Sosial*. November. Gemari Edisi 106 Tahun X. Hal 64-65
- Prayitno, Ujianto Singgih. (2009). *Tantangan dan Agenda Pembangunan Sosial : Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat*. Jakarta : P3DI Setjen DPR RI

**PENELITIAN ILMIAH**

- Aini, Sari Nur. (2010). *Peran Dinas Pendidikan Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Metro*. Tesis. Jakarta : Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
- Natakusumah, Achmad Dimiyati. (2006). *Kebijakan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Pandeglang : Studi Kasus Bebas Biaya Sekolah (BBS) Tahun 2005*. Tesis. Jakarta : Program Pascasarjana Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
- Nurudin. (2007). *Efektifitas Kebijakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Banyuwangi*. Tesis. Jakarta : Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
- Tedja, Jeanne Noveline. (2011). *Fungsi Representasi Anggota Legislatif Dalam Merumuskan Kebijakan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Kajian Pada DPRD Kota Depok)*. Tesis. Depok : Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

**PERATURAN PERUNDANGAN DAN DOKUMEN LAIN**

- Data Makro Bidang Sosial Budaya. 2011. Bappeda Kabupaten Purwakarta
- Jakarta Dalam Angka*. 2010. BPS Provinsi DKI Jakarta
- Kecamatan Plered Dalam Angka*. 2009. BPS Kabupaten Purwakarta

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 2010. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta  
 LKPJ Walikota Bandung. 2010. Bappeda Kota Bandung  
 LKPJ Bupati Purwakarta. 2011. Bappeda Kabupaten Purwakarta  
*Purwakarta Dalam Angka*. 2010. BPS Kabupaten Purwakarta  
 RKP Daerah Kabupaten Purwakarta 2011. Bappeda Kabupaten Purwakarta  
 RPJM Daerah Kabupaten Purwakarta 2008-2013. Bappeda Kabupaten Purwakarta  
 RPJP Daerah Kabupaten Purwakarta 2005-2025. Bappeda Kabupaten Purwakarta  
*Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta*. 2010. BPS Provinsi DKI Jakarta  
 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial  
 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

#### **PUBLIKASI ELEKTRONIK**

Abidin, Muhammad Zainal. (2011). *Masyarakat dan Pola Hidup Masyarakat*.  
<http://www.masbied.com/2011/02/27/masyarakat-dan-pola-hidup-masyarakat/#more-226> akses 09-11-2011

Chamsyah, Bachtiar. (2007). *Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia Upaya Menangani Permasalahan Sosial Kemiskinan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. <http://www.setneg.go.id> akses 17-10-10

Harmadi, Sonny Harry B. (2011). *Kinerja Pembangunan Manusia Indonesia*.  
<http://www.mediaindonesia.com/read/2011/01/27/198895/68/11/Kinerja-Pembangunan-Manusia-Indonesia> akses 10-10-2011

Mulyadi, Dedi. (2010). *Pembangunan Pendidikan yang Berbasis Nilai-Nilai Kesundaan*.  
<http://www.purwakartakab.go.id/beranda/wacana/87-pembangunan-pendidikan-yang-berbasis-nilai-nilai-kesundaan.html> akses 05-10-2011

<http://www.pikiran-rakyat.com/node/117719> akses 05-10-2011

<http://www.poskota.co.id/tag/sekolah/page/11> akses 05-10-2011

## Lampiran 1 Pedoman Indepth Interview

### PEDOMAN INDEPTH INTERVIEW

Nama Informan : .....

Status Informan : .....

#### **A. Untuk Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Bupati, Bappeda, Dinas Pendidikan)**

1. Apa saja permasalahan pendidikan yang ada di Kabupaten Purwakarta?
2. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, apa saja kebijakan atau program yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait bidang pendidikan?
3. Sejauhmana pelaksanaan kebijakan atau program terkait bidang pendidikan tersebut di lapangan?
4. Apakah ada perbedaan antara sebelum dan sesudah kebijakan atau program bidang pendidikan tersebut dilakukan? Jika iya, apa saja perbedaan tersebut?
5. Bagaimana mekanisme evaluasi yang dilakukan terhadap kebijakan atau program bidang pendidikan tersebut? Siapa yang melakukan evaluasinya? Bagaimana mekanisme rekomendasi lanjutan dilakukan terkait hasil evaluasi kebijakan atau program yang telah dilakukan?
6. Sejauhmana keterlibatan DPRD dalam setiap tahapan proses kebijakan pendidikan (perencanaan, perumusan, pelaksanaan dan evaluasi)?
7. Sejauhmana Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses kebijakan pendidikan (perencanaan, perumusan, pelaksanaan dan evaluasi)?
8. Menurut saudara, apa saja yang menjadi faktor pendukung terhadap kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta? Kemudian, apa saja yang menjadi faktor penghambatnya?

(lanjutan)

**B. Untuk DPRD Kabupaten Purwakarta Cq. Komisi Bidang Pendidikan**

1. Tolong gambarkan, bagaimana hubungan koordinasi yang terjalin selama ini antara lembaga eksekutif (pemerintah daerah) dengan lembaga legislatif (DPRD)?
2. Apa saja yang anda ketahui tentang kebijakan atau program yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam bidang pendidikan?
3. Sejauhmana keterlibatan Saudara sebagai anggota DPRD dalam setiap tahapan proses kebijakan pendidikan (perencanaan, perumusan, pelaksanaan dan evaluasi)?
4. Bagaimana cara Saudara dalam menjaring aspirasi masyarakat terkait bidang pendidikan? Apa saja cara komunikasi yang dilakukan dengan masyarakat?
5. Menurut saudara, apa saja yang menjadi faktor pendukung terhadap kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta? Kemudian, apa saja yang menjadi faktor penghambatnya?

**C. Untuk Masyarakat Umum**

1. Apa saja yang anda ketahui tentang kebijakan atau program yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam bidang pendidikan?
2. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap kebijakan atau program bidang pendidikan tersebut?
3. Menurut Saudara, bagaimana pelaksanaannya selama ini? Apakah memiliki pengaruh yang berarti terhadap kehidupan masyarakat?
4. Apakah Saudara dilibatkan dalam setiap tahapan proses kebijakan pendidikan (perencanaan, perumusan, pelaksanaan dan evaluasi)? Jika iya, sejauhmana keterlibatan tersebut?
5. Bagaimana mekanisme Saudara dalam menyampaikan aspirasi, terutama terkait dengan bidang pendidikan?
6. Menurut saudara, apa saja yang menjadi faktor pendukung terhadap kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta? Kemudian, apa saja yang menjadi faktor penghambatnya?

## Lampiran 2 Transkrip Wawancara Informan Penelitian

Informan	Transkrip Wawancara
<p>Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi (Kode DM)</p>	<p>...mencoba melakukan langkah-langkah penyederhanaan, walau pun ini agak berat karena sudah menjadi salah satu kebijakan pemerintah pusat...</p> <p>Pelaksanaannya sudah berjalan sangat efektif. Cita-cita saya hari ini, <i>pertama</i> menyederhanakan pendidikan. Sekolah SD-SMP disatukan menjadi pendidikan dasar 9 tahun. <i>Kedua</i> menyederhanakan kurikulum ... Jika hal ini dilakukan, maka pendidikan akan murah, sederhana dan menyenangkan.</p> <p>Dalam setiap tahun kita melakukan evaluasi. Budi pekerti diukur saja anak-anak itu bagaimana <i>sih</i> tingkat jajannya di sekolah, meningkat atau menurun? Tawurannya, meningkat atau menurun? Nilai-nilai kenakalan lainnya, meningkat atau menurun? Tingkat kebersihannya di sekolah, meningkat atau menurun? Disitulah esensi pendidikan, bukan pada UAN saja.</p> <p>Yang mengevaluasi masyarakat. Masyarakat akan merasakan anaknya disekolahkan, mengalami peningkatan kualitas atau tidak. Kalau untuk aspek-aspek regulasi formal dilakukan oleh guru. Secara umum masyarakat yang melakukan evaluasi, apakah pendidikan ini berhasil atau tidak.</p> <p>DPRD kan ada dua kebijakan, <i>pertama</i> budget, bersama-sama menyusun anggaran pendidikan, yang <i>kedua</i> pengawasan, mereka juga memiliki kewenangan untuk mengawasi bagaimana regulasi pendidikan yang ada di Purwakarta, bagaimana pertumbuhan sekolah, bagaimana perkembangan kreatifitas siswa, DPRD secara politik dan administratif bisa melakukan evaluasi secara menyeluruh.</p> <p>...Baca Qur'an merupakan bagian dari ritual untuk membangun komunikasi intelektual dan spiritual manusia dengan pembelajarannya pada akhirnya menjadi komunikasi dengan Tuhannya. Sehingga hal itu disebut dengan persenyawaan kehidupan. Makanannya juga, kalau ingin melahirkan masyarakat yang sehat, sistem pendidikan yang sehat, maka makanan sekolahnya juga harus sehat. Makanannya harus penuh dengan nilai-nilai ritualitas, yaitu makanan yang dipersiapkan secara ikhlas, makanan yang dimasak oleh ibunya. Inilah konsepsi dasar dalam pembentukan karakter manusia, dan disitu ada doa.</p> <p>...Angka melek huruf tidak mungkin bisa seratus persen, bagaimana nenek-nenek usia 70 tahun harus belajar? ... Artinya tidak mungkin juga kita seratus persen melek huruf, karena masih banyak yang usianya diatas 60-70 tahun... (Selasa, 24 April 2012)</p>
<p>Kepala Bappeda Kabupaten Purwakarta Tri Hartono</p>	<p>...Rata-rata Lama Sekolah saat ini masih baru mencapai 7,55 tahun, setara dengan SMP kelas 2 rata-ratanya ... masih adanya buta huruf. Angka Melek Huruf 96 persen, artinya masih ada 4 persen yang masih buta huruf.</p>

(lanjutan)

<p>(Kode TH)</p>	<p>...kemampuan APBD yang dialokasikan untuk bidang pendidikan sudah cukup baik. Tahun 2011, kumulatif APBD termasuk untuk gaji pegawai (guru) lebih dari 40 persen, kalau dilihat dari belanja pembangunannya sudah lebih dari 25 persen. Itu sudah lebih dari yang diamanatkan undang-undang, yaitu 20 persen. ... Pendidikan dasar sudah gratis dan tidak dipungut biaya. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan, ternyata kebijakan tersebut ada kesepakatan antara komite sekolah dengan pihak sekolah untuk menanggulangi dana-dana yang tidak ditanggulangi oleh pemerintah. Baik dana pemerintah daerah maupun dana dari pemerintah pusat...</p> <p>...Yang berkontribusi menyumbangkan terhadap pendidikan rendah itu di pedesaan...</p> <p>Saya sangat sependapat jika tidak ada ujian di kelas 6 SD jika ada pencaangan wajib belajar 9 tahun, cukup di kelas 9 (kelas 3 SMP) saja. Buat apa jika harus lulus dulu di SD kemudian hal ini menjadi problem tersendiri bagi orang tua karena dibutuhkan biaya lagi untuk mencari-cari sekolah lanjutan? Wajib belajar 9 tahun harus dijalankan saja, cukup melanjutkan dari kelas 6 ke kelas 7, 8, 9 tanpa ujian akhir di kelas 6. Meski hal ini mirip dengan konsep dari masyarakat Barat, kenapa tidak kita adopsi hal yang baik ini?</p> <p>...Kebijakan lokal dari pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh Bupati Purwakarta dalam bidang pendidikan yang diatur melalui peraturan bupati (perbup) diantaranya kebijakan anak sekolah di SD sudah memiliki sertifikat Baca Tulis Qur'an (BTQ), hal ini sangat baik terhadap kualitas pendidikan moral bangsa melalui pendidikan agama, kemudian kebijakan jajan anak sekolah, anak sekolah tidak boleh jajan tetapi membawa bekal makanan sehat dari rumah. Bagi yang anak yang tidak mampu/miskin yang tidak punya apa-apa cukup membawa rantang kosong ke sekolah. ... Meski demikian, pelaksanaannya di lapangan tidaklah mudah. Misalnya, di lingkungan kelas, yang miskinnya lebih banyak, seperti di pedesaan, menjadi problem tersendiri, karena lebih banyak yang membawa rantang kosong ketimbang rantang isi. Perlu ada pengembangan sosialisasi pada pelaksanaannya...</p> <p>Kebijakan tentang membawa rantang baru digulirkan tahun ini, ... Hal ini merupakan sesuatu yang positif ... Salah satu permasalahannya adalah kualifikasi tenaga pendidik. Jika kualitas gurunya baik, maka demikian pula <i>output</i> pengajaran yang dihasilkan pun akan baik. Antara guru di desa, di kota kecil, di kota sedang dan kota besar pasti beda secara kualitasnya...</p> <p>...Di Bappeda sendiri, ada monitoring dan evaluasi. Lebih pada bagaimana mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, kegiatan dalam satu tahun anggaran. Tidak sampai mengevaluasi bagaimana pelaksanaan pendidikan secara <i>detail</i> di sekolah, itu wilayahnya dinas pendidikan...</p> <p>...Kemudian DPRD mempunyai hak pengawasan, apa yang sudah disepakati itu, implementasinya di lapangan seperti apa ... Mulai dari kebijakan umum 5 tahunan, setiap tahunnya kebijakan umum anggaran</p>
------------------	--

(lanjutan)

	<p>juga dievaluasi dan selalu dikomunikasikan, tentunya dalam penyusunan APBD sebagai implementasi tahunan untuk pelaksanaan kegiatan satu tahun Hak Budget ada di anggota dewan, disetujui bagaimana kebijakan itu...</p> <p>...Mereka hanya bisa memberikan rekomendasi, tidak punya hak dalam memutuskan anggaran pendidikan untuk kegiatan-kegiatan. Sepenuhnya pada pemerintah daerah, melalui persetujuan DPRD.</p> <p>...Dari sumberdaya manusia, pemerintah daerah dengan jumlah pegawai yang tidak terlalu banyak menjadi salah satu pendukung terhadap segala pelaksanaan kegiatan dalam segala bidang, termasuk pendidikan. Sementara hambatannya, saya kira pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan masih belum merata, terutama di pedesaan ... Dari segi komunikasi, dalam pembagian kewenangan, pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah tidak sepenuhnya mendelegasikan sepenuhnya dalam bidang pendidikan, utamanya dalam kewenangan penggunaan anggaran. Demikian pula halnya dengan pemerintah propinsi, tidak jelas kewenangannya dalam penggunaan anggaran. Cukup pemerintah propinsi sebagai koordinasi saja, baik dalam perencanaan, pelaksanaannya, dan lebih dominan pada koordinasi dalam hal pengawasannya. Tetapi hal ini masih belum dilakukan, sehingga seolah ada <i>gap</i>. Terkadang apa yang dilakukan pemerintah propinsi tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Padahal pemerintah daerah lebih mengetahui akan kebutuhan daerahnya. (Senin, 16 April 2012).</p>
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Panda Dinata (Kode PD)	<p>Khususnya untuk di Desa Rawasari Kecamatan Plered, ...<i>pertama</i> banyak anak-anak yang belum saat menikah mereka menikah, <i>kedua</i> yang harusnya dibangku sekolah mereka harus keluar, karena ekonomi mereka buruh upah pabrik genting sehingga anak-anak dituntut untuk ikut berusaha membantu ekonomi keluarga, ... Sedangkan di Nagri Kaler, ...ketika terjadinya kebangkrutan pada perusahaan, mereka juga ikut pindah pada akhirnya memberikan kontribusi angka <i>drop out</i> di Purwakarta...</p> <p>Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan kartu multiguna bagi penduduk yang tidak mampu, artinya tidak ada alasan lagi bagi anak-anak yang tidak mampu dalam melanjutkan pendidikannya...</p> <p>Pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis masih tetap gratis, sudah tidak ada kendala. Untuk SD-SMP seperti buku dan lain-lain sudah dibiayai oleh dana BOS. Sarana pembangunan sudah dibiayai oleh pemerintah, baik dari pusat, propinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintah juga membuat aturan bahwa tidak diperbolehkan sekolah menjual buku dan LKS, kecuali yang sudah diprogramkan oleh pusat dengan anggaran dari dana BOS.</p> <p>...Di Kabupaten Purwakarta, di luar Desa Rawasari dan Kelurahan Nagri Kaler, ada tiga kecamatan yang terisolir, yaitu Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukatani dan Kecamatan Maniis. Salah satunya mereka yang tidak bisa melanjutkan sekolah yang domisilinya jauh.</p>

(lanjutan)

	<p>Untuk hal ini dibuat kebijakan untuk mendekatkan sekolah ke masyarakat. Ada sekolah SD-SMP terpadu satu atap. Contohnya di Sukasari ada 4 sekolah yang didekatkan ke masyarakat, SD-SMP satu atap. Alasannya karena kendala jarak jauh tersebut, sehingga Pak Bupati mendekatkan sekolahnya untuk menjawab wajib belajar 9 tahun...</p> <p>Untuk evaluasi dilakukan secara bersama-sama, termasuk Pak Bupati. Tiap pekan, sebanyak tiga kali, Pak Bupati melakukan kegiatan <i>gempungan</i>, semua terkontrol kegiatan-kegiatan yang digulirkan. Untuk program-program yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan, kami memiliki UPTD, pengawas, kepala sekolah, kami sendiri melakukan rapat-rapat, setidaknya bisa merekam apa yang terjadi di wilayah masing-masing.</p> <p>DPRD, ketika kami membuat satu perencanaan, lalu diekspos, Pak Bupati menyetujui, lalu menyusun anggaran, biasanya DPRD mempertanyakan rancangan tersebut, <i>ouputnya</i> mau seperti apa? jika mereka memahami mereka akan meng-<i>acc</i> tetapi jika tidak maka akan meng-<i>cut</i> anggaran tersebut. Sering pula kami dipanggil, baik secara kelembagaan dinas atau pun perbidang, terkait dengan program-program yang dikembangkan oleh dinas pendidikan. Salah satunya seperti SD-SMP terpadu, mereka sangat merespon. Keterlibatan langsung dari DPRD lebih cenderung kepada merespon, merekomendasikan anggaran yang diusulkan. DPRD melaksanakan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. (Selasa, 8 Mei 2012)</p>
Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Zaenurizal (Kode ZR)	<p>...Untuk yang wajar 9 tahun tidak boleh ada yang terputus dari SD ke SMP. Sehingga ada SMP terpadu untuk mendekatkan akses pendidikan agar tidak terputus. Tidak ada alasan bagi orang tua terkait jauhnya jarak sekolah, ongkos dan sebagainya...</p> <p>Kami sedang berusaha membuat <i>mapping</i> tentang persebaran guru. Menggugah kembali komitmen awal, siap ditempatkan di mana saja. Memberi pemahaman <i>mindset</i> bahwa semua sekolah sama...</p> <p>Keterlibatan masyarakat sangat banyak. Saat ini masyarakat sudah menyoroti tentang pendidikan, ...maka ketika ada kebijakan-kebijakan yang sedikit saja tidak bagus kadang-kadang bisa muncul, bisa langsung atau melalui DPRD. Itu merupakan sebagai suatu kontrol bagi kami, sebagai motivasi bagi kami untuk perbaikan-perbaikan sistem ... Pendidikan harus dibentuk oleh tiga unsur, yaitu sekolah, orang tua dan lingkungan. Satu sama lain harus kompak...</p> <p>...salah satunya <i>political will</i> dari pemerintah. Bupati saat ini sangat <i>concern</i> terhadap pendidikan. Saya sangat senang dengan hal ini, sangat melihat pendidikan. Begitu kritis dan peduli terhadap pendidikan ... Dari segi komunikasi, pemerintah daerah, terutama Bupati melakukan <i>gempungan</i> dalam menampung aspirasi masyarakat secara langsung. Faktor penghambatnya, belum seragamnya pemahaman masyarakat tentang sebuah kebijakan...</p>

(lanjutan)

	<p>Ada angka-angka yang tidak termasuk di dalamnya, misalnya keluaran SMP jumlahnya sekian orang, ketika di SMA jumlahnya berkurang. Asumsinya anak tidak melanjutkan sekolah, tetapi tidak demikian halnya. Bisa jadi yang bersangkutan pindah, melanjutkan ke ponpes atau lainnya yang tidak bisa terdeteksi oleh kita. Tidak dipungkiri juga ada yang putus tidak melanjutkan karena bekerja...</p> <p>Bagus sekali, Pak Bupati menggiring ke arah yang religi. <i>Attitude</i> yang diinginkan. Saya setuju. Bukan hanya sekedar formal, pembelajaran agama dan sebagainya tetapi diisi dengan memaknai Al Qur'an itu sendiri, dimulai dengan membaca Qur'an terbata-bata, membaca Qur'an secara bisa, membaca Qur'an dengan artinya, mengartikannya dengan bagus. Sehingga bisa meng-<i>applied</i> di kehidupan sehari-hari ... Meski demikian masih belum maksimal, ini masih berproses. Baru dicanangkan tahun lalu. Karena ini dimaknai sebatas pelaksanaan kurikulum, padahal sejatinya tidak seperti itu. Dijadikan <i>habits</i> atau kebiasaan. Harapannya seperti itu. Tenaga pengajarnya bisa siapa saja yang ada pada sekolah tersebut, tidak harus guru agama. Sebaiknya tidak secara parsial dalam memahami kebijakan tersebut. (Selasa, 8 Mei 2012)</p>
Komisi 4 Bidang Pendidikan DPRD Kabupaten Purwakarta Eno Sukarna (Kode ES)	<p><i>Alhamdulillah</i>, di Kabupaten Purwakarta, antara eksekutif dan legislatif hubungannya berjalan dengan sangat baik. Dalam rangka menentukan anggaran dan lain sebagainya hal itu tak lepas dari koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD.</p> <p>Bagi kami selaku anggota dewan, ketika sudah diprogramkan kami serahkan sepenuhnya ke pihak eksekutif. Kami hanya sekedar pengawasan, teknisnya diserahkan kepada eksekutif. Sejak dari perencanaan dan seterusnya.</p> <p>Di DPRD, masing-masing anggota dewan memiliki <i>leading sector</i>, saya sendiri dalam bidang pendidikan. Ketika ada permasalahan pendidikan, saya sebagai <i>leading sector</i> pendidikan selalu turun ke lapangan / masyarakat langsung. Misalnya, kemarin saya melakukan kunjungan kerja pemantauan kegiatan UN di Kecamatan Bojong dan Kecamatan Darangdan. Ketika ada permasalahan lain di luar pendidikan, kami tetap menampung aspirasi dan keluhan masyarakat, kemudian nanti dibicarakan di tingkat komisi...</p> <p>Pemerintah sudah memprogramkan bahwa anggaran pendidikan 30 persen, kami sangat menyambut baik hal ini, jika kita berbicara tentang pendidikan sekarang di Purwakarta belum sampai 12 persen jika tidak salah. Ketika kebijakan pendidikan gratis dengan pembiayaan dari dana BOS dikeluarkan, terutama untuk SPP, seolah-olah ini meringankan orang tua, tetapi hal ini menyebabkan tidak mendidik masyarakat berfikir. Ketika ada pembiayaan di luar pembiayaan dana BOS, seperti kegiatan ekstrakurikuler, dianggap sebagai pungutan. Padahal hal ini wajar adanya. Pun untuk penyediaan sarana belajar, seperti kursi, dan lain sebagainya...</p> <p>Perbedaan antara pedesaan dan perkotaan, bukan dari materi</p>

(lanjutan)

	<p>pendidikan, tetapi pada tenaga pendidik atau guru. Lebih banyak terkonsentrasi di kota. Hal ini yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendidikan antara desa dan kota... Dari Total 12 ribu jumlah pegawai pemda, 6 ribu lebih merupakan guru...</p> <p>Program pendidikan dasar 9 tahun, seharusnya tanpa sekat. Artinya, tanpa ada pemisahan 6 tahun (SD) dan 3 tahun (SMP) ... Sekolah SD-SMP satu atap mungkin hanya ada di Purwakarta saja, sebagai terobosan pemerintah daerah Purwakarta, program Bupati Purwakarta... (Kamis, 26 April 2012).</p>
Lurah Nagri Kaler Zainal Mutaqin (Kode ZM)	<p>Kebijakan pendidikan gratis, sudah dicanangkan sejak beberapa tahun lalu.</p> <p>Untuk yang belum bisa membaca atau buta huruf, di sini juga ada, tetapi persentasenya sangat kecil, itu pun usianya yang sudah agak tua... (Selasa, 17 April 2012)</p>
Lurah Rawasari Noeratif (Kode N)	<p>Penyampaian aspirasi masyarakat disampaikan melalui kegiatan <i>minggon</i> desa. Mulai dari RT, RW, Bamus Desa. Musrenbang tingkat desa. Dari desa kemudian dilanjutkan ke musrenbang tingkat kecamatan.</p> <p>...Dengan sekolah tersebut dibangun, kami merasa beruntung karena hal ini demi kepentingan masyarakat Desa Rawasari. Hal ini awalnya didasari keluhan masyarakat yang merasa susah dan jauh ketika akan melanjutkan ke SMP. Kami merintis sejak lama ... Peserta didiknya bukan hanya dari Desa Rawasari, tetapi dari Desa Cadasmekar Kecamatan Tegalwaru, Desa Citeko, Desa Pamoyanan...</p> <p>...Perjuangan kami dalam mewujudkan SMP di Rawasari lumayan cukup panjang. Sejak tahun 2007, beberapa bulan setelah saya dilantik. <i>Alhamdulillah</i>, dengan komunikasi intensif berbagai pihak, mulai dari kelas jauh, satu atap, kini sudah ada SMP berdiri sendiri...</p> <p>Putus sekolah sekarang tidak banyak, salah satunya nikah karena hamil. Itu memang ada. Tidak kami pungkiri. Sekarang perkembangannya sudah jauh sekali, sudah berkurang...</p> <p>Faktor penghambat, salah satunya kesadaran masyarakat masih kurang... (Kamis, 10 Mei 2012).</p>
Tokoh Masyarakat Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Yusup Saepulloh (Kode YS)	<p>Kebijakan Pendidikan di Purwakarta sebagai penguatan ada kurikulum BTQ, program membawa bekal anak ke sekolah. Pendidikan gratis, biaya operasional sudah ditanggung oleh pemerintah melalui dana BOS, mulai dari SD dan SMP...</p> <p>Kebijakan tersebut, sangat membantu masyarakat. Seperti BTQ, awalnya kontradiksi, ada anggapan masyarakat bahwa sudah ada sekolah agama, sudah ada pendidikan agama. Padahal ini untuk penguatan, minimal ada <i>support</i> bagi guru untuk membiasakan siswanya untuk baca Qur'an. Minimal membaca surat-surat pendek.</p>

(lanjutan)

	<p>Pada akhirnya orangtua sangat menyambut baik kebijakan ini. Program rantangan pun demikian, awalnya dirasakan berat oleh orang tua, tetapi kemudian justru hal ini menjadi pengkondisian bagi anak-anak yang susah untuk sarapan pagi. Selain itu hal ini bisa memupuk jiwa sosial anak, saling berbagi antar mereka dengan saling tukar bekal yang mereka bawa dari rumah.</p> <p>...Komite sekolah merupakan mitra sekolah, yang menampung aspirasi masyarakat dalam hal ini orang tua siswa. Ketika ada suatu kebijakan sekolah yang terkait dengan anggaran diluar pembiayaan pemerintah, biasanya ditangani oleh komite sekolah.</p> <p>...Sosialisasi kebijakan pendidikan dilakukan secara langsung oleh Bupati melalui kegiatan <i>gempungan</i>, melalui <i>banner</i> / baliho, dan lain-lain.</p> <p>Faktor penghambat, pemahaman masyarakat yang masih kurang terhadap kebijakan pendidikan yang ada. (Rabu, 9 Mei 2012)</p>
Tokoh Masyarakat Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Karya Winata (Kode KW)	<p>Peningkatan budi pekerti anak, membaca tulis Al Qur'an sebagai kurikulum muatan lokal, digulirkan oleh Bupati, hal ini untuk mengantisipasi perilaku yang menyimpang saat ini, seperti tawuran. Kebijakan lainnya adalah makanan jajanan di sekolah. Dianjurkan agar orang tua menyiapkan bekal makanan untuk anaknya ke sekolah...</p> <p>Faktor penghambat, persepsi masyarakat yang masih kurang saat memahami kebijakan yang ada... (Rabu, 25 April 2012)</p>
Tokoh Masyarakat Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Syarifudin Jufri (Kode SJ)	<p>Di kami ada musrenbang, ada kegiatan <i>minggon</i> tingkat kelurahan, membahas tentang apa-apa yang akan dibangun baik fisik maupun non fisik, termasuk pembangunan pendidikan. Dari kelurahan dibawa ke tingkat kecamatan. Kemudian dibawa lagi ke tingkat kabupaten ... Terkait pendidikan, jika anggarannya besar maka pemerintahnya <i>concern</i> terhadap pendidikan, jika anggarannya minim, maka sekedar omong doang. Di Purwakarta, <i>Alhamdulillah</i> anggaran pendidikannya sudah minimal 20 persen dari APBD.</p> <p>Dari segi kebijakan saat ini, ada dana BOS untuk pendidikan secara gratis... (Jumat, 27 April 2012).</p>
Tokoh Masyarakat Desa Rawasari Kecamatan Plered Munawar (Kode M)	<p>...masih ada beberapa orang tua siswa yang pemahamannya terhadap pendidikan masih kurang...</p> <p>Perkembangan antara dulu dan sekarang sangat jauh berbeda. Sekarang ini sarana pendidikan dan infrastrukturnya sudah lebih baik dari sebelumnya. (Kamis, 10 Mei 2012)</p>
Tokoh Masyarakat Desa Rawasari Kecamatan Plered	<p>Kebijakaan pendidikan di Purwakarta, terutama di Rawasari, adanya pemerataan pendidikan, dengan dibangunnya SMP satu atap. Pemerintah berusaha mendekatkan sekolah ke masyarakat. Sudah berjalan selama 4 tahun, tahun ini baru akan meluluskan angkatan kedua...</p>

(lanjutan)

<p>Alamsyah Barkah (Kode AB)</p>	<p>Kebijakan BTQ sangat terasa manfaatnya, selain belajar ilmu umum, mereka juga bisa belajar ilmu agama. Kebijakan membawa bekal makanan dari rumah, hal ini untuk menghindari makanan yang tidak sehat yang dijual oleh pedagang. Selain makan secara sehat, hal ini juga menghemat orang tua karena tidak jajan di luar.</p> <p>...Untuk kebijakan membawa bekal ke sekolah, belum semua melaksanakan. Masih ikut dengan kebiasaan lama, jajan di sekolah. Di Rawasari, karena keterbatasan masyarakat bukan membawa rantang sebagai wadah makanan, tetapi membawa timbel yang dibungkus daun pisang, satu kali pakai dan langsung buang.</p> <p>...penyampaian aspirasi masyarakat biasanya melalui komite sekolah. Biasanya ketika akan memutuskan sebuah kebijakan yang menyangkut anggaran di luar pembiayaan pemerintah, maka biasanya mereka berembuk juga. Salah satunya ketika akan membuat sarana penunjang kegiatan, musholla/masjid sekolah, ini semua dikomunikasikan kepada seluruh orang tua siswa agar saling membantu dalam pembiayaan pembangunan musholla/masjid sekolah tersebut. Komite sekolah terdiri dari orang tua dan guru.</p> <p>Hambatannya, guru-guru SMP di sini masih berstatus honorer, satu-satunya PNS hanya kepala sekolahnya. Sehingga tenaga pengajarnya yang masih menjadi kendala... (Kamis, 10 Mei 2012)</p>
<p>Tokoh Masyarakat Desa Rawasari Kecamatan Plered Karyono (Kode K)</p>	<p>... <i>Alhamdulillah</i>, kita bisa merintis sejak tahun 2007 untuk penyediaan sarana SMP, dimulai dengan jarak lalu, satu atap, sekarang sudah berdiri sendiri. Dulu kendalanya SMP sangat jauh, tapi sekarang sudah tidak lagi...</p> <p>Terkait kebijakan membawa bekal ke sekolah, karena jajanan banyak mengandung bahan kimia, terutama pewarna, orang tua pasti akan menyiapkan yang terbaik untuk anaknya, untuk menghindari hal tersebut dan anak tetap sehat. (Kamis, 10 Mei 2012).</p>



Nomor : 169/H2.F9.06.PPs/PDP.04.02/2012  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

04 April 2012

Yang terhormat,  
Kepala kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat  
Kabupaten Purwakarta  
Di  
Purwakarta

Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, para peserta wajib untuk melakukan penulisan tesis. Sehubungan dengan itu, salah seorang peserta Program kami yaitu :

Nama : Nursehan Sugiharto  
N P M : 1006744212  
Judul Tesis : **Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta**  
Waktu : 9 April 2012 – 15 Juni 2012

bermaksud mengadakan penelitian, mencari data dan informasi di Instansi Bapak. Untuk maksud tersebut kami mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian bagi mahasiswa kami.

Atas perhatian dan bantuan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP UI  
Sekretaris,



Dra. Fitriyah, M.Si  
NIP195904081987022001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta
2. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Purwakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta
4. Yth. DPRD Kabupaten Purwakarta cq. Komisi Bidang Pendidikan



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Gandanegara No. 25 Telp. 200036, 200038, 200039 Fax 200037, Telp./Fax 203954  
PURWAKARTA 41112

Purwakarta, 9 April 2012

Nomor : 073/92/ Kesbangpolinmas  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth :  
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan  
Olah Raga Kabupaten Purwakarta

di -

**PURWAKARTA**

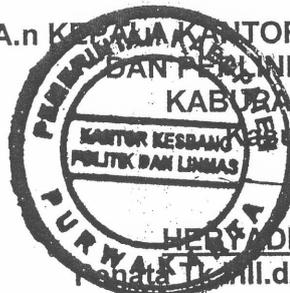
Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan surat dari Sekretaris Program Pascasarjana Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI Nomor : 169/H2.F9.06.PPs/PDP.04.02/2012 tanggal 4 April 2012 Perihal : Izin Penelitian , atas nama :

**N a m a** : Nursehan Sugiharto  
**NPM** : 1006744212  
**Program Studi** : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
**Judul** : "Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta."

Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan memberi ijin kepada nama tersebut di atas untuk melakukan penelitian di Dinas/Instansi/Wilayah saudara, dari tanggal 9 April 2012 s/d 15 Juni 2012 dan kepada yang bersangkutan agar menyampaikan laporan hasil penelitian tersebut kepada kami.

Demikian untuk menjadi maklum.

A.n KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN PURWAKARTA  
Bag Tata Usaha



HERYADI ERLAN WD, SSTP

Penata Telp. 022/19760505 199603 1 002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta ;
2. Yth. Wakil Bupati Purwakarta ;
3. Yth. Sekretaris Daerah Purwakarta ;
4. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Purwakarta ;
5. Yth. DPRD Kab.Purwakarta Komisi Bidang Pendidikan ;
6. Yth. Dekan Universitas Indonesia ;
7. Yth. Yang bersangkutan.

Kebijakan pendidikan..., Nursehan Sugiharto, FISIP UI, 2012.